

- 5) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - 6) Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - 7) Penerimaan Dana Alokasi Umum;
 - 8) Penerimaan Dana Otonomi Khusus;
 - 9) Penerimaan Dana Penyesuaian;
 - 10) Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 - 11) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;
 - 12) Penerimaan Hibah;
 - 13) Penerimaan Dana Darurat;
 - 14) Penerimaan Lainnya; dan
 - 15) Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa.
- e. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
- 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang;
 - 3) Bunga;
 - 4) Subsidi;
 - 5) Hibah;
 - 6) Bantuan Sosial
 - 7) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
 - 8) Transfer Keluar.
- f. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- g. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
- 1) Penjualan Aset Tetap;
 - 2) Penjualan Aset Lainnya;
 - 3) Pencairan Dana Cadangan; dan
 - 4) Penerimaan dari Divestasi.
 - 5) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas
- h. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
- 1) Perolehan Aset Tetap;
 - 2) Perolehan Aset Lainnya;
 - 3) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 4) Penyertaan Modal Pemerintah; dan
 - 5) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.
- i. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- j. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- 1) Penerimaan Utang Luar Negeri;
 - 2) Penerimaan dari Utang Obligasi;
 - 3) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah; dan
 - 4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
- k. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- 1) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
 - 2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;

- 3) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah; dan
 - 4) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.
- I. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.
- 1) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi:
 - a) Penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk; dan
 - b) Penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
 - 2) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi:
 - a) Pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar; dan
 - b) Pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

7. Kebijakan Akuntansi Tertentu

a. Dana Bergulir

- 1) Investasi non permanen pemerintah daerah dalam bentuk Dana bergulir untuk Kopersi dan UKM dicatat dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 2) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena pelunasan/ pembayaran atas dana bergulir, penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
- 3) Penerimaan dari pelepasan investasi panjang non permanen-dana bergulir diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- 4) Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

No	Pengelompokkan sesuai <i>Aging Schedule</i>	Persentase Penyisihan
1.	Kurang Lancar	25%
2.	Diragukan Dapat Ditagih	50 %
3.	Tidak Dapat Ditagih/Macet	100 %

- 5) Pengeluaran dana bergulir dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir dan diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- 6) Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
- 7) Pada awal perolehan Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dan pada tahun berikutnya dilakukan penyesuaian dan dicatat dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 8). Investasi dana bergulir dinilai dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar nilai kas yang diperoleh ditambah dengan nilai yang dapat ditagih.
- 9). Penghitungan atas nilai investasi dana bergulir dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Menatausaha dana bergulir sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
 - b) Mengelompokkan umur tunggakan atas dana bergulir sesuai jatuh temponya menjadi:

- (1) Dana bergulir yang kurang lancar, apabila umur tunggakan 1 bulan sampai dengan 12 bulan.
- (2) Dana bergulir diragukan dapat ditagih, apabila dalam jangka waktu 13 bulan sampai dengan 24 bulan telah menunggak atas pengembalian/penyetoran setiap bulannya.
- (3) Dana bergulir yang tidak dapat ditagih (macet), apabila dalam jangka waktu 24 bulan lebih telah menunggak atas pengembalian/penyetoran setiap bulannya.
- (4) Menghitung jumlah penyisihan sesuai *aging schedule* dengan prosentase sebagai berikut:

No.	Penggolongan sesuai Aging Schedule	Prosentase Penyisihan
1.	Kurang Lancar	25%
2.	Diragukan dapat ditagih	50%
3.	Tidak Dapat Ditagih/Macet	100%

- c) Menyajikan Nilai Dana bergulir TA 20X5, disajikan dalam Neraca dan CaLK dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian		Jumlah	
Jumlah Dana Bergulir yang disalurkan s.d TA 20X4		XX	
(-)	Pengurangan:		
	- Disetor TA 20X1	XX	
	- Disetor TA 20X2	XX	
	- Disetor TA 20X3	XX	
	- Disetor TA 20X4	XX	
	Jumlah Disetor s.d TA 20X4		(XX)
Nilai Investasi Non Permanen- Dana Bergulir TA 20X5		XX	

- 10) Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun dana bergulir.
- 11) Penghapusan dana bergulir oleh pemerintah daerah terdiri atas:
 - a) Penghapus bukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - b) Penghapus tagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- 12) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan secara bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a) Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/ atau;
 - b) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - c) Debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - d) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dan/atau
 - e) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - f) Debitur tidak diketahui keberadaanya lagi karena:

- (1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- (2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- g) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Bupati; dan/atau
- h) Obyek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

b. Dana Kapitasi JKN pada FKTP

- 1) Penerimaan dan pengeluaran kas atas Dana Kapitasi JKN pada FKTP diakui pada kas diterima dari BPJS Kesehatan pada rekening bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP untuk diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran belanja diakui pada saat belanja tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP dan PPKD/BUD telah menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP;
- 2) Pendapatan atas Dana Kapitasi JKN pada FKTP diakui pada saat telah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP;
- 3) Belanja atas Dana Kapitasi JKN pada FKTP diakui pada saat telah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP;
- 4) Dalam hal pendapatan dana kapitasi yang diterima bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berjalan, dana tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya dan diakui sebagai kas di tangan bendahara baik kas tunai ataupun kas pada bank; dan
- 5) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP merupakan bagian dari Rekening BUD, sehingga pada saat berakhirnya tahun anggaran atau pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap penyajian Dana Kapitasi JKN pada FKTP, yaitu:
 - a) Kas, diakui sebagai sisa dana untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya;
 - b) Kas tersebut terdiri dari kas tunai dan kas bank;
 - c) Sisa kas dapat diakui sebagai pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP masing-masing; dan
 - d) Pendapatan jasa giro atas rekening bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP, dapat diakui sebagai pendapatan jasa giro dan apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran kas tersebut belum disetor ke Kas Daerah maka kas tersebut juga akan diakui sebagai kas di tangan bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP masing-masing sesuai Buku Kas Umum dan Rekening Koran bendahara dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP.

8. Prinsip Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai perolehan;
- c. Prinsip realisasi;

- d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 - e. Prinsip periodisitas;
 - f. Prinsip konsistensi;
 - g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - h. Prinsip penyajian wajar.
9. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki Rumah Sakit Liun Kendage yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, Rumah Sakit Liun Kendage berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran disajikan secara komparatif antara Anggaran dan Realisasi Tahun 2023 dan realisasi 2022. Anggaran yang disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah Anggaran Perubahan APBD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023, dan diubah kembali dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Perubahan tersebut disebabkan karena terdapat kekurangan dalam penganggaran gaji dan tunjangan setelah penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hal ini tertuang pada hal menimbang dalam peraturan tersebut. Untuk itu dalam penganggaran antara Anggaran dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 dan Pergeseran Perubahan pada Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2023 tidak ada perbedaan hanya saja dalam sub rincian belanja khususnya pada rincian belanja gaji dan tunjangan terdapat perbedaan. Adapun Anggaran dan Realisasi anggaran dapat uraian sebagai berikut :

5.1.1 Pendapatan – LRA

Secara keseluruhan realisasi pencapaian Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan 31 Desember 2023 telah mencapai Rp875.005.959.667,76 atau 99,90% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp875.855.621.158,00, dan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp902.325.462.502,54 maka pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp27.319.502.834,78 atau turun sebesar 3,03%. Penurunan tersebut disebabkan karena keadaan ekonomi juga terlebih disebabkan penerimaan dari Dana Transfer Pusat mengalami penurunan sebesar Rp13.483.044.842,00 dimana Dana Transfer Pusat di Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp782.468.841.851,00 sedangkan di Tahun 2023 hanya sebesar Rp768.985.797.009,00.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

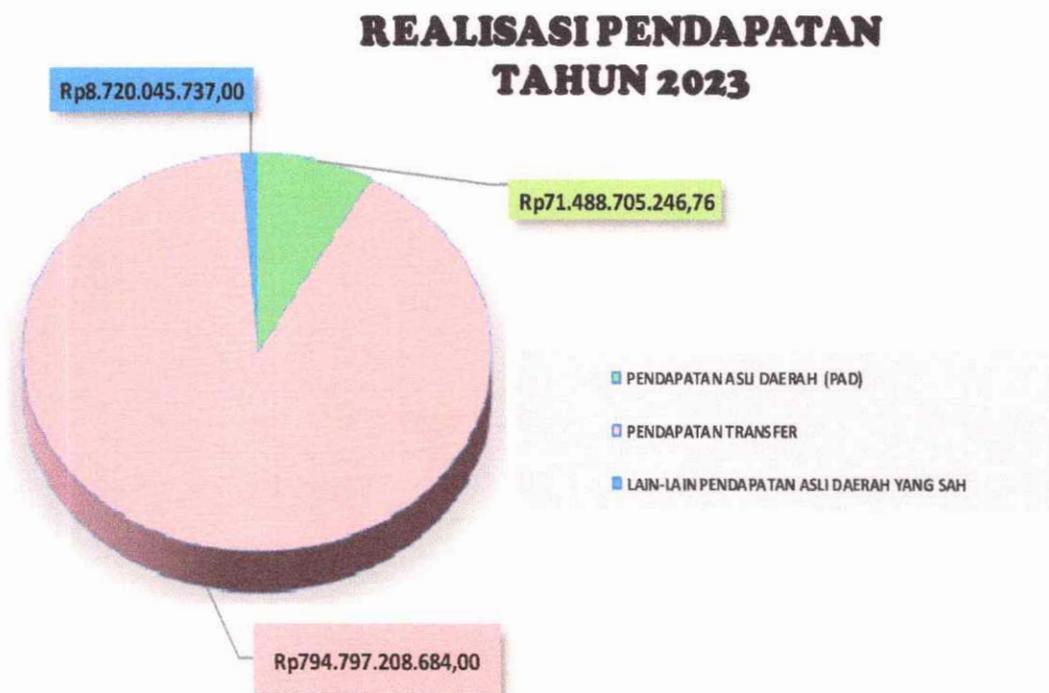
	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
PENDAPATAN - LRA	875.855.621.158,00	875.005.959.667,76	99,90	902.325.462.502,54

Berdasarkan klasifikasi jenis pendapatan, untuk TA 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Pendapatan terdiri atas **Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain**

LKPD 2023 – Audited

Pendapatan Daerah yang Sah, yang realisasi pendapatannya untuk masing-masing jenis pendapatan, digambarkan pada grafik di bawah ini.

Diagram 5.1 Total Pendapatan 2023



Untuk penjelasan anggaran dan realisasi atas masing-masing komponen Pendapatan tersebut diatas sebagai berikut.

Tabel 5.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
A Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	70.509.394.457,00	71.488.705.246,76	101,39	65.066.016.250,54
B Pendapatan Transfer - LRA	796.206.347.863,00	794.797.208.684,00	99,82	809.058.703.243,00
C Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	9.139.878.838,00	8.720.045.737,00	95,41	28.200.743.009,00
Jumlah	875.855.621.158,00	875.005.959.667,76	99,90	902.325.462.502,54

Anggaran dan realisasi ketiga komponen pendapatan tersebut dapat dilihat berikut ini :

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp71.488.705.246,76 atau mencapai 101,39% dari anggaran sebesar Rp70.509.394.457,00 dan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3 Rincian Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2023

	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
a	Pendapatan Pajak Daerah	14.430.167.172,00	9.993.870.597,00	69,26	13.470.745.714,00
b	Pendapatan Retribusi	6.206.325.000,00	5.160.246.873,00	83,14	4.275.600.524,00
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	2.085.713.890,00	2.085.713.890,00	100,00	1.409.861.482,00
d	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	47.787.188.395,00	54.248.873.886,76	113,52	45.909.808.530,54
	Jumlah	70.509.394.457,00	71.488.705.246,76	101,39	65.066.016.250,54

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp65.066.016.250,54 mengalami peningkatan sebesar Rp6.422.688.996,22 atau naik sebesar 9,87%.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2023 mencapai Rp9.993.870.597,00 dari anggaran sebesar Rp14.430.167.172,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp 13.470.745.714,00 maka pada Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp3.476.875.117,00 atau turun 25,81% dan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	14.430.167.172,00	9.993.870.597,00	69,26	13.470.745.714,00

Pendapatan Pajak Daerah merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010. Anggaran dan Realisasi per objek Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari :

Tabel 5.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023

PAJAK		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%
a)	Pajak Hotel	412.165.277,00	387.636.304,00	94,05
b)	Pajak Restoran	1.682.293.080,00	1.417.172.729,00	84,24
c)	Pajak Hiburan	9.535.000,00	20.326.000,00	213,17
d)	Pajak Reklame	379.500.000,00	141.289.348,00	37,23
e)	Pajak Penerangan Jalan	4.614.966.890,00	5.109.971.166,00	110,73
f)	Pajak Sarang Burung Walet	55.706.925,00	55.706.925,00	100,00
g)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.576.000.000,00	766.104.978,00	16,74
h)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.100.000.000,00	1.552.693.147,00	73,94
i)	BPHTB	600.000.000,00	542.970.000,00	90,50
Jumlah		14.430.167.172,00	9.993.870.597,00	69,26

Pencapaian target Pendapatan Pajak Daerah dalam Tahun 2023 hanya mencapai 69,26% dari Anggaran Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp14.430.167.172,00.

Dari 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah, terdapat 3 (tiga) jenis penerimaan Pajak Daerah yang realisasinya mencapai bahkan melampaui target yaitu Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sementara itu realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak mencapai target karena kondisi kemampuan keuangan masyarakat untuk membayar pajak, serta kesadaran wajib pajak yang tidak melaporkan perhitungan dan penyeteroran Pajak Daerah, sekalipun dokumen sebagai dasar pemungutan Pajak serta dasar pelaporan pajak daerah telah disampaikan kepada wajib pajak.

Jika dibandingkan capaian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp13.470.745.714,00,- sedang capaian tahun 2023 hanya sebesar Rp9.993.870.597,00 dimana mengalami penurunan sebesar 25,81% hal ini disebabkan pada tahun 2022 penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sangat tinggi karena ditahun 2022 proyek pekerjaan yang didanai dari dana PEN serta di tahun 2022 juga terdapat penerimaan dari tahun sebelumnya. Pada bulan April 2023 terjadi perubahan harga satuan dasar sebagai dasar perhitungan pajak MBLB. Di samping itu, penurunan realisasi BPHTB pada tahun 2023 salah satunya disebabkan oleh pada Tahun 2022 terdapat pembayaran BPHTB dari PT Pertamina sebesar Rp1.897.438.250,00 yang membuat realisasi BPHTB di tahun 2022 sangat besar. Perbandingan capaian objek pajak daerah tersebut selang tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6 Perbandingan Realisasi Per Objek Pajak Tahun 2023 dan Tahun 2022

JENIS PAJAK		REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a)	Pajak Hotel	387.636.304,00	258.934.324,00	49,70
b)	Pajak Restoran	1.417.172.729,00	1.052.275.970,00	34,68
c)	Pajak Hiburan	20.326.000,00	1.143.000,00	100,00
d)	Pajak Reklame	141.289.348,00	200.065.664,00	(29,38)
e)	Pajak Penerangan Jalan	5.109.971.166,00	4.763.221.990,00	7,28
f)	Pajak Sarang Burung Walet	55.706.925,00	60.651.336,00	(8,15)
g)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	766.104.978,00	2.435.433.043,00	(68,54)
h)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBBP2)	1.552.693.147,00	1.888.098.586,00	(17,76)
i)	BPHTB	542.970.000,00	2.810.921.801,00	(80,68)
Jumlah		9.993.870.597,00	13.470.745.714,00	(25,81)

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp5.160.246.873,00 atau mencapai 83,14 % dari anggaran sebesar Rp6.206.325.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp884.646.349,00 atau naik 20,69%. Adapun rincian realisasi Pendapatan Retribusi tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

JENIS PAD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	6.206.325.000,00	5.160.246.873,00	83,14	4.275.600.524,00

Dari beberapa retribusi yang ada terdapat capaian retribusi yang sangat rendah dibawa 50% diantaranya Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum sebesar 38,77% Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak ada realisasi, sedangkan Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mencapai 25,30%, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar 8% dan Tempat Rekreasi dan Olahraga 24,08%.

Namun terdapat juga Pendapatan Retribusi yang mencapai bahkan melampaui 100% yakni Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang realisasinya mencapai 137,31%. Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai 94,28%. Adapun capaian target pendapatan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8 Capaian Retribusi Daerah

JENIS RETRIBUSI		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
A	Retribusi Jasa Umum	2.982.500.000,00	2.705.126.550,00	90,70	1.403.864.600,00
a)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.655.000.000,00	2.503.086.200,00	94,28	1.214.411.000,00
b)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	134.190.350,00	89,46	130.403.600,00
c)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	175.000.000,00	67.850.000,00	38,77	59.050.000,00
d)	Retribusi Pelayanan pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
B	Retribusi Jasa Usaha	3.033.825.000,00	2.366.087.323,00	77,99	2.844.847.524,00
a)	Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah Bangunan)	190.400.000,00	48.175.000,00	25,30	42.985.000,00
b)	Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.203.060.000,00	1.651.967.000,00	137,31	1.676.479.500,00
c)	Retribusi Terminal	90.000.000,00	50.339.000,00	55,93	46.470.000,00
d)	Retribusi Tempat Khusus Parkir	47.665.000,00	0,00	0,00	0,00
e)	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	652.500.000,00	54.000.000,00	8,28	466.426.000,00
f)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.200.000,00	60.244.000,00	24,08	66.625.000,00
g)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	600.000.000,00	501.362.323,00	83,56	545.862.024,00
C	Retribusi Perijinan Tertentu	190.000.000,00	89.033.000,00	46,86	26.888.400,00
a)	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	190.000.000,00	89.033.000,00	46,86	26.888.400,00
	Jumlah	6.206.325.000,00	5.160.246.873,00	83,14	4.275.600.524,00

Jika dibandingkan dengan penerimaan Retribusi tahun 2022 pendapatan Retribusi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 20,69%, yang disebabkan oleh beberapa sumber retribusi dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasinya naik 106,12% karena penerimaan Non Kapitasi pada FKTP dari tahun sebelumnya;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan naik 2,90% karena meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi tersebut;
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum naik 14,90% karena proses penagihan yang dilakukan secara maksimal;
- 4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah Bangunan naik 12,07% karena di tahun 2023 terdapat penerimaan dari tahun sebelumnya atas pembayaran sewa rumah Dinas;
- 5) Retribusi Pelayanan Pasar-Kios mengalami penurunan sebesar 1,46% disebabkan di tahun 2022 terdapat potensi penerimaan retribusi sewa kios pada Pasar Tahuna mall yang seharusnya akan menjadi potensi di 2023 namun diterima pada akhir tahun 2022;
- 6) Retribusi Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan bus Umum naik 8,33%;
- 7) Retribusi pelayanan kepelabuhannya yang mengalami penurunan sebesar 88,42% disebabkan pengelolaan pelabuhan penyeberangan Pananaru dan pelabuhan penyeberangan Marore sudah tidak lagi dikelola Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe tetapi langsung di kelola oleh Kementerian Perhubungan melalui BPTD

Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat Kepala BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara nomor UM.002/18/7/BPTD-XXII/2022 tanggal 18 September 2022;

- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga turun 9,58%;
- 9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah turun 8,15%; dan
- 10) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan naik 231,12% karena pada tahun 2022 penerimaan tidak ditetapkan dalam ABPD karena belum diterimanya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Nomor : 973/1030/SJ, Nomor : SE-1/MK.07/2022, Nomor : 06/SE/M/2022, Nomor : 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung.

Adapun Rincian Retribusi Daerah per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah per OPD

JENIS RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	%	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)	
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.655.000.000,00	2.503.086.200,00	94,28	1.214.411.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	9.635.000,00
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	190.000.000,00	89.033.000,00	46,86	26.888.400,00
3	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	134.190.350,00	89,46	130.403.600,00
4	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	175.000.000,00	67.850.000,00	38,77	59.050.000,00
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah Bangunan)	90.200.000,00	18.025.000,00	19,98	8.550.000,00
		Retribusi Terminal	90.000.000,00	50.339.000,00	55,93	46.470.000,00
		Retribusi Tempat Parkir Khusus	47.665.000,00		0,00	0,00
		Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	652.500.000,00	54.000.000,00	8,28	466.426.000,00
6	Dinas Pariwisata Daerah	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.200.000,00	60.244.000,00	24,08	66.625.000,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	Retribusi Pelayanan pemeriksaan dan/ atau Pengujian Alat Pemedam Kebakaran	2.500.000,00		0,00	0,00
		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.203.060.000,00	1.651.967.000,00	137,31	1.676.479.500,00
7	Sekretariat Daerah	Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa Tanah dan Bangunan)	90.200.000,00	30.150.000,00	33,43	24.800.000,00
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	600.000.000,00	501.362.323,00	83,56	545.862.024,00
	Jumlah		6.206.325.000,00	5.160.246.873,00	83,14	4.275.600.524,00

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA

Secara umum realisasi pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan atas bagian laba penyertaan modal PT. Bank SulutGo pada tahun 2023 mencapai

LKPD 2023 – Audited

100% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp2.085.713.890,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yakni sebesar Rp.1.409.861.482,00, terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp675.852.408,00 atau naik 47,94%.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	2.085.713.890,00	2.085.713.890,00	100,00	1.409.861.482,00

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA

Lain-lain PAD yang Sah merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Penerimaan Hasil Sewa BMD, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain, Pendapatan BLUD, Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya serta Dana Kapitasi. Selain itu Lain-lain PAD ini adalah tempat menampung setoran pendapatan yang belum mempunyai aturan tetap baik berupa peraturan daerah atau peraturan bupati. Adapun realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Lain-Lain PAD yang Sah – LRA	47.787.188.395,00	54.248.873.886,76	113,52	45.909.808.530,54

Secara umum realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp54.248.873.886,76 atau 113,52% dari anggaran sebesar Rp47.787.188.395,00. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, maka pada tahun ini 2023 realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp8.339.065.356,22 atau naik 18,16% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12 Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang sah

LAIN-LAIN PAD YANG SAH		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
a)	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan (Hasil Sewa BMD)	775.788.390,00	688.673.847,00	88,77	0,00
b)	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	153.090.000,00	150.000.000,00	97,98	59.007.000,00
c)	Penerimaan Jasa Giro	1.508.415.703,00	1.737.874.495,89	115,21	2.079.649.773,24
e)	Pendapatan Bunga	1.749.080,00	107.512.875,91	6146,82	2.195.150.328,58
g)	Penerimaan atas TGR		3.200.000,00	100,00	0,00
h)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain	932.398.242,00	3.062.694.471,96	328,47	2.625.524.826,72
i)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	58.442.995,00	58.442.995,00	100,00	8.859.500,00
j)	Denda Pajak Daerah (PBBP2)	11.219.774,00	20.027.784,00	178,50	10.785.203,00
k)	Pendapatan dari Pengembalian	34.092.211,00	233.829.117,00	685,87	0,00
l)	Pendapatan BLUD	44.311.992.000,00	48.186.618.300,00	108,74	38.930.831.899,00
	Jumlah	47.787.188.395,00	64.248.873.886,76	113,52	45.909.808.530,54

5.1.1.2 Pendapatan Transfer- LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah mencapai 99,81% dari anggaran sebesar Rp796.206.347.863,00 dan terealisasi sebesar Rp794.797.208.684,00, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022

JENIS PENDAPATAN TRANSFER		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
a	Pendapatan Transfer Pusat	770.639.851.496,00	768.985.797.009,00	99,79	782.468.841.851,00
b	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.566.496.367,00	25.811.411.675,00	100,96	26.589.861.392,00
	Jumlah	796.206.347.863,00	794.797.208.684,00	99,82	809.058.703.243,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pusat

Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat di tahun 2023 sebesar Rp768.985.797.009,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 yaitu sebesar Rp782.468.841.851,00, terdapat penurunan penerimaan sebesar Rp13.568.013.550,00 atau turun 1,72%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

	JENIS PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
a	Dana Bagi Hasil (DBH)	15.637.790.207,00	15.637.790.207,00	100,00	35.306.674.073,00
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	511.447.930.000,00	515.081.173.000,00	100,71	492.162.712.900,00
c	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	44.658.230.289,00	43.045.289.060,00	96,39	95.989.379.917,00
d	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	94.539.365.000,00	87.730.136.840,00	92,80	52.176.995.071,00
e	Dana Insentif Daerah (DID)				6.168.774.000,00
e	Dana Desa	104.356.536.000,00	107.491.407.902,00	103,00	100.664.305.890,00
	Jumlah	770.639.851.496,00	768.985.797.009,00	99,79	782.468.841.851,00

Pendapatan transfer pusat menurun disebabkan oleh terdapat penurunan Dana Bagi Hasil (Pusat) sebesar Rp19.668.883.866,00 atau turun 55,71% dan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp52.944.090.857,00 atau turun 55,16% jika dibandingkan dengan tahun 2022.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (Pusat)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp15.637.790.207,00 atau 100,00% dari anggaran. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp35.306.674.073,00, terdapat penurunan sebesar Rp19.668.883.866,00 atau turun sebesar 55,71%. Adapun rincian dari Dana Bagi Hasil yang diterima di Tahun 2023 dan Tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.15 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil (Pusat)

	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	(%)	REALISASI 2022 (Rp)
a)	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	947.576.000,00	1.526.886.465,00	161,14	6.442.653.418,00
b)	DBH PPh Pasal 21	4.282.543.000,00	4.820.076.047,00	112,55	4.392.979.754,00
c)	DBH PPh Pasal 25 dan 29 WP orang Pribadi Dalam Negeri	0,00	0,00		554.466.006,00
d)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	513.206.000,00	653.855.924,00	127,41	2.407.457.534,00
e)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara-Landrent	0,00	0,00		0,00
f)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara-Royalty	5.232.060.207,00	3.762.715.594,00	71,92	19.549.900.361,00
g)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.863.000,00	5.960.966,00	101,67	906.000,00
h)	DBH Sumber Daya Alam Perikanan	4.656.542.000,00	4.868.295.211,00	104,55	1.958.311.000,00
	Jumlah	15.637.790.207,00	15.637.790.207,00	100,00	35.306.674.073,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pusat di Tahun 2023 yang telah diterima sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp15.637.790.207,00, termasuk di dalamnya dana *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp2.796.317.207,00 yang merupakan Dana dalam bentuk non tunai. *Treasury Deposit Facility* dibentuk dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam rangka penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam Bentuk Non Tunai yang dicairkan pada tahun 2023.

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan tanggal 10 Mei 2023 tentang rincian Dana TDF dan Remunerasi, terdapat penambahan remunerasi sebesar Rp31.628.405,00 sehingga nilai remunerasi menjadi Rp32.306.597,00. Nilai tersebut dicatat pada pendapatan bunga.

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 mencapai Rp515.081.173.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana penerimaan DAU yaitu sebesar Rp492.162.712.900,00 dari anggaran sebesar Rp511.447.930.000,00 maka pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp22.918.460.100,00 atau naik 4,66 % dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.16 Rincian Dana DAU Tahun 2023 dan 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	DAU	477.973.142.000,00	481.606.385.000,00	100,76	492.162.712.900,00
2	DAU Tambahan dukungan Pendanaan Kelurahan	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	100,00	-
3	DAU Tambahan dukungan Pendanaan atas Kebijakan Pengajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	29.074.788.000,00	29.074.788.000,00	100,00	-
	JUMLAH	511.447.930.000,00	515.081.173.000,00	100,71	492.162.712.900,00

Realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2023 sebesar Rp515.081.173.000,00 terdiri dari realisasi DAU yang masuk ke Kas Daerah sebesar Rp502.885.980.168,00 ditambah dengan potongan terhadap pembayaran bunga pinjaman atas Dana PEN sebesar Rp12.110.224.124,00 ditambah dengan potongan sisa DAK Non Fisik 2021 dan 2022 sebesar Rp84.968.708,00.

Potongan terhadap bunga pinjaman atas dana PEN sebesar Rp12.110.224.124,00 didasari oleh KMK Nomor 20/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Bunga dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 karena telah diakui pada belanja bunga atas bunga pinjaman dana PEN.

Potongan sisa dana DAK Non Fisik sebesar Rp84.968.708,00 didasari oleh KMK Nomor 29/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun ANggaran 2023 atas Daerah yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022. Nilai tersebut terdiri dari sisa Dana Adminduk TA 2021 sebesar Rp4.688,00 dan Sisa Dana Pariwisata TA 2021 dan 2022 sebesar Rp84.964.020,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 diterima sebesar Rp43.045.289.060,00 dari anggaran sebesar Rp44.658.230.289,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp95.989.379.917,00,00, terdapat penurunan sebesar Rp52.944.090.857,00 atau turun 55,16% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 dan 2022

NO	JENIS DAK FISIK	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler PAUD	512.983.000,00	512.936.550,00	99,99	424.212.800,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler SD	1.263.307.000,00	1.164.936.300,00	92,21	9.798.340.000,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler SMP	1.761.899.000,00	1.761.884.000,00	100,00	3.713.881.000,00
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan- Reguler-Perpustakaan Daerah		0,00	0,00	265.453.170,00
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian		0,00	0,00	3.089.913.183,00
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penugasan-Penurunan AKI-AKB		0,00	0,00	4.265.396.941,00
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	9.328.114.347,00	9.188.075.850,00	98,50	1.083.502.331,00
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Pengendalian Penyakit	794.208.242,00	695.000.000,00	87,51	201.099.998,00
11	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB		0,00	0,00	1.880.472.031,00
13	DAK Fisik Bidang Pertanian Penugasan- Pembangunan/Renovasi sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		0,00	0,00	3.153.121.672,00
14	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Penugasan		0,00	0,00	4.647.514.903,00
15	DAK Fisik Bidang Jalan - Reguler - Jalan	12.338.249.000,00	12.338.247.900,00	100,00	5.823.012.550,00
16	DAK Fisik Bidang Jalan - Penugasan - Jalan		0,00	0,00	6.671.250.395,00
17	DAK Fisik Bidang Air Minum - Reguler		0,00	0,00	4.262.400.000,00
18	DAK Fisik Bidang Sanitasi - Reguler		0,00	0,00	5.275.000.000,00
19	DAK Fisik Bidang Bidang Kesehatan dan KB Reguler- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	17.937.292.700,00	16.782.808.460,00	93,56	41.434.808.943,00
20	DAK Fisik Bidang Transportasi Pedesaan -Reguler	722.177.000,00	601.400.000,00	83,28	0,00
	Jumlah	44.658.230.289,00	43.045.289.060,00	96,39	95.989.379.917,00

Penurunan realisasi DAK Fisik TA 2023 disebabkan oleh usulan rencana kegiatan yang diajukan oleh OPD teknis belum semua dapat diterima oleh Kementerian teknis terkait.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Non Fisik Tahun 2023 adalah sebesar Rp87.730.136.840,00 dari anggaran sebesar Rp94.539.365.000,00. Jika dibandingkan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2022 dimana Tahun 2022 diterima sebesar Rp52.176.995.071,00 mengalami peningkatan sebesar Rp35.553.141.769,00,00 atau naik 68,14% karena pada tahun 2023 terdapat Penerimaan DAK dari dana BOS. Sedangkan pada tahun 2022 dana BOS tersebut diklasifikasikan sebagai pendapatan lain-lain. Di samping itu, pada tahun 2023 terdapat DAK non Fisik untuk kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Adapun rincian DAK Non Fisik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.18 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023

NO	JENIS DAK	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	DAK Non Fisik - BOS Reguler	22.471.560.000,00	21.720.901.550,00	96,66	0,00
2	DAK Non Fisik - BOS Kinerja	2.455.000.000,00	2.455.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik TPG PNSD	37.110.919.000,00	37.110.916.000,00	100,00	35.316.552.335,00
4	DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	1.056.500.000,00	1.056.500.000,00	100,00	0,00
5	DAK Non Fisik TKG PNSD	6.183.143.000,00	6.183.143.000,00	100,00	5.945.722.820,00
6	DAK Non Fisik BOB PAUD	1.998.000.000,00	1.951.993.250,00	97,70	0,00
7	DAK Non Fisik BOB Pendidikan Kesetaraan	791.890.000,00	791.890.000,00	100,00	0,00
8	DAK Non Fisik BOBKB-BOK	16.614.086.000,00	11.181.825.090,00	67,30	6.631.240.016,00
9	DAK Non Fisik BOBKB-BOKKB	4.518.292.000,00	3.946.513.200,00	87,35	3.191.269.180,00
10	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	532.100.000,00	531.622.750,00	99,91	317.443.120,00
11	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Pelindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	100,00	774.767.600,00
12	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	369.075.000,00	361.032.000,00	97,82	0,00
	Jumlah	94.539.365.000,00	87.730.136.840,00	92,80	52.176.995.071,00

5.1.1.2.1.5 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja.

Tahun 2023 Pemerintah Daerah tidak menerima Dana Insentif Daerah (DID) tetapi pada Tahun 2022 menerima sebesar Rp6.168.774.000,00.

5.1.1.2.1.6 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa terbaru dalam Permenkeu Nomor 201/PMK.07/2022. Artinya pada Tahun 2023 Desa masih mendapatkan Dana Desa yang bisa dipergunakan untuk pembangunan Desa dan lain-lain sesuai aturan yang ada.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dan besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat

kesulitan geografis. Adapun Realisasi dan Anggaran dari Dana Desa di Tahun 2023 dan 2022 adalah :

Tabel 5.19 Realisasi Penerimaan Dana Desa Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

JENIS DANA	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Dana Desa	104.356.536.000,00	107.491.407.902,00	103,00	100.664.305.890,00

Realisasi Penerimaan Dana Desa pada Tahun 2023 mencapai 103,00%, dan jika dibandingkan dengan penerimaan Dana Desa Tahun 2022 maka penerimaan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp6.827.102.012,00 atau naik 6,78%.

Capaian realisasi Dana Desa di Tahun 2023 lebih dari anggaran yang ditetapkan karena sesuai PMK 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas PMK 201/PMK/O7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat bentuk apresiasi/penghargaan pemerintah pusat atas kinerja pemerintah 29 desa.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp25.811.411.675,00 dari anggaran sebesar Rp25.566.496.367,00 dan jika dibandingkan Realisasi Tahun 2022 dimana diterima sebesar Rp26.589.861.392,00 maka penerimaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp778.449.717 atau turun 3,02%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023

JENIS PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.566.496.367,00	25.811.411.675,00	100,96	26.589.861.392,00

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil (Antar Daerah)

Pencapaian target Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dalam Tahun 2023 mencapai 100,96 % dari anggaran sebesar Rp25.566.496.367,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp26.589.861.392,00 maka capaian Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp778.449.717,00 atau turun sebesar 2,93% dimana penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp25.811.411.675,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.21 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023

	JENIS PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	(%)	REALISASI 2022 (Rp)
a)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.774.107.245,00	3.856.850.962,00	102,19	3.940.214.208,00
b)	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.232.523.421,00	1.717.789.485,00	76,94	2.165.884.595,00
c)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.528.943.235,00	12.824.639.523,00	111,24	12.789.616.246,00
d)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	115.336.514,00	143.149.392,00	124,11	131.647.805,00
e)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.915.585.952,00	7.268.982.313,00	91,83	7.562.498.538,00
	Jumlah	25.566.496.367,00	25.811.411.675,00	100,96	26.589.861.392,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LRA	9.139.878.838,00	8.720.045.737,00	95,41	28.200.743.009,00

Pada Tahun 2023 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp8.720.045.737,00 sedangkan Tahun 2022 terdapat realisasi sebesar Rp28.200.743.009,00. Pencapaian realisasi di Tahun 2023 adalah mencapai 95,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.139.878.838,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terjadi penurunan yang signifikan karena terdapat pemindahan penganggaran Penerimaan Dana BOS pada Tahun 2023 ke Pendapatan DAK Non Fisik.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Hibah tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Pusat melalui Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk Program Air Bersih Pedesaan. Pada Tahun 2022, Pemerintah Daerah tidak menerima pendapatan Hibah.

Tabel 5.23 Pendapatan Hibah

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
a)	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00

5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya di tahun 2023 hanya berisi penerimaan dari Dana Kapitasi JKN yang terealisasi sebesar Rp8.220.045.737,00 dari anggaran sebesar Rp8.639.878.838,00 atau 95,14%, sedangkan pendapatan Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp28.200.743.009,00. Terdapat penurunan sebesar Rp19.480.697.272,00 atau 69,08%.

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2023

	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
a)	Pendapatan Lainnya	8.639.878.838,00	8.220.045.737,00	95,14	28.200.743.009,00

Adapun rincian Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah :

Tabel 5.25 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2023

NO	FKTP	REALISASI TAHUN 2023
1	Puskesmas Tahuna Timur	858.122.305
2	Puskesmas Manganitu	838.877.059
3	Puskesmas Tamako	686.417.253
4	Puskesmas Dagho	180.500.142
5	Puskesmas Manalu	400.111.156
6	Puskesmas Kuma	648.897.938
7	Puskesmas Enemawira	978.937.071
8	Puskesmas Kalasuge	316.821.628
9	Puskesmas Kendahe	384.067.022
10	Puskesmas Lapango	741.525.305
11	Puskesmas Marore	112.410.035
12	Puskesmas Nusa	242.937.195
13	Puskesmas Kahakitang	340.747.293
14	Puskesmas Pintareng	155.632.611
15	Puskesmas Salurang	201.630.233
16	Puskesmas Tahuna Barat	397.952.702
17	Puskesmas Tahuna	734.458.789
18	RS Liung Paduli	-
	Jumlah	8.220.045.737,00

5.1.2 Belanja

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 belanja disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi terdiri dari:
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa;
 - Belanja Bunga;
 - Belanja Subsidi;
 - Belanja Hibah;
 - Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal terdiri dari:
 - Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan;
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tak Terduga
4. Belanja Transfer.

Belanja Daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah Daerah, di samping pos pendapatan pemerintahan daerah. Semakin besar belanja daerah maka akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Total Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahun 2023 adalah sebesar Rp902.173.749.368,00, jika dibandingkan dengan belanja Tahun 2022 sebesar Rp1.103.829.327.804,00 dimana belanja Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp201.655.578.436,00 atau turun 18,27%. Total Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
BELANJA	958.173.361.012,00	902.173.749.368,00	94,16	1.103.829.327.804,00

Berdasarkan klasifikasi jenis belanja, anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing jenis belanja, digambarkan pada diagram di bawah ini:

Diagram 5.2 Komposisi Klasifikasi Realisasi Belanja Tahun 2023



Kontribusi masing-masing jenis belanja terhadap total Belanja dan Transfer Daerah didominasi oleh Belanja Operasi yang mencapai 72,08%, kemudian Belanja Modal sebesar 9,89% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,04% serta Belanja Transfer sebesar 17,99%.

Realisasi belanja dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek atau belanja yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan.

Belanja Operasi diklasifikasikan menjadi :

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa;
- Belanja Bunga;
- Belanja Subsidi;
- Belanja Hibah; dan
- Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp650.326.519.655,00 dan jika dibandingkan dengan Belanja Operasi Tahun 2022 yaitu sebesar Rp677.097.695.570,00 menunjukkan penurunan sebesar Rp26.771.175.915,00 atau turun 3,95%. Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.27 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023

No	JENIS BELANJA OPERASI	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	(%)	REALISASI 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	403.158.757.475,00	374.089.576.004,00	92,79	386.995.607.862,00
2	Belanja Barang dan Jasa	270.111.339.319,00	249.960.502.825,00	92,54	267.487.163.223,00
3	Belanja Bunga	12.110.224.124,00	12.110.224.124,00	100,00	6.044.722.252,00
4	Belanja Hibah	15.208.149.358,00	13.865.833.702,00	91,17	11.562.306.100,00
5	Belanja Bantuan Sosial	326.500.000,00	300.383.000,00	92,00	5.007.896.133,00
	Jumlah Belanja Operasi	700.914.970.276,00	650.326.519.655,00	92,78	677.097.695.570,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Adapun realisasi dari Belanja Pegawai di tahun 2023 adalah :

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

	PERUBAHAN APBD TA 2023 (PERDA NO 6 TAHUN 2023) (Rp)	PERGESERAN PERUBAHAN APBD (PERBUB NO 22 TAHUN 2023) (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	403.158.757.475,00	403.158.757.475,00	374.089.576.004,00	92,79	386.995.607.862,00

Realisasi Belanja Pegawai pada LRA sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp374.089.576.004,00 atau mencapai 92,79% dari anggaran yang ditetapkan, dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp386.995.607.862,00 maka realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.906.031.858,00 atau turun 3,33%. Hal ini karena pada tahun 2023 terdapat pembayaran atas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2023 dimana SK Pengangkatan baru diterima pada tanggal 20 Mei 2024, dan juga terdapat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh BLUD RSUD Liun kendage Tahuna melalui belanja lembur yang menyebabkan realisasi hanya mencapai 89,68%. Adapun Realisasi dan Anggaran per Objek Belanja Pegawai terdiri dari :

Tabel 5.29 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	JENIS BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	257.205.930.738,00	237.356.268.882,00	92,28	234.534.218.158,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	82.689.475.943,00	74.891.947.928,00	90,57	89.002.391.637,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.268.370.720,00	48.952.548.700,00	97,38	50.630.938.854,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.696.117.434,00	11.671.482.358,00	99,79	11.671.438.925,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	272.000,00	0,00	0,00	38.840.188,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.879.996,00	100,00	350.640.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	787.710.640,00	706.448.140,00	89,68	767.140.100,00
	Jumlah	403.158.757.475,00	374.089.576.004,00	92,79	386.995.607.862,00

Rincian Belanja Pegawai per OPD adalah :

Tabel 5.30 Rincian Belanja Pegawai Per OPD Tahun 2023

NO	NAMA OPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Daerah	154.247.113.018,00	145.346.069.353,00	94,23	165.118.234.376,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	77.867.417.735,00	77.281.016.307,00	99,25	71.589.526.292,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	6.096.252.096,00	5.977.788.987,00	98,06	5.628.840.151,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah	2.532.849.544,00	2.517.489.007,00	99,39	2.598.247.830,00
5	Badan Penanggulangan Bencana	2.247.414.796,00	2.147.091.898,00	95,54	2.374.290.238,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.358.420.639,00	2.147.390.455,00	91,05	2.395.025.322,00
7	Dinas Sosial	1.923.174.202,00	1.860.153.601,00	96,72	1.979.654.921,00
8	Dinas Tenaga Kerja	1.977.630.441,00	1.817.214.363,00	91,89	1.906.709.494,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.895.308.726,00	1.893.077.973,00	99,88	1.850.035.139,00
10	Dinas Pangan	2.047.230.827,00	2.029.749.207,00	99,15	1.956.155.960,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.497.522.523,00	2.489.080.502,00	99,66	2.646.260.051,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.931.522.718,00	4.878.558.617,00	98,93	4.934.084.233,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.178.071.075,00	2.054.730.118,00	94,34	2.193.077.503,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.796.576.434,00	2.768.535.408,00	99,00	2.878.940.130,00
15	Dinas Perhubungan	3.642.713.568,00	3.327.525.778,00	91,35	3.811.518.277,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.182.028.223,00	2.007.997.303,00	92,02	2.320.222.443,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.716.194.133,00	1.630.638.819,00	95,01	1.561.444.719,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.159.402.342,00	2.058.187.671,00	95,31	2.248.935.988,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.476.598.722,00	1.413.055.501,00	95,70	1.692.950.195,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.727.927.776,00	1.719.275.345,00	99,50	1.857.531.511,00
21	Dinas Perikanan Daerah	2.447.650.206,00	2.415.058.297,00	98,67	2.546.260.173,00
22	Dinas Pariwisata Daerah	1.613.917.913,00	1.589.652.917,00	98,50	1.918.524.612,00
23	Dinas Pertanian Daerah	6.608.433.146,00	6.476.558.840,00	98,00	6.515.108.951,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.400.591.207,00	2.379.862.043,00	99,14	2.494.922.385,00
25	Sekretariat Daerah	13.873.067.388,00	13.252.455.886,00	95,53	13.553.305.399,00
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14.660.286.671,00	14.573.861.990,00	99,41	14.481.562.420,00
27	Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan	3.139.103.036,00	2.981.349.575,00	94,97	2.964.862.861,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.710.831.900,00	4.699.987.154,00	99,77	4.698.472.515,00
29	Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	32.118.700.691,00	16.147.357.107,00	50,27	11.515.644.092,00
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.838.551.996,00	1.827.174.022,00	99,38	1.743.357.441,00
31	Inspektorat	6.643.076.085,00	6.590.141.771,00	99,20	6.260.499.859,00
32	Kecamatan Tabukan Utara	2.259.361.587,00	2.182.180.721,00	96,58	2.196.387.721,00
33	Kecamatan Tabukan Tengah	1.952.722.609,00	1.928.102.258,00	98,74	2.076.523.521,00
34	Kecamatan Tamako	2.092.648.106,00	2.075.877.934,00	99,20	2.175.356.965,00
35	Kecamatan Manganitu	1.763.530.662,00	1.742.373.753,00	98,80	1.690.405.594,00
36	Kecamatan Tahuna	4.850.653.906,00	4.681.968.504,00	96,52	5.019.338.967,00
37	Kecamatan Manganitu Selatan	1.185.301.857,00	1.154.917.551,00	97,44	1.142.714.103,00
38	Kecamatan Tabukan Selatan	1.434.814.325,00	1.397.243.729,00	97,38	1.547.313.342,00
39	Kecamatan Kendahe	1.343.355.960,00	1.333.026.907,00	99,23	1.419.013.053,00
40	Kecamatan Tatoareng	1.398.979.634,00	1.301.914.951,00	93,06	1.356.007.975,00
41	Kecamatan Tabukan Selatan Tengah	1.488.294.063,00	1.474.084.162,00	99,05	1.455.094.184,00
42	Kecamatan Nusa Tabukan	1.196.304.950,00	1.169.378.458,00	97,75	1.148.874.468,00
43	Kecamatan Tahuna Timur	4.601.099.059,00	4.572.298.169,00	99,37	4.706.108.942,00
44	Kecamatan Tahuna Barat	3.629.498.799,00	3.580.317.147,00	98,64	3.563.914.875,00
45	Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara	1.735.413.506,00	1.729.949.142,00	99,69	1.643.726.905,00
46	Kecamatan Kepulauan Marore	1.320.983.028,00	1.318.203.259,00	99,79	1.214.757.163,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Politik Daerah	2.350.215.647,00	2.149.653.544,00	91,47	2.405.864.603,00
	JUMLAH	403.158.757.475,00	374.089.576.004,00	92,79	386.995.607.862,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp249.960.502.825,00 atau 92,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp270.111.339.319,00. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2022 sebesar Rp267.487.163.223,00 terdapat penurunan sebesar Rp17.526.660.398,00 atau 6,55%. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.31 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
A Belanja Barang	47.890.761.953,00	42.878.498.593,00	89,53	68.270.372.735,00
a) Belanja Bahan Pakai Habis	47.890.761.953,00	42.878.498.593,00	89,53	68.270.372.735,00
B Belanja Jasa	102.921.584.830,00	93.092.374.892,00	90,45	94.067.020.853,00
a) Belanja Jasa Kantor	68.161.031.143,00	62.325.441.003,00	91,44	58.898.564.573,00
b) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	27.665.727.734,00	24.792.911.821,00	89,62	26.443.494.453,00
c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.644.870.000,00	1.341.110.000,00	81,53	1.369.655.500,00
d) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.023.716.500,00	1.643.349.730,00	81,20	407.299.098,00
e) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00		11.500.000,00
f) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.169.981.000,00	1.155.158.580,00	98,73	5.836.131.131,00
g) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	812.038.993,00	506.093.758,00	62,32	299.700.000,00
h) Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	135.250.000,00	86.750.000,00	64,14	114.201.398,00
g) Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan Pelatihan	1.308.969.460,00	1.241.560.000,00	94,85	686.474.700,00
C Belanja Pemeliharaan	11.409.773.323,00	10.024.765.557,00	87,86	4.088.203.966,00
a) Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00		9.842.500,00
b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.725.867.522,00	1.358.933.205,00	78,74	1.656.071.857,00
c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.904.229.500,00	6.438.184.000,00	93,25	1.184.885.990,00
d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.579.676.301,00	2.028.236.852,00	78,62	1.237.403.619,00
d) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	199.411.500,00	99,71	-
D Belanja Perjalanan Dinas	46.821.453.075,00	40.394.692.641,00	86,27	37.760.829.576,00
a) Belanja Perjalanan Dinas	46.821.453.075,00	40.394.692.641,00	86,27	37.760.829.576,00
E Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.172.680.000,00	1.932.130.000,00	88,93	2.238.400.000,00
a) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	2.172.680.000,00	1.932.130.000,00	88,93	2.238.400.000,00
F Belanja Barang Dana BOSP	13.711.461.141,00	13.567.630.543,00	98,95	14.237.311.509,00
a) Belanja Barang Dana BOSP	13.711.461.141,00	13.567.630.543,00	98,95	14.237.311.509,00
G Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.183.624.997,00	48.070.410.599,00	106,39	46.825.024.584,00
a) Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.183.624.997,00	48.070.410.599,00	106,39	46.825.024.584,00
Jumlah	270.111.339.319,00	249.960.502.825,00	92,54	267.487.163.223,00

Dari keseluruhan realisasi Belanja Barang dan Jasa secara persentase pencapaian, Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi memiliki realisasi terendah sebesar 62,32% hal ini adanya efisiensi anggaran. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna terdapat pelampauan anggaran dari anggaran yang ditetapkan yakni mencapai 106,39%, namun pelampauan tersebut sangat dimungkinkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah pada BAB VII Pasal 74 dimana BLUD diberikan fleksibilitas dalam anggaran dan hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangehe Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangehe Nomor 28 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Liun Kendage Tahuna Kabupaten Sangehe Pasal 76 ayat (2) mengenai fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD, demikian juga dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD Tahun 2020 huruf E Nomor 3 tentang ambang batas realisasi belanja dalam RBA ditetapkan pada saat penyusunan RSB sebesar 10%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD :

Tabel 5.32 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa

NO	NAMA OPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Daerah	42.953.933.874,00	38.784.055.601,00	90,29	24.432.836.916,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	114.293.394.420,00	106.186.041.968,00	92,91	103.631.690.265,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Da	14.167.214.033,00	11.710.495.512,00	82,66	12.955.295.356,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah	528.806.618,00	523.180.750,00	98,94	536.235.200,00
5	Badan Penanggulangan Bencana	522.716.603,00	479.245.397,00	91,68	590.231.242,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.133.754.437,00	2.980.559.271,00	95,11	2.924.256.901,00
7	Dinas Sosial	1.237.047.245,00	1.185.662.528,00	95,85	1.575.071.806,00
8	Dinas Tenaga Kerja	974.606.746,00	947.829.387,00	97,25	1.455.876.404,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	882.656.804,00	779.730.101,00	88,34	579.962.247,00
10	Dinas Pangan	293.305.349,00	280.643.184,00	95,68	1.017.159.050,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.711.399.021,00	2.596.189.164,00	95,75	2.470.627.250,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.227.168.516,00	2.175.374.279,00	97,67	2.142.587.201,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.710.344.693,00	2.531.598.459,00	93,41	2.766.519.679,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Be	5.078.149.647,00	4.375.769.401,00	86,17	3.619.289.728,00
15	Dinas Perhubungan	2.571.695.869,00	2.112.991.619,00	82,16	1.919.177.361,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.392.787.883,00	2.378.060.394,00	99,38	2.765.639.207,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	419.544.786,00	410.601.661,00	97,87	548.830.822,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad	1.019.010.220,00	1.007.707.874,00	98,89	997.756.721,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.967.761.800,00	2.409.353.642,00	81,18	2.315.282.515,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	508.405.138,00	491.628.107,00	96,70	582.206.021,00
21	Dinas Perikanan Daerah	652.780.444,00	625.162.739,00	95,77	5.475.994.804,00
22	Dinas Pariwisata Daerah	1.223.921.951,00	1.190.167.212,00	97,24	1.342.086.413,00
23	Dinas Pertanian Daerah	1.071.443.765,00	1.057.373.167,00	98,69	24.592.043.566,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	973.154.936,00	960.996.944,00	98,75	2.228.680.299,00
25	Sekretariat Daerah	20.128.605.762,00	19.164.432.100,00	95,21	21.951.933.858,00
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17.791.590.486,00	17.482.243.517,00	98,26	18.046.021.989,00
27	Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Penge	1.386.722.717,00	1.292.432.233,00	93,20	1.342.216.003,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.988.841.518,00	4.857.458.214,00	97,37	5.373.987.546,00
29	Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelat	2.124.798.308,00	1.301.578.874,00	61,26	2.741.849.008,00
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	512.934.865,00	508.189.090,00	99,07	537.227.744,00
31	Inspektorat	2.848.497.669,00	2.527.146.897,00	88,72	3.177.860.008,00
32	Kecamatan Tabukan Utara	229.934.014,00	219.794.000,00	95,59	225.990.950,00
33	Kecamatan Tabukan Tengah	343.325.867,00	336.371.335,00	97,97	217.644.873,00
34	Kecamatan Tamako	391.994.418,00	381.851.643,00	97,41	282.105.000,00
35	Kecamatan Manganitu	315.786.402,00	315.022.500,00	99,76	288.949.416,00
36	Kecamatan Tahuna	3.358.636.594,00	3.309.855.957,00	98,55	2.054.538.593,00
37	Kecamatan Manganitu Selatan	215.399.936,00	213.093.393,00	98,93	224.422.932,00
38	Kecamatan Tabukan Selatan	353.728.218,00	322.664.744,00	91,22	232.817.794,00
39	Kecamatan Kendahe	232.351.553,00	229.784.500,00	98,90	242.021.309,00
40	Kecamatan Tatoareng	206.063.439,00	204.870.300,00	99,42	240.153.345,00
41	Kecamatan Tabukan Selatan Tengah	236.732.163,00	219.855.300,00	92,87	184.183.147,00
42	Kecamatan Nusa Tabukan	268.513.637,00	268.305.200,00	99,92	183.573.600,00
43	Kecamatan Tahuna Timur	4.244.093.977,00	4.204.699.097,00	99,07	3.230.754.008,00
44	Kecamatan Tahuna Barat	1.769.045.678,00	1.745.212.745,00	98,65	950.543.394,00
45	Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara	218.241.292,00	212.919.524,00	97,56	220.395.019,00
46	Kecamatan Kepulauan Marore	192.261.173,00	191.877.888,00	99,80	204.404.816,00
47	Badan Kesatuan Bangsa Politik Daerah	2.238.234.835,00	2.170.425.413,00	96,97	1.868.231.877,00
	JUMLAH	270.111.339.319,00	249.960.502.825,00	92,54	267.487.163.223,00

Pada Anggaran Belanja Barang dan Jasa selain Belanja Barang dan Jasa BLUD juga terdapat Belanja Barang dan Jasa BOSP yang terealisasi sebesar Rp13.567.630.543,00 yang rinciannya terdapat pada lampiran.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah belanja untuk pembayaran Bunga Pinjaman Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD- Jangka Pendek yang terealisasi sebesar Rp12.110.224.124,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan yang bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.044.722.252,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp6.065.501.872,00 atau naik 50,09% yang jelasnya sebagai berikut.

Tabel. 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Belanja Bunga	12.110.224.124,00	12.110.224.124,00	100,00	6.044.722.252,00

Realisasi dari Belanja Bunga tersebut dilakukan dengan cara pemotongan langsung Dana DAU berdasarkan KMK RI No.20/KM.7 Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.34 Rincian Potongan DAU untuk Pembayaran Bunga PEN

NO	PERIODE PEMBEYARAN	TANGGAL JATUH TEMPOH	PERIODE PENYALURAN	JUMLAH POTONGAN	TANGGAL PEMOTONGAN
1	11	13 Desember 2022	Januari 2023	1.028.539.583,00	2 Januari 2023
2	12	31 Januari 2023	Februari 2023	1.028.539.583,00	31 Januari 2023
3	13	28 Februari 2023	Maret 2023	929.003.495,00	28 Februari 2023
4	14	31 Maret 2023	April 2023	1.028.539.583,00	31 Maret 2023
5	15	30 April 2023	Mei 2023	995.360.887,00	28 april 2023
6	16	31 Mei 2023	Juni 2023	1.028.539.583,00	31 Mei 29023
7	17	30 Juni 2023	Juli 2023	995.360.887,00	27 Juni 2023
8	18	31 Juli 2023	Agustus 2023	1.028.539.583,00	31 Juli 2023
9	19	31 Agustus 2023	September 2023	1.028.539.583,00	31 Agustus 2023
10	20	30 September 2023	Oktober 2023	995.360.887,00	29 September 2023
11	21	31 Oktober 2023	November 2023	1.028.539.583,00	31 Oktober 2023
12	22	30 November 2023	Desember 2023	995.360.887,00	30 November 2023
Jumlah				12.110.224.124,00	

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Perusahaan Daerah, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Kelompok/anggota Masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Adapun realisasi Belanja Hibah dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Belanja Hibah	15.208.149.358,00	13.865.833.702,00	91,17	11.562.306.100,00

Realisasi Belanja Hibah pada LRA sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.865.833.702,00 atau mencapai 91,17 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.208.149.358,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.562.306.100,00 maka Belanja realisasi 2023 meningkat sebesar Rp2.303.527.602,00 atau naik 19,92%. Adapun Belanja Hibah diklasifikasikan menjadi :

Tabel 5.36 Rincian Realisasi Belanja Hibah

NO	JENIS HIBAH	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
a)	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
b)	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.532.770.458,00	6.438.316.708,00	85,47	10.658.139.000,00
	1. Belanja Hibah kepada Badan, dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan Sosial yang berbentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.475.950.458,00	5.429.121.708,00	83,84	6.799.450.000,00
	2. Nirlaba, sukarela dan sosial yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar	511.820.000,00	511.820.000,00	100,00	3.308.689.000,00
	3. Hibah kepada Badan, dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	475.000.000,00	475.000.000,00	100,00	550.000.000,00
	4. Hibah kepada organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	70.000.000,00	22.375.000,00	31,96	-
c)	Belanja Hibah Dana BOS	6.723.910.000,00	6.476.048.094,00	96,31	-
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima Oleh Satdikdas Swasta	6.723.910.000,00	6.476.048.094,00	96,31	-
d)	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	451.468.900,00	451.468.900,00	100,00	404.167.100,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	451.468.900,00	451.468.900,00	100,00	404.167.100,00
	Jumlah	15.208.149.358,00	13.865.833.702,00	91,17	11.562.306.100,00

Di Tahun 2023 terdapat Hibah kepada pemerintah Pusat dimana dengan di keluarkannya Pemandagri nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian hibah maka semua pengeluaran untuk instansi vertikal di anggarkan pada Belanja Hibah Tahun 2023 terdapat Belanja Hibah sebagai berikut :

1. Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe sesuai NPHD Nomor 74/42/NPHD/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 melalui anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp500.000.000,00.
2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp6.436.316.708,00, terdiri dari Belanja Hibah kepada Badan, dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan Sosial yang berbentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terealisasi sebesar Rp5.429.121.708,00, dimana Hibah ini yang ditujukan untuk pembangunan Gereja,

Mesjid, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Bantuan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pada Belanja hibah ini teranggarkan Belanja Hibah untuk Paud swata yang realisasinya sebesar Rp2.260.491.250,00

3. Belanja Hibah kepada Badan, dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan sosial yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi sebesar Rp511.820.000,00, belanja ini untuk pembayaran BOP Swasta. Sedang belanja Hibah kepada Badan, dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja terealisasi sebesar Rp475.000.000,00.
4. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp22.375,000,00 dimana belanja hibah ini di berikan kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabuapten Kepulauan Sangihe.
5. Belanja Hibah Dana BOS yang terealisasi sebesar Rp6.530.345.621,00,
6. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi 100% dari anggaran sebesar Rp451.468.900,00 dengan rinciannya sebagai berikut :

Tabel. 5.37 Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	NAMA PARTAI	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
a)	Partai Golongan Karya	104.914.850,00	104.914.850,00	100,00	104.914.850,00
b)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	84.365.800,00	84.365.800,00	100,00	84.365.800,00
c)	Partai Nasional Demokrat	62.545.500,00	62.545.500,00	100,00	62.545.500,00
d)	Partai Demokrat	45.363.850,00	45.363.850,00	100,00	45.363.850,00
e)	Partai Gerakan Indonesia Raya	47.301.800,00	47.301.800,00	100,00	0,00
f)	Partai Berkarya	35.945.300,00	35.945.300,00	100,00	35.945.300,00
g)	Partai Persatuan Indonesia	31.244.500,00	31.244.500,00	100,00	31.244.500,00
h)	Partai Hati Nurani Rakyat	21.718.600,00	21.718.600,00	100,00	21.718.600,00
i)	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	18.068.700,00	18.068.700,00	100,00	18.068.700,00
	TOTAL	451.468.900,00	451.468.900,00	100,00	404.167.100,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 92,00% dari anggaran Perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2022 maka realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 4.707.513.133,00 atau turun 94,00 %.

Tabel. 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	326.500.000,00	300.383.000,00	92,00	5.007.896.133,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah. Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada LRA sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 92% dari anggaran Pergeseran berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sangehe Nomor 24 Tahun 2022, Dalam Belanja bantuan Sosial ini terdiri terdapat Belanja Bantuan Sosial untuk untuk 98 orang mahasiswa yang kurang mampu sebesar Rp235.500.000,00 pada belanja pada Sekretariat Daerah, serta pemberian bantuan bahan bangunan kepada masyarakat sebesar Rp64.883.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman serta Pertanahan Daerah.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 92,62% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2022 maka realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp175.536.301.608,00 atau turun 66,29% karena pada Tahun 2022 terdapat Belanja Modal untuk Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi melalui Dana PEN.

Tabel. 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Belanja Modal	96.388.585.529,00	89.271.413.872,00	92,62	264.807.715.480,00

Belanja Modal diklasifikasikan menjadi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Namun di Tahun 2023 untuk Belanja Modal Tanah tidak tersedia anggaran. Adapun rincian klasifikasi tersebut adalah:

Tabel 5.40 Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

JENIS BELANJA MODAL	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
a) Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	32.400.897.381,00	29.990.770.289,00	92,56	55.224.985.888,00
c) Belanja Bangunan dan Gedung	30.299.702.140,00	27.139.374.597,00	89,57	84.094.755.629,00
d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.605.103.969,00	31.345.833.817,00	96,14	124.889.748.339,00
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	1.082.882.039,00	795.435.169,00	73,46	598.225.624,00
TOTAL	96.388.585.529,00	89.271.413.872,00	92,62	264.807.715.480,00

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp264.807.715.480,00 maka realisasi pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp175.536.301.608,00 atau turun 66,29%.

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Tahun Anggaran 2023 sama dengan Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja Modal Tanah.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.990.770.289,00 dari anggaran sebesar Rp32.400.897.381,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp55.224.985.888,00, maka di Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp25.234.215.599,00 atau turun 45,63%.

Realisasi dari belanja modal ini di cairkan melalui SP2D sebesar Rp23.145.379.316,00, SP2B pada RSUD Liun Kendage Tahuna sebesar Rp1.732.180.680,00 dan SP2B pada Puskesmas sebesar Rp1.321.192.971,00 serta Dana BOSP sebesar Rp3.792.017.322,00. Adapun realisasi Belanja Peralatan dan mesin tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 5.41 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

NO	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1)	Belanja Modal Alat Besar	2.043.178.000,00	1.777.762.620,00	87,01	5.495.610.000,00
2)	Belanja Modal Alat Angkutan	1.617.425.240,00	1.494.900.000,00	92,42	2.493.450.000,00
3)	Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur	77.610.000,00	77.380.000,00	99,70	251.907.090,00
4)	Belanja Modal Alat Pertanian	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
5)	Belanja Modal Alat dan Rumah Tangga	9.119.051.910,00	8.712.328.584,00	95,54	6.104.994.869,00
6)	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	570.383.288,00	527.922.822,00	92,56	1.693.903.440,00
7)	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.867.021.411,00	11.354.043.825,00	95,68	33.364.828.199,00
8)	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.775.451.434,00	1.889.627.000,00	68,08	229.478.000,00
9)	Belanja Modal Komputer	4.292.162.368,00	4.119.732.438,00	95,98	5.560.814.547,00
10)	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalin	10.360.000,00	8.820.000,00	85,14	-
11)	Belanja Modal Alat Ekspolasi	-	-	0,00	29.999.743,00
12)	Belanja Modal Peralatan Olah raga	23.753.730,00	23.753.000,00	100,00	-
	Jumlah	32.400.897.381,00	29.990.770.289,00	92,56	55.224.985.888,00

Tabel 5.42 Belanja Peralatan dan Mesin Per OPD

NO	NAMA OPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Daerah	8.000.059.264,00	7.136.441.822,00	89,20	4.232.535.631,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	19.131.608.371,00	17.759.278.298,00	92,83	42.021.785.300,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	294.492.223,00	278.314.072,00	94,51	819.119.047,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			-	34.000.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	69.409.092,00	63.950.000,00	92,13	79.410.000,00
5	Dinas Sosial	27.168.181,00	27.168.136,00	100,00	138.245.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	19.681.819,00	19.681.819,00	100,00	5.845.455,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42.390.094,00	42.353.000,00	99,91	32.000.000,00
8	Dinas Pangan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	18.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	36.499.998,00	34.800.000,00	95,34	50.200.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	343.420.854,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	160.617.926,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	1.250.883.579,00
13	Dinas Perhubungan	179.300.000,00	175.852.000,00	98,08	333.176.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	87.522.725,00	87.522.725,00	100,00	203.902.790,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	21.475.909,00	20.574.000,00	95,80	42.490.272,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	27.807.653,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	296.749.889,00	285.331.900,00	96,15	73.727.273,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	307.653.170,00
19	Dinas Perikanan Daerah	8.000.000,00	6.131.250,00	76,64	36.977.450,00
20	Dinas Pariwisata Daerah	88.245.455,00	87.285.000,00	98,91	16.132.895,00
21	Dinas Pertanian Daerah			-	409.610.000,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.090.909,00	4.090.909,00	100,00	28.886.401,00
23	Sekretariat Daerah	471.658.411,00	429.581.000,00	91,08	1.407.738.385,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.061.363.179,00	1.007.225.393,00	94,90	369.311.600,00
25	Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan	32.977.273,00	30.300.000,00	91,88	48.169.500,00
26	Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	664.247.389,00	649.951.000,00	97,85	228.225.143,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			-	765.174.575,00
28	Badan Pengelolah Perbatasan Daerah			-	45.731.875,00
29	Inspektorat	144.399.998,00	144.067.815,00	99,77	114.800.000,00
30	Kecamatan Tabukan Utara	22.272.727,00	22.219.987,00	99,76	34.312.500,00
31	Kecamatan Tabukan Tengah	144.379.091,00	143.913.000,00	99,68	13.636.364,00
32	Kecamatan Tamako	17.540.910,00	17.345.000,00	98,88	19.000.000,00
33	Kecamatan Manganitu	16.650.000,00	16.650.000,00	100,00	16.100.000,00
34	Kecamatan Tahuna	352.060.871,00	350.246.216,00	99,48	508.459.978,00
35	Kecamatan Manganitu Selatan	15.136.364,00	14.000.000,00	92,49	16.500.000,00
36	Kecamatan Tabukan Selatan	38.181.819,00	36.841.819,00	96,49	8.840.000,00
36	Kecamatan Kendahe	33.300.000,00	32.966.000,00	99,00	65.885.818,00
37	Kecamatan Tabukan Selatan Tengah	17.685.314,00	17.685.314,00	100,00	32.562.727,00
38	Kecamatan Nusa Tabukan	43.000.000,00	42.943.114,00	99,87	0,00
39	Kecamatan Tahuna Timur	531.074.020,00	522.451.800,00	98,38	678.719.000,00
40	Kecamatan Tahuna Barat	301.230.635,00	297.168.000,00	98,65	87.919.000,00
41	Kecamatan Kepulauan Marore	3.636.360,00	3.290.000,00	90,48	48.472.727,00
42	Badan Kesatuan Bangsa Politik Daerah	20.909.091,00	20.650.000,00	98,76	49.000.000,00
	JUMLAH	32.400.897.381,00	29.990.770.289,00	92,56	55.224.985.888,00

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.139.374.597,00 atau mencapai 89,57% dari anggaran sebesar Rp30.299.702.140,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp84.094.755.629,00 realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp56.955.381.032,00 atau turun 67,73%. Adapun realisasi belanja ini untuk pengadaan konstruksi/pembelian Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja dan Bangunan Gedung dan Bangunan Tempat Tinggal, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1)	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.299.702.140,00	27.139.374.597,00	89,57	84.094.755.629,00

Realisasi Capaian Belanja Modal Gedung dan Bangunanyang hanya mencapai 89,57% disebabkan adanya efisiensi penggunaan anggaran tahun 2023. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Tabel 5.44 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
a	Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	30.076.952.140,00	26.916.624.597,00	89,49	82.509.531.361,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	745.850.000,00	613.600.580,00	82,27	2.175.344.531,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	3.848.600.000,00	3.566.700.000,00	93,19	528.800.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.218.824.000,00	1.217.149.000,00	99,86	1.680.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.996.297.140,00	7.873.220.837,00	87,52	32.936.531.040,00
	Belanja Modal Bangunan Tempat Pertemuan	-	-	0,00	1.287.129.050,00
	Belanja Modal Bangunan Pendidikan	12.801.855.000,00	11.239.579.180,00	87,80	4.970.312.800,00
	Belanja Modal Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	-	0,00	38.166.248.000,00
	Belanja Modal Bangunan untuk Pos Jaga	-	-	0,00	115.165.940,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	2.465.726.000,00	2.386.375.000,00	96,78	550.000.000,00
	Belanja Modal Taman	-	-	0,00	100.000.000,00
b	Belanja Modal Gedung Tempat Tinggal	222.750.000,00	222.750.000,00	100,00	1.585.224.268,00
	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	222.750.000,00	222.750.000,00	100,00	945.218.350,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-	0,00	640.005.918,00
	Belanja Modal Gedung	30.299.702.140,00	27.139.374.597,00	89,57	84.094.755.629,00

Adapun rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per OPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.45 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per OPD

NO	NAMA OPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Daerah	17.368.955.000,00	15.593.853.180,00	89,78	7.698.793.800,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	12.844.897.140,00	11.459.920.837,00	89,22	33.465.331.040,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	85.850.000,00	85.600.580,00	99,71	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	2.373.872.318,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	189.980.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	642.274.531,00
7	Dinas Pertanian Daerah	-	-	-	1.078.973.000,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	38.166.248.000,00
9	Sekretariat Daerah	-	-	-	74.617.000,00
10	Inspektorat Daerah	-	-	-	189.500.000,00
11	Kecamatan Tahuna	-	-	-	100.000.000,00
12	Kecamatan Tahuna Barat	-	-	-	16.165.940,00
	JUMLAH	30.299.702.140,00	27.139.374.597,00	89,57	84.094.755.629,00

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.345.833.817,00 atau 96,14% dari Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp32.605.103.969,00. Jika di bandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp124.889.748.339,00 maka di tahun 2023 nilai Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar Rp93.543.914.522,00 atau turun 74,90% yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 5.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

NO	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
A	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	16.732.400.000,00	16.731.718.050,00	100,00	83.174.813.570,00
1	Belanja Modal Jalan	16.732.400.000,00	16.731.718.050,00	100,00	83.174.813.570,00
	a. Belanja Modal Jalan Kabupaten	15.640.000.000,00	15.639.998.900,00	100,00	68.148.485.000,00
	b. Belanja Modal Jalan Desa	1.092.400.000,00	1.091.719.150,00	99,94	289.321.570,00
	c. Belanja Modal Jalan Lainnya	-	-	-	14.726.997.000,00
B	Belanja Modal Bangunan Air	6.636.325.529,00	6.602.625.450,00	99,49	5.978.398.250,00
1	Bangunan Pengairan Pasang Surut	397.000.000,00	390.598.650,00	98,38	-
2	Bangunan Pengaman Sungai / pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.239.325.529,00	6.212.026.800,00	99,56	5.673.369.500,00
3	Bangunan Air Kotor	-	-	-	305.028.750,00
C	Belanja Modal Instalasi	8.235.158.440,00	7.011.490.317,00	85,14	35.736.536.519,00
1	Instalasi Air Bersih/Air baku	5.400.158.440,00	4.639.174.217,00	85,91	17.439.459.040,00
2	Instalasi Air Kotor	2.835.000.000,00	2.372.316.100,00	83,68	1.785.014.000,00
3	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	196.923.479,00
4	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	-	-	-	16.315.140.000,00
C	Belanja Modal Jaringan	1.001.220.000,00	1.000.000.000,00	99,88	-
1	Instalasi Listrik	1.001.220.000,00	1.000.000.000,00	99,88	-
	Jumlah	32.605.103.969,00	31.345.833.817,00	96,14	124.889.748.339,00

Dari rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat realisasi belanja Instalasi air kotor yang pencapaiannya terendah yakni 83,68 % hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD sebagai berikut.

Tabel 5.47 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD

NO	NAMA OPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan Daerah	5.845.516.440,00	5.094.316.100,00	87,15	33.024.074.479,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.667.155.529,00	26.159.798.567,00	98,10	91.133.951.500,00
3	Kecamatan Tahuna	92.400.000,00	91.718.150,00	99,26	176.595.100,00
4	Sekretariat DPRD			-	15.000.000,00
5	Kecamatan Tahuna Barat			-	540.127.260,00
	JUMLAH	32.605.073.969,00	31.346.833.817,00	96,14	124.889.748.339,00

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp795.435.169,00 atau 73,46% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.082.882.039,00. Jika di dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp598.225.624,00, realisasi Tahun 2023 dalam Belanja Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp197.209.545,00 atau naik 32,97%. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direalisasikan untuk Belanja Modal Buku Umum, Belanja Modal Buku Geografi Biografi dan Sejarah serta Belanja Modal Alat Studio. Adapun dari total realisasi sebesar Rp795.435.169,00 terdiri dari pencairan melalui SPB Belanja BOS sebesar Rp730.347.269,00 dan pencairan melalui SP2D sebesar Rp65.087.900,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.48 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

NO	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	923.794.139,00	783.347.269,00	84,80	421.455.624,00
a	Belanja Modal Buku Umum	868.794.139,00	730.347.269,00	84,06	405.499.374,00
b	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	55.000.000,00	53.000.000,00	96,36	15.956.250,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	12.087.900,00	12.087.900,00	100,00	-
a	Belanja Modal Audio Visual	12.087.900,00	12.087.900,00	100,00	-
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	-	-	-	76.870.000,00
a	Belanja Modal Barang Kerajinan	-	-	-	76.870.000,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	147.000.000,00	-	-	99.900.000,00
a	Belanja Modal Software	147.000.000,00	-	-	99.900.000,00
	Jumlah	1.082.882.039,00	795.435.169,00	73,46	598.225.624,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap lainnya berdasarkan OPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.49 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

NO	NAMA OPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Daerah	923.794.139,00	783.347.269,00	84,80	-
2	Dinas Kesehatan Daerah	159.087.900,00	12.087.900,00	7,60	33.024.074.479,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	91.133.951.500,00
3	Sekretariat DPRD	-	-	-	15.000.000,00
4	Kecamatan Tahuna	-	-	-	176.595.100,00
5	Kecamatan Tahuna Barat	-	-	-	540.127.260,00
	JUMLAH	1.082.882.039,00	795.435.169,00	73,46	124.889.748.339,00

5.1.3.2 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 68 Ayat 1 adalah sebagai pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.1.2.3.1 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp319.766.848,00 atau 18,29% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.748.287.720,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.396.612.212,00 maka di Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.076.845.364,00 atau 94,07%.

Tabel. 5.50 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Belanja Tak Terduga	1.748.287.720,00	319.766.848,00	18,29	5.396.612.212,00

Belanja ini di Tahun 2023 membiayai kegiatan bencana alam yang terjadi di daerah baik penyaluran bahan bangunan penanganan musibah kebakaran, pengadaan barang/ bahan untuk perbaikan/rehabilitasi penanganan musibah kebakaran serta pengadaan makanan dan minuman dalam rangka penanganan bencana. Penurunan realisasi signifikan karena pada Tahun 2022 masih terdapat belanja untuk pembayaran Covid-19 sebesar Rp2.749.208.983,00 serta pembayaran biaya provisi sebesar 1% (satu persen) pinjaman PEN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

5.1.3 Belanja Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya Penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi. Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp162.256.048.993,00 atau 101,97 % dari anggaran sebesar Rp159.121.517.487,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yakni sebesar Rp156.527.304.542,00, maka pada Tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar Rp5.728.744.451,00 atau naik 3,66%.

Tabel. 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Belanja Transfer	159.121.517.487,00	162.256.048.993,00	101,97	156.527.304.542,00

Pada belanja transfer di tahun 2023 terdapat pelampauan anggaran karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai akhir penyusunan Anggaran Perubahan 2023 tidak menerima informasi tentang adanya PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 sehingga nilai perubahan alokasi Dana Desa tersebut tidak disesuaikan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2023. Proses pencairan Dana Desa tersebut langsung dilakukan melalui KPPN ke rekening masing-masing Kampung dan tidak melalui aplikasi Keuangan Daerah. Dan Informasi tersebut nanti diterima pada tanggal 5 Januari 2024

Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diklasifikasikan dalam : a) Belanja Bagi Hasil, b) Belanja Bantuan Keuangan, yang realisasinya sebagai berikut:

Tabel 5.52 Belanja Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
a) Belanja Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)	2.336.041.187,00	2.335.858.581,00	99,99	1.911.079.759,00
b) Belanja Bantuan Keuangan (Bagi Hasil Lainnya)	156.785.476.300,00	159.920.190.412,00	102,00	154.616.224.783,00
TOTAL	159.121.517.487,00	162.256.048.993,00	101,97	156.527.304.542,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.53 Rincian Dana Bagi Hasil

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa	1.417.499.462,00	1.417.499.462,00	100,00	1.911.079.759,00
2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa	918.541.725,00	918.359.119,00	99,98	154.616.224.783,00
TOTAL	2.336.041.187,00	2.335.858.581,00	99,99	156.527.304.542,00

Belanja Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari Bantuan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Kota dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Rincian Transfer Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.54 Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
a Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
b Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Ke Desa	156.785.476.300,00	159.920.190.412,00	102,00	154.516.224.783,00
TOTAL	156.785.476.300,00	159.920.190.412,00	102,00	154.616.224.783,00

Untuk Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp159.920.190.412,00 yang terdiri dari :

1. Dana Desa (APBN)	Rp107.491.407.902,00
2. Alokasi Dana Desa (APBD)	<u>Rp 52.428.782.510,00</u>
Jumlah	Rp159.920.190.412,00

Dana Desa merupakan Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan di Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp107.491.407.902,00. Selain Dana Desa yang bersumber dari APBN, terdapat Alokasi Dana Desa dari APBD yang terealisasi sebesar Rp52.428.782.510,00 yang pembagiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023. Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada Lampiran.

5.1.4 Surplus/Defisit

Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja, dimana Tahun 2023 mengalami Defisit sebesar Rp27.167.789.700,24 yang berarti bahwa realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi Belanja dan Transfer. Dimana total Realisasi

Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp875.005.959.667,76 sedangkan total Belanja dan transfer Rp902.173.749.368,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 yang sebesar -Rp201.503.865.301,46, Defisit Tahun 2023 lebih kecil.

Tabel. 5.55 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
SURPLUS/DEFISIT	(82.317.739.854,00)	(27.167.789.700,24)	33,00	(201.503.865.301,46)

5.1.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 70 ayat (3) menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel. 5.56 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	97.317.739.854,00	97.286.265.291,80	99,97	299.821.605.356,06

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 yang merupakan sebesar Rp97.286.265.291,80 bila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp299.821.605.356,06, maka penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp202.371.233.999,80 atau turun 67,52%. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 tinggi disebabkan karena adanya Penerimaan dari Dana PEN.

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp97.286.265.291,80 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA 2022) sebesar Rp97.317.740.054,60 serta koreksi atas SILPA sebesar -Rp31.474.762,80.

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100% dari Anggaran. Pengeluaran Pembiayaan ini merupakan Dana Cadangan yang disiapkan untuk Kegiatan Pemilihan Umum di Tahun 2024 sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan. Realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp14.000.000.000,00 dari Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 1400%.

Tabel. 5.57 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00

5.1.5.3 Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2023 sebesar Rp82.286.265.291,80 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp.298.821.605.356,06 hal ini menunjukkan bahwa di Tahun 2023 Pembiayaan Neto Pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp216.535.340.064,26 atau 99,96% yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 5.58 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
Pembiayaan Neto	82.317.739.854,00	82.286.265.291,80	99,96	298.821.605.356,06

5.1.5.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp55.118.475.591,56 sedangkan di Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp97.317.740.054,60. Silpa Tahun 2023 adalah jumlah nilai defisit sebesar -Rp27.167.789.700,24 ditambah dengan Pembiayaan Neto sebesar Rp82.286.265.591,56 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.59 Selisih Surplus/ Defisit dan Pembiayaan Neto

NO	URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
1	Pendapatan	875.005.959.667,76	902.325.462.502,54
2	Belanja	902.173.749.368,00	1.103.829.327.804,00
3	Surplus/ Defisit	(27.167.789.700,24)	(201.503.865.301,46)
4	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	97.286.265.291,80	299.821.605.356,06
5	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6	Pembiayaan Neto	82.286.265.291,80	298.821.605.356,06
7	SILPA	55.118.475.591,56	97.317.740.054,60

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp55.118.475.591,56 meliputi SILPA tidak mengikat dan SILPA mengikat yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel. 5.60 Rincian SILPA Tahun 2023

NO	URAIAN	REALISASI
A	SILPA TIDAK MENGIKAT	19.031.935.754,56
1	DAU SG Bidang Pendidikan	6.749.863.714,00
2	DAU SG Bidang Kesehatan	3.986.603.901,00
3	DAU SG Bidang PU	2.623.068.559,00
4	DAU SG Bidang Kelurahan	3.737.000,00
5	Penghematan Belanja	5.668.662.580,56
B	SILPA MENGIKAT	36.086.539.837,00
I	Tambahan DAU Guru PNSD Daerah	3.633.243.000,00
II	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	15.883.842.341,00
III	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	3.807.689.086,00
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Thun 2018	112.907.399,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Reguler	12.483.814,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler	24.972.352,00
	DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan Reguler	245.000,00
	DAK Fisik Bidang Air Minum Penugasan	2.870.258,00
	DAK Fisik Bidang Irigasi Penugasan	72.233.975,00
	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup Penugasan	100.000,00
	DAK Fisik Bidang Perumahan Permukiman Penugasan	2.000,00
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Thun 2019	1.798.491.981,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler	644.284.105,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler	612.362.997,00
	DAK Fisik Bidang Sanitasi Reguler	19.000.000,00
	DAK Fisik Bidang SIKM Reguler	2.200.001,00
	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Reguler	29.979.000,00
	DAK Fisik Bidang Pariwisata Reguler	11.645.662,00
	DAK Fisik Bidang Jalan Reguler	4.476.705,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Penugasan	145.647.202,00
	DAK Fisik Bidang Air Minum Penugasan	556.911,00
	DAK Fisik Bidang Irigasi Penugasan	54.925.001,00
	DAK Fisik Bidang Pasar Afirmasi	142.411.345,00
	DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan - Cadangan Afirmasi	63.050.002,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan Afirmasi	64.903.550,00
	DAK Fisik Bidang Air Minum Afirmasi	3.000.000,00
	DAK Fisik Bidang Sanitasi Afirmasi	49.500,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Thun 2020	1.317.623.401,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan / SD Reguler	80.745.000,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan / SMP Reguler	11.077.000,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan / PAUD	1.498.000,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB/ Pelayanan Dasar Penugasan	232.890.800,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB / Pelayanan Rujukan Penugasan	39.925.316,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB / Pelayanan Kefarmasian Penugasan	648.175.621,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB / Keluarga Berencana Penugasan	24.112.780,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan / Penguatan RS Rujukan Penugasan	150.000.000,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan / Intervensi Stunting Penugasan	15.426.100,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan / SD - Afirmasi	1.720.000,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan / SMP - Afirmasi	250.000,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan / Penguatan Puskesmas DTPK- Afirmasi	78.431.870,00
	DAK Fisik Air Minum - Cadangan Penugasan	10.400.000,00
	DAK Fisik Sanitasi - Cadangan Penugasan	90.682,00
	DAK Fisik Kelautan dan Perikanan - Cadangan Penugasan	5.534.750,00
	DAK Fisik Air Minum - Cadangan Afirmasi	5.293.182,00
	DAK Fisik Sanitasi - Cadangan Afirmasi	38.300,00
	DAK Fisik Transportasi Perdesaan - Cadangan Afirmasi	12.014.000,00

NO	URAIAN	REALISASI
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Thun 2021	411.205.556,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan / SD Reguler	22.430.000,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan / SMP Reguler	536.000,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB / Pelayanan Dasar Reguler	105.672.000,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB / Pelayanan Kefarmasian /BHP Reguler	164.373.140,00
	DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan / Transportasi Perdesaan Reguler	10.000.000,00
	DAK Fisik Bidang Pertanian / Pertanian (Ketahanan Pangan) Penugasan	50.000,00
	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan / Kelautan dan Perikanan Penugasan	1.083.636,00
	DAK Fisik Bidang Air Minum / Air Minum Penugasan	104.839.475,00
	DAK Fisik Bidang Sanitasi / Sanitasi Penugasan	2.221.305,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Thun 2022	108.198.639,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan / PAUD Reguler	12.500,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan / SD Reguler	12.180.000,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan / SMP Reguler	2.885.000,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana / Kefarmasian Reguler	13.714.990,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB / Penguatan Sistem Kesehatan Reguler	10.873.000,00
	DAK Fisik Bidang Jalan / Jalan Reuler	689.000,00
	DAK Fisik Bidang Air Minum / Air Minum Reguler	11.000.050,00
	DAK Fisik Bidang Sanitasi / Sanitasi Reguler	8.275.000,00
	DAK Fisik Bidang Jalan / Jalan Penugasan	47.376.000,00
	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan / Kelautan dan Perikanan Penugasan	1.193.099,00
6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Thun 2023	59.262.110,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan / PAUD Penugasan	17.453.550,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan / SD Penugasan	15.704.300,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana / Penguatan Sistem	15.705.260,00
	DAK Fisik Bidang Jalan / Jalan - Tematik Penugasan	10.399.000,00
IV	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NON Fisik	7.203.703.985,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	5.076.723.617,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	121.345.539,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	887.190.000,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	197.250.000,00
	DAK Non Fisik-TKG PNSD	51.397.700,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	150.722.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	100.095.029,00
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	531.622.750,00
	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	87.357.350,00
V	Dana Kapitasi JKN	1.427.802.220,00
	PKM Tahuna Timur	235.501.287,00
	PKM Manganitu	13.860.632,00
	PKM Siloam Tamako	53.378.705,00
	PKM Dagho	102.729.822,00
	PKM Manalu	27.414.773,00
	PKM Kuma	8.713.382,00
	PKM Enemawira	403.230.424,00
	PKM Kalasuge	851.319,00
	PKM Kendahe	5.049.769,00
	PKM Lapango	93.743.032,00
	PKM Marore	123.662,00
	PKM Nusa Tabukan	55.499.349,00
	PKM Kahakitang	129.162.028,00
	PKM Pintareng	4.755.163,00
	PKM Salurang	-
	PKM Tahuna Barat	34.526.843,00
	PKM Manente	259.262.030,00
	RS Liung Paduli	-

NO	URAIAN	REALISASI
VI	Sisa KAS BOK	1.480.838.202,00
	PKM Dagho	118.108,00
	PKM Enemawira	160.187.832,00
	PKM Kahakitang	104.533.368,00
	PKM Kalasuge	100.638.244,00
	PKM Kendahe	69.116.927,00
	PKM Kuma	205.541.856,00
	PKM Lapango	253.048.246,00
	PKM Manalu	2.170.772,00
	PKM Manente	143.463.956,00
	PKM Manganitu	111.944.981,00
	PKM Marore	57.902.927,00
	PKM Nusa Tabukan	105.802.030,00
	PKM Pintareng	81.233.641,00
	PKM Salurang	83.329.881,00
	PKM Tahuna Barat	73.537,00
	PKM Siloam Tamako	1.730.603,00
	PKM Tahuna/ Tona	1.293,00
VII	BLUD RSU Liun Kendage Tahuna	1.518.422.518,00
VIII	RSU Liung Paduli	558.612.600,00
IX	KAS DI Bendahara Dana BOS	526.576.425,00
	JUMLAH SILPA TAHUN 2023	55.118.475.591,56

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL Akhir. Laporan Perubahan SAL Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut .

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp 97.317.740.054,60 dan Rp106.443.092.726,06 merupakan saldo akhir tahun sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel. 5.61 SAL Awal Tahun 2023 dan Tahun 2022

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	97.317.740.054,60	106.443.092.726,06

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe per 31 Desember 2023 sebesar Rp97.286.265.291,80 dan tahun 2022 sebesar Rp106.885.382.412,06 turun sebesar Rp9.569.117.120,26 yang dapat di uraikan sebagai berikut.

Tabel. 5.62 Penggunaan SAL Awal Tahun 2023 dan Tahun 2022

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	97.286.265.291,80	106.855.382.412,06

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar Rp97.286.265.291,80 yang adalah Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp97.317.740.054,60 setelah ditambah koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp31.474.762,80.

5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangehe per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.118.475.591,56. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp97.317.740.054,60 terdapat penurunan sebesar Rp42.199.264.463,04 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel. 5.63 SILPA Tahun 2023 dan Tahun 2022

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	55.118.475.591,56	97.317.740.054,60

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangehe pada Tahun Anggaran 2023 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 55.118.475.591,56 merupakan penjumlahan antara:

- Surplus / Defisit Anggaran	(Rp 27.252.758.408,24)
- Pembiayaan Neto	<u>Rp 82.371.233.999,80</u>
SiLPA Tahun berjalan	Rp 55.118.475.591,56

Jika dibandingkan dengan Silpa Tahun 2023 sebesar Rp.55.118.475.591 terhadap Total Kas sebesar Rp.55.122.753.191,56 dimana terdapat selisih sebesar Rp4.277.600,00, perbedaan tersebut disebabkan karena nilai PFK yang dapat dilihat pada Utang PFK di Neraca.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah sebesar -Rp31.474.762,80 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp412.289.686,00 turun sebesar Rp443.764.448,80

Tabel. 5.64 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(31.474.762,80)	412.289.686,00

Koreksi kesalahan pembukuan tahun di Tahun 2023 sebesar -Rp31.474.762,80 artinya bahwa di tahun 2023 terdapat koreksi yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih Tahun berjalan.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.118.475.591,56 dan Tahun 2022 sebesar Rp97.317.740.054,60 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp42.199.264.463,04.

Tabel. 5.65 SAL Akhir Tahun 2023 dan Tahun 2022

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	55.118.475.591,56	97.317.740.054,60

5.3 NERACA

5.3.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.865.764.988.194,82. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.932.407.449.260,89 terdapat penurunan sebesar Rp66.642.461.066,07 atau 3,45% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66 Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Per 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Aset Lancar	88,938,475,620.98	153,771,733,076.36	(64,833,257,455.38)
Investasi Jangka Panjang	14,358,793,545.80	14,511,892,094.38	(153,098,548.58)
Aset Tetap	1,531,165,121,223.73	1,551,283,200,354.25	(20,118,079,130.52)
Dana Cadangan	16,000,000,000.00	1,000,000,000.00	15,000,000,000.00
Aset Lainnya	215,302,597,804.31	211,840,623,735.90	3,461,974,068.41
Total	1,865,764,988,194.82	1,932,407,449,260.89	(66,642,461,066.07)

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Saldo aset lancar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp88.938.475.620,98 dan saldo Aset Lancar pada tahun sebelumnya sebesar

Rp153.771.733.076,36 terjadi penurunan sebesar Rp64.833.257.455,38 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.67 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023

No	ASET LANCAR	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	49.480.226.504,62	90.678.575.040,51
2	Kas di Bendahara Penerimaan	646.086.910,00	9.569.816,09
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.628.937,00	7.599.482,00
4	Kas di Bendahara BLUD	1.518.422.518,00	3.840.843.637,00
5	Kas di Bendahara BOS	526.576.425,00	663.079.204,00
6	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN terdiri dari :	2.908.640.422,00	2.118.072.875,00
	a. Dana Kapitasi Rp1.427.802.220,00		
	b. Kas BOK Rp1.480.838.202,00		
7	Kas Lainnya	27.171.474,94	11.763.937,00
9	Piutang Pajak	4.203.334.569,00	2.613.344.581,00
10	Piutang Retribusi	562.410.000,00	476.910.000,00
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.880.059.799,00	0,00
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.088.410.215,00	1.882.526.050,96
12	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11.610.633.553,00	11.468.952.470,00
13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3.892.316.270,63	3.895.816.270,63
14	Piutang Lainnya	4.578.220.491,40	3.350.018.651,00
15	Penyisihan Piutang	(7.655.469.824,85)	(6.517.489.891,44)
16	Beban Dibayar Dimuka	-	1.250.000,00
17	Persediaan	12.655.807.356,24	39.270.900.952,61
	Jumlah	88.938.475.620,98	153.771.733.076,36

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah sampai 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp49.480.226.504,62 dan Rp90.678.575.040,51 mengalami penurunan sebesar Rp41.198.348.535,89 atau 45.43% yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.68 Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	49.480.226.504,62	90.678.575.040,51

Posisi saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 antara saldo buku dengan saldo rekening koran bank adalah sebagai berikut.

Tabel 5.69 Rincian Kas Di Kas Daerah Per 31 Desember 2023

NO	REKENING	SALDO BUKU (Rp)	SALDO REKENING KORAN (Rp)	STATUS	KET. JENIS REKENING
1.	PT. Bank Sulut Cab. Tahuna				
	a. R.G No. 004.01.12.020000-2	43.340.491.687,73	59.340.491.687,73	aktif	RKUD
	b. R.G No. 004.01.12.020000-4	503.631,00	0,00	aktif	Rek. Pengeluaran
	c. R.G No. 004.01.12.0200001-1	0,00	0,00	aktif	Rek. Penerimaan
	d. R.G No. 004002110209002360	0,00	0,00	aktif	Rek. PBB
	e. R.G No. 044.01.12.000001-9	6.122.340.136,00	6.122.340.136,00	aktif	Rek. Penampung di capem Tamako
	f. Rekening Deposito	0,00	0,00		
	g. Deposito Bank Sulut Capem Tamako	0,00	0,00		
	h. Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00	pasif	
2	PT. Bank Mandiri Cab. Tahuna				
	- R.G No. 1500004232201	3.404.970,89	3.404.970,89	pasif	Rek. Penampung
3	PT. BRI Cab. Tahuna				
	a. RG No. 022601005539501	2.414.872,00	2.414.872,00	aktif	Rek. Penampung Cabang Tahuna
	b. RG No. 3635-01-026434-53-2	2.188.230,00	2.188.230,00	aktif	Rek. Penampung Unit Sawang Bendar
	c. RG No. 5218-01-011600-53-6	2.258.895,00	2.258.895,00	aktif	Rek. Penampung Unit Tamako
	d. RG No. 7456-01-010670-53-2	2.199.533,00	2.199.533,00	aktif	Rek. Penampung Unit Tidore
	e. RG No. 5217-01-021831-53-9	2.010.614,00	2.010.614,00	aktif	Rek. Penampung Unit Petta
	f. Deposito BRI Tamako	0,00	0,00		
	g. Deposito BRI Unit Sawang Bendar	0,00	0,00		
4	PT. BNI Cabang Tahuna				
	a. RG BNI No. 0087455877	2.413.935,00	2.413.935,00	aktif	Rek. Penampung
	b. Rekening Deposito	0,00	0,00		
	Total Kas Di Kas Daerah	49.480.226.504,62	65.479.722.873,62		

Terdapat selisih antara Saldo Buku dan Rekening Koran sebesar Rp16.000.503.631,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Cadangan Pemerintah Daerah sebesar Rp16.000.000.000,00 yang sebelumnya ada pada nomor rekening 004.01.12.000004-6 bukan merupakan bagian dari Kas Daerah yang dipindahbukukan oleh Bank SulutGo Cabang Tahuna ke Rekening Kas Daerah dengan nomor rekening 004.01.12.020000-2;
- Rp4.281 pindah buku tidak menggunakan SP2D oleh BSG Cabang Tahuna dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Petta untuk biaya asuransi dan telah dipindahbukukan kembali ke Rekening Pengeluaran Kas Daerah pada tanggal 7 Maret 2024;
- SP2D Nomor 17.03/04.0/000189/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan nilai Rp163.780.550,00 tetapi dibukukan oleh Pihak Bank SulutGo sebesar Rp163.780.500,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp50,00 dan belum disesuaikan di aplikasi FMIS;
Berdasarkan SP2D Nomor 17.03/04.0/001041/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 terdapat lebih bayar belanja perjalanan dinas Pegawai Puskesmas Tamako dengan nilai Rp5.000.000,00 dan telah dilakukan penyeteroran atas lebih bayar tersebut pada tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp500.000,00 karena terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp500.000,00.
- SP2D Nomor 17.03/04.0/001767/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 dengan nilai Rp3.345.600,00 tetapi dibukukan oleh Pihak Bank SulutGo sebesar Rp3.345.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp600 dan belum disesuaikan di aplikasi FMIS;

5.3.1.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Kas Di Bendahara Penerimaan sampai 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp646.086.910,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp9.569.816,09 mengalami kenaikan sebesar Rp636.517.093,91 atau 6651,30% dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.70 Kas di Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	646.086.910,00	9.569.816,09

Daftar rincian saldo Kas pada Bendahara Penerimaan Tahun 2023 serta rincian penyetoran di Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rincian Saldo Kas pada Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023

No	SKPD/Unit Kerja	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2022	Disetor		Sisa (Rp)	KETERANGAN
			Tanggal	Jumlah (Rp)		
1	Puskesmas Tona	156.000,00	3 Januari 2024	156.000,00	0,00	
2	Puskesmas Manganitu	84.000,00	2 Januari 2024	84.000,00	0,00	
3	Puskesmas Manente	123.000,00	4 Januari 2024	123.000,00	0,00	
4	Puskesmas Lapango	792.000,00	10 Januari 2024	792.000,00	0,00	
		1.266.000,00	14 Mei 2024	1.266.000,00	0,00	
5	Puskesmas Marore	12.000,00	11 Januari 2024	12.000,00	0,00	
6	RSU Liung Paduli	559.612.600,00	18 Maret 2024	558.612.600,00	1.000.000,00	
		70.385.500,00	7 Maret 2024	62.988.400,00	0,00	
			17 Mei 2024	7.397.100,00	0,00	
		96.960,00	-	-	96.960,00	
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.429.350,00	2 Januari 2024	1.429.350,00	0,00	
		3.217.500,00	-	-	3.217.500,00	
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	187.000,00	8 Januari 2024	187.000,00	0,00	
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	8.725.000,00	15 Mei 2024	8.725.000,00	0,00	
	Jumlah	646.086.910,00		641.772.450,00	4.314.460,00	

Sampai 31 Desember 2023 masih terdapat Saldo di Bendahara Penerimaan RSU Liung Paduli sebesar Rp630.095.060,00 yaitu klaim BPJS sebesar Rp558.612.600,00 dan Rp1.000.000,00 adalah saldo awal pembukaan rekening, yang penerimaannya dicatat dan diakui pada pendapatan Lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga terdapat Dana Non Kapitasi

LKPD 2023 - Audited

sebesar Rp70.385.500,00 dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP Rp96.960,00 dimana RSUD Liung Paduli sudah menjadi Rumah Sakit Tipe D sesuai Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 503/81/DPMTSPD/01-TU/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

5.3.1.1.3 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Kas di Bendahara Pengeluaran sampai 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.628.937,00 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp7.599.482,00 mengalami kenaikan sebesar 8.029.455,00 atau 105,66% dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.72 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	15.628.937,00	7.599.482,00

Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Saldo Kas Pada Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023

NO	SKPD	SISA KAS			
		Sisa UP/GU/TU (Rp)	Uang Pajak (Rp)	Jasa Giro (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan Daerah	0,00	419.547,00	0,00	419.547,00
2	Puskesmas Enemawira	0,00	398.310,00	0,00	398.310,00
3	Puskesmas Manalu	0,00	755.360,00	0,00	755.360,00
4	RSU Liung Paduli	0,00	273.018,00	0,00	273.018,00
5	Dinas Perkimtanda	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	0,00	337.720,00	0,00	337.720,00
7	Dinas Tenaga Kerja Daerah	9.790.337,00	0,00	0,00	9.790.337,00
8	Badan Pengelola Perbatasan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9	Kec. Nusa Tabukan	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
10	Bagian Perekonomian Setda	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
11	Bagian Tata Pemerintahan Setda		1.012.500,00	0,00	1.012.500,00
12	Bagian Umum Setda		1.064.825,00	0,00	1.064.825,00
	Jumlah	11.351.337,00	4.277.600,00	0,00	15.628.937,00

1) Rincian sisa Saldo UP/GU/TU sebesar Rp11.351.337,00 adalah sebagai berikut :

- Dinas Tenaga Kerja Daerah sebesar Rp9.790.337,00 yang sudah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp8.222.166,00 pada tanggal 22 Januari 2024 dan sisa sebesar Rp1.568.171,00 telah disetor pada tanggal 2 April 2024;
- Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp1.000.000,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 10 Januari 2024;
- Kecamatan Nusa Tabukan sebesar Rp520.000,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 7 Februari 2024;
- Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar Rp41.000,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 15 Maret 2024.

2) Rincian Saldo Pajak Pusat sebesar Rp4.277.600,00 adalah sebagai berikut :

LKPD 2023 - Audited

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp419.547,00 sudah disetor ke Kas Negara pada tanggal 19 Februari 2024;
2. Puskesmas Enemawira sebesar Rp398.310,00 sudah disetor ke Kas Negara pada tanggal 6 Maret 2024;
3. Puskesmas Manalu sebesar Rp755.360,00 sudah disetor ke Kas Negara pada tanggal 6 Maret 2024;
4. RSUD Liung Paduli sebesar Rp273.018,00 sudah disetor ke Kas Negara pada tanggal 8 Maret 2024;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Daerah sebesar Rp16.320,00 sudah disetor ke Kas Negara pada tanggal 31 Januari 2024;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah sebesar Rp337.720,00 sudah disetor ke Kas Negara pada tanggal 5 Januari 2024;
7. Bagian Tata Pemerintahan Setda sebesar Rp1.012.500,00;
8. Bagian Umum Setda sebesar Rp1.064.825,00.

5.3.1.1.4 Kas Di Bendahara BLUD

Saldo BLUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.518.422.518,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp 2.322.421.119,00 atau 60,47% dibanding dengan tahun 2022 sebesar Rp3.840.843.637,00 hal ini di sebabkan karena kebutuhan akan pengadaan obat-obatan pada BLUD RSUD Liun Kendage Tahuna bertambah.

Tabel 5.74 Kas di Kas Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Bendahara BLUD	1.518.422.518,00	3.840.843.637,00

Tabel 5.75 Rincian Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	NO REKENING	NAMA REKENING	SALDO
1	Bank SulutGo Cabang Tahuna	00401140000076	Badan Layanan Umum Daerah RSD Liunkendage	1.453.617.397,00
2	Bank SulutGo Cabang Tahuna	00401140000064	Rekening Penerimaan RSD Liunkendage	7.220.201,00
3	Bank BNI Cabang Tahuna	1148634895	RSD Liun Kendage Tahuna	1.470.755,00
4	Tunai di Bendahara BLUD :			
	- Bendahara penerimaan			22.636.477,00
	- Bendahara pengeluaran			33.477.688,00
TOTAL				1.518.422.518,00

5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP

Penetapan rekening pengelolaan dana BOSP berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 152/420/Tahun 2019 tentang Penetapan Rekening Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada saldo awal Tahun 2022 antara SDN Talawid dan SDN Inpres Talawid pencatatannya tertukar yang menyebabkan saldo akhir 2022 tertukar.

Kas di Kas di Bendahara BOSP sampai 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp526.576.425,00 dan Rp663.079.204,00 mengalami penurunan sebesar Rp136.502.779,00 atau 20,59% dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 5.76 Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Bendahara BOSP	526.576.425,00	663.079.204,00

5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP sampai 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.427.802.220,00 dan Rp2.118.072.875,00 mengalami penurunan sebesar Rp690.270.655,00 atau 32,59% dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.77 Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	1.427.802.220,00	2.118.072.875,00

Pembukaan rekening Dana Kapitasi JKN sesuai Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 169/440/Tahun 2019, tentang Penetapan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saldo atas Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas per 31 Desember 2023 diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 5.78 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP 2023 dan 2022

No.	Puskesmas	2023	2022
1	PKM Tahuna Timur	235.501.287,00	302.017.219,00
2	PKM Manganitu	13.860.632,00	4.441.690,00
3	PKM Siloam Tamako	53.378.705,00	645.080,00
4	PKM Dagho	102.729.822,00	94.778.995,00
5	PKM Manalu	27.414.773,00	25.489.652,00
6	PKM Kuma	8.713.382,00	28.591.790,00
7	PKM Enemawira	403.230.424,00	549.686.167,00
8	PKM Kalasuge	851.319,00	26.253.118,00
9	PKM Kendahe	5.049.769,00	61.162.599,00
10	PKM Lapango	93.743.032,00	137.495.917,00
11	PKM Marore	123.662,00	20.408.016,00
12	PKM Nusa Tabukan	55.499.349,00	42.070.307,00
13	PKM Kahakitang	129.162.028,00	160.983.062,00
14	PKM Pintareng	4.755.163,00	11.432.116,00
15	PKM Salurang	-	69.413.483,00
16	PKM Tahuna Barat	34.526.843,00	70.188.365,00
17	PKM Manente	259.262.030,00	376.472.899,00
18	RS Liung Paduli	-	136.542.400,00
	Jumlah	1.427.802.220,00	2.118.072.875,00

5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas di Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.480.8383.202,00 dan Rp0,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.79 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2023

No.	Puskesmas	2023
1	PUSKESMAS DAGHO	118.108
2	PUSKESMAS ENEMAWIRA	160.187.832
3	PUSKESMAS KAHAKITANG	104.533.368
4	PUSKESMAS KALASUGE	100.638.244
5	PUSKESMAS KENDAHE	69.116.927
6	PUSKESMAS KUMA	205.541.856
7	PUSKESMAS LAPANGO	253.048.246
8	PUSKESMAS MANALU	2.170.772
9	PUSKESMAS MANENTE	143.463.956
10	PUSKESMAS MANGANITU	111.944.981
11	PUSKESMAS MARORE	57.902.927
12	PUSKESMAS NUSA	105.802.030
13	PUSKESMAS PINTARENG	81.233.641
14	PUSKESMAS SALURANG	83.329.881
15	PUSKESMAS TAHUNA BARAT	73.537
16	PUSKESMAS TAMAKO	1.730.603
17	PUSKESMAS TONA	1.293
	Jumlah	1.480.838.202,00

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Kas Lainnya adalah Jasa Giro atas dana pada rekening Kas Dana BOSP, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Non Kapitasi dan Klaim BPJS pada RS Liung Paduli, yang masih ada di rekening bank hingga tanggal neraca. Jasa Giro atas Dana Kapitasi JKN yang masih ada di rekening bank Bendahara Kapitasi hingga tanggal neraca; Dana Non Kapitasi masih ada di rekening bank Bendahara Dinas Kesehatan hingga tanggal neraca; Dana BOSP masih ada pada rekening Dana BOSP dan Klaim BPJS masih ada di rekening bank Bendahara RS Liung Paduli hingga tanggal neraca. Kas lainnya 31 Desember 2023 sebesar Rp27.171.474,94 dan saldo Kas tahun 2022 sebesar Rp11.763.937,00 terjadi kenaikan sebesar Rp15.407.537,94.

Tabel 5.80 Kas Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Kas Lainnya	27.171.474,94	11.763.937,00

Pada Tahun 2023, terdapat Saldo Kas Lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri atas Jasa Giro pada Bendahara Dana Kapitasi JKN sebesar

Rp23.746.138,00, Jasa Giro Non Kapitasi Rp1.432.739,34, Jasa Giro Klaim BPJS Rp.134.974,00 dan Jasa Giro Dana BOSP sebesar Rp1.857.623,60 yang belum disetorkan. Adapun rinciannya terdapat pada lampiran.

5.3.1.1.9 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak merupakan Pajak Daerah yang telah ditetapkan yang belum dibayar/disetor ke rekening Kas Umum Daerah sampai 31 Desember 2023. Nilai piutang pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.203.334.569,00 jika dibandingkan dengan nilai piutang pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.613.344.581,00 naik sebesar Rp1.589.989.988,00 atau 60,84%.

Tabel 5.81 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak	4.203.334.569,00	2.613.344.581,00

Rincian atas piutang pajak dan mutasi atas piutang pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.82 Rincian dan mutasi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023

Jenis Piutang	Saldo Awal 2022 (Rp)	Penambahan 2023 (Rp)		Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
		Piutang 2022	Koreksi	Penyetoran 2022	
Piutang Pajak Hotel	11.212.500,00		0,00	0,00	11.212.500,00
Piutang Pajak Restoran	10.321.500,00		0,00	0,00	10.321.500,00
Piutang Pajak Reklame	112.030.700,00		0,00	3.205.000,00	108.825.700,00
PPJU	426.011.043,00	473.390.615,00	0,00	426.011.043,00	473.390.615,00
Piutang Pajak MBLB	601.581.745,00	1.080.200.642,00	0,00	11.000.000,00	1.670.782.387,00
PBB	1.400.354.043,00	559.456.165,00	0,00	97.178.391,00	1.862.631.817,00
Piutang BPHTB	51.833.050,00	14.337.000,00	0,00		66.170.050,00
Jumlah	2.613.344.581,00	2.127.384.422,00	0,00	537.394.434,00	4.203.334.569,00

Nilai piutang pajak Neto per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.83 Piutang Pajak Neto Daerah per 31 Desember 2023

Jenis Piutang	Jumlah Piutang Pajak per 31/12/2023 (Rp)	Penyisihan per 31/12/2023 (Rp)	Piutang Neto (Rp)
Piutang Pajak Hotel	11.212.500,00	11.212.500,00	-
Piutang Pajak Restoran	10.321.500,00	10.321.500,00	-
Piutang Pajak Reklame	108.825.700,00	91.941.012,50	16.884.687,50
Piutang Pajak PPJU	473.390.615,00	2.366.953,08	471.023.661,92
Piutang Pajak MBLB	1.670.782.387,00	576.012.760,20	1.094.769.626,80
Piutang Pajak PBB	1.862.631.817,00	594.372.025,23	1.268.259.791,77
Piutang BPHTB	66.170.050,00	31.504.610,00	34.665.440,00
Jumlah	4.203.334.569,00	1.317.731.361,01	2.885.603.207,99

5.3.1.1.10 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi merupakan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan tetapi belum dibayar/disetor ke Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023. Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp562.410.000,00 jika dibandingkan dengan nilai retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp476.910.000,00 naik sebesar Rp85.500.000,00 atau 17,93%.

Tabel 5.84 Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Retribusi	562.410.000,00	476.910.000,00

Piutang Retribusi sebesar Rp562.410.000,00 terdiri dari Piutang atas Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah khusus untuk penyewaan gedung dan bangunan rumah dinas bagi ASN Rp403.400.000,00 yang berlokasi di Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Tabukan Utara dan Kecamatan Tamako. Dan juga Piutang atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa kerja sama pengelolaan Kapal KM Sahandarumang dan 5 Unit Truk antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan pihak ketiga pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp159.010.000,00.

Rincian Piutang Retribusi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.85 Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023

Uraian	Piutang Retribusi	Penyisihan	Piutang Retribusi Neto
	per 31 Desember 2023	per 31 Desember 2023	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	403.400.000,00	160.046.750,00	243.353.250,00
Piutang Retribusi Sewa Kendaraan	159.010.000,00	159.010.000,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	562.410.000,00	319.056.750,00	243.353.250,00

5.3.1.1.11 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank SulutGo Nomor 01 Tanggal 05 Februari Tahun 2024 per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.880.059.799,00 yang merupakan pendapatan dividen jika dibandingkan per Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.86 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.880.059.799,00	-

5.3.1.1.12 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.088.410.215,00 jika dibandingkan dengan piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.882.526.050,96 mengalami kenaikan sebesar Rp205.884.164,04 atau 10,94%. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.87 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Piutang BLUD (Piutang Pasien RS Liun Kendage)	2.088.410.215,00	1.881.847.859,00
2	Piutang Remunerasi Dana Traster (TDF)	0,00	678.191,96
	Jumlah	2.088.410.215,00	1.882.526.050,96

Rincian nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah neto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.88 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Neto per 31 Desember 2023

Jenis Piutang	Jumlah Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan 31 Desember 2023 (Rp)	Piutang Neto 31 Desember 2023 (Rp)
Piutang BLUD (Piutang Pasien RS Linn Kendage)	2.088.410.215,00	1.943.665.597,42	144.744.617,58
Jumlah	2.088.410.215,00	1.943.665.597,42	144.744.617,58

5.3.1.1.13 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.610.633.553,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp11.468.952.470,00 mengalami kenaikan sebesar Rp141.681.083,00 atau 1,24%.

Tabel 5.89 Piutang Transfer antar Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Transfer Antar Daerah	11.610.633.553,00	11.468.952.470,00

Dasar pengakuan Piutang adalah karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 145 Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023 sehingga terdapat hak Pemerintah Daerah yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan per 31 Desember 2023. Penyisihan Piutang Transfer antar Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.90 Piutang Transfer antar Daerah per 31 Desember 2023

NO	Uraian	Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)	Piutang Neto Per 31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.024.723.780,00	10.123.618,90	2.014.600.161,10	
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	992.266.610,00	4.961.333,05	987.305.276,95	
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.464.719.601,00	37.323.598,01	7.427.396.002,99	
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	71.398.124,00	356.990,62	71.041.133,38	
5	Pajak Rokok	1.057.525.438,00	5.287.627,19	1.052.237.810,81	
	Jumlah	11.610.633.553,00	58.053.167,77	11.552.580.385,23	

5.3.1.1.14 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.892.316.270,63 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp3.895.816.270,63 mengalami penurunan sebesar Rp3.500.000,00 atau 0,09%.

Tabel 5.91 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3.892.316.270,63	3.895.816.270,63

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi terdiri atas:

1. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kepada Bendahara;
2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Tabel 5.92 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023

NO.	Uraian	Saldo Awal 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	BL Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kepada Bendahara	1.179.398.358,63	0,00	-	1.179.398.358,63
2	BL Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara	2.716.417.912,00	0,00	3.500.000,00	2.712.917.912,00
	Jumlah	3.895.816.270,63	-	3.500.000,00	3.892.316.270,63

Pengurangan nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah setoran Pendapatan Tuntutan Kerugian Daerah yang diterima di Tahun 2023 sebagai tindak lanjut penetapan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak total sebesar Rp3.500.000,00 yang terdiri dari setoran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebesar Rp3.500.000,00. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.93 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto per 31 Desember 2023

Jenis Piutang	Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023	Piutang Neto Per 31 Desember 2023	Ket
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kepada Bendahara	1.179.398.358,63	(1.179.398.358,63)	0,00	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kepada PNS Bukan Bendahara	2.712.917.912,00	(2.712.917.912,00)	0,00	
Jumlah	3.892.316.270,63	(3.892.316.270,63)	0,00	

5.3.1.1.15 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.578.220.491,40 dan Rp3.350.018.651,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.228.201.840,40 atau 36,66% yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.94 Rincian Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pengelolaan BLUD Lainnya	4.496.982.700,00	3.325.884.851,00
2	Piutang pada Pihak Ketiga	24.133.800,00	24.133.800,00
3	Uang Muka	57.103.991,40	0,00
	Jumlah	4.578.220.491,40	3.350.018.651,00

Piutang Pengelolaan BLUD Lainnya sebesar Rp4.496.982.700,00 adalah sebagai berikut.

1. Permohonan pembayaran klaim pasien dari RSD Liun Kendage kepada BPJS:
 - a. Terhadap klaim Kegiatan Operasional BLUD Tahun 2023 Rp3.953.773.800,00;
 - b. Terhadap klaim Kegiatan Operasional BLUD Tahun 2023 Rp60.300.900,00;
 - c. Terhadap klaim Kegiatan Operasional BLUD Tahun 2023 Rp102.576.500,00; dan
 - d. Terhadap klaim Kegiatan Operasional BLUD Tahun 2023 Rp121.879.500,00.
2. Permohonan pembayaran klaim pasien dari RSUD Liun Paduli kepada BPJS Tahun 2023 Rp251.192.000,00.
3. Piutang Kerjasama Fotokopi dan RSD Liun Kendage sebesar Rp1.000.000,00 adalah bagian dari hak RSD Liun Kendage yang belum diterima sampai dengan tahun anggaran berakhir 31 Desember 2023.
4. Piutang Pendapatan Air sebesar Rp345.000,00 sesuai PKS dengan usaha kantin dan fotocopy pada RS Liun Kendage Tahuna.
5. Piutang Pendapatan Air sebesar Rp5.915.000,00 sesuai PKS dengan Kimia Farma dan RS Liun Kendage Tahuna.

Piutang pada Pihak Ketiga sebesar Rp24.133.800,00 adalah Pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan poros IKK Tabukan Selatan tertata pada DPA Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh CV. Kicau Fajartama pada tahun 2016 dengan nilai kontrak awal sebesar Rp585.642.000,00 diubah dengan nilai amandemen sebesar Rp378.940.000,00 namun terbayarkan sebesar Rp403.073.800,00 sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran yang diakui sebagai Piutang pada CV. Kicau Fajartama sebesar Rp24.133.800,00. Kelebihan pembayaran paket pekerjaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan poros IKK Tabukan Selatan Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan penyetoran sesuai dengan STS pada tanggal 11 Januari 2024. Rincian dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.95 Rincian Piutang Lainnya Neto per 31 Desember 2023

Jenis Piutang	Jumlah Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan 31 Desember 2023 (Rp)	Piutang Neto 31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pengelolaan BLUD Lainnya	4.496.982.700,00	91.112.579,00	4.405.870.121,00
Piutang pada Pihak Ketiga	24.133.800,00	24.133.800,00	0,00
Uang Muka	57.103.991,40	-	57.103.991,40
Jumlah	4.578.220.491,40	115.246.379,00	4.462.974.112,40

5.3.1.1.16 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar -Rp7.655.469.824,85 dan -Rp6.517.489.891,44 hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar -Rp1.137.979.933,41 atau 17,46% yang terdiri dari :

Tabel 5.96 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

NO	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak	(1.317.731.361,02)	(834.567.437,49)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(319.056.750,00)	(368.250.500,00)
3	Penyisihan Piutang Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden)	(9.400.298,99)	-
3	Penyisihan Lain-Lain PAD yang Sah	(1.943.665.597,42)	(1.721.762.432,20)
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(58.053.167,79)	(57.344.762,36)
5	Bagian lancar TGR	(3.892.316.270,63)	(3.461.711.056,13)
6	Penyisihan Piutang lainnya	(115.246.379,00)	(73.853.703,26)
	Jumlah	(7.655.469.824,85)	(6.517.489.891,44)

5.3.1.1.17 Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar Rp1.250.000,00 maka terdapat penurunan sebesar 100%. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.97 Beban di Bayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

		per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	0,00	1.250.000,00

5.3.1.1.18 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam pencatatan Persediaan adalah periodik, metode periodik dilaksanakan dengan menggunakan stock opname. Berdasarkan stock opname posisi tanggal

31 Desember 2023 terdapat nilai Persediaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp12.655.807.356,24.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, stock opname tahun 2023 telah dilakukan sendiri oleh OPD pada akhir tahun 2023. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian entitas, namun tetap dalam pemantauan Bidang Akuntansi dan setiap bulan enam bulan dilakukan Pemeriksaan terhadap stock opname Persediaan.

Berdasarkan hasil stock opname barang Persediaan per 31 Desember 2023 terdapat saldo sebesar Rp12.655.807.356,24 dibandingkan dengan Tahun 2022, persediaan mengalami penurunan sedangkan jumlah persediaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.39.270.900.952,61.

Tabel 5.98 Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Persediaan	12.655.807.356,24	39.270.900.952,61

Jumlah persediaan tersebut diatas dapat lihat berdasarkan OPD sebagai berikut.

Tabel 5.99 Persediaan pada OPD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

NO	SKPD/UNIT KERJA	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	11.262.900,00	10.705.175,00
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	5.424.955.786,00	4.354.419.519,00
3	DINAS KESEHATAN DAERAH BTT	395.627.275,00	1.262.927.849,00
4	DINAS KESEHATAN DAERAH (COVID-19)	58.650.000,00	68.965.400,00
5	PUSKESMAS TAHUNA TIMUR	107.425.658,00	87.626.089,18
6	PUSKESMAS MANGANITU	102.690.959,00	149.838.727,34
7	PUSKESMAS SILOAM TAMAKO	114.783.296,00	130.822.184,94
8	PUSKESMAS DAGHO	39.675.120,55	48.038.177,39
9	PUSKESMAS MANALU	113.725.129,00	89.969.178,23
10	PUSKESMAS KUMA	114.662.131,00	136.023.079,42
11	PUSKESMAS ENEMAWIRA	75.343.183,90	107.418.812,34
12	PUSKESMAS KALASUGE	42.325.383,00	67.765.345,15
13	PUSKESMAS KENDAHE	108.014.597,00	93.489.288,15
14	PUSKESMAS LAPANGO	122.728.973,20	151.739.983,94
15	PUSKESMAS MARORE	47.214.195,51	55.660.500,87
16	PUSKESMAS NUSA TABUKAN	31.681.947,00	41.047.702,87
17	PUSKESMAS KAHAKITANG	78.102.887,95	74.903.604,39
18	PUSKESMAS PINTARENG	60.870.379,40	73.307.213,99
19	PUSKESMAS SALURANG	75.222.672,51	40.377.684,99
20	PUSKESMAS TAHUNA BARAT	51.856.448,00	76.010.941,05
21	PUSKESMAS MANENTE	121.172.133,00	159.104.100,87
22	RUMAH SAKIT DAERAH LIUN PEDULI	887.231.983,00	1.185.367.125,00
23	RUMAH SAKIT DAERAH LIUN PEDULI BTT	578.849.402,00	896.348.214,00
24	RUMAH SAKIT DAERAH LIUNKENDAGE TAHUNA	1.051.672.655,31	1.061.646.928,37
25	RUMAH SAKIT DAERAH LIUNKENDAGE TAHUNA BTT	15.256.544,40	29.292.745,00
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	1.599.750,00	0
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	328.270.000,00	0
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0	5.242.250.000,00
29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH	0	120.000,00
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	172.746.516,506	269.816.144,13
31	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	2.300.580.150,00	2.319.007.150,00
32	DINAS PERIKANAN DAERAH	2.520.000,00	2.520.000,00
33	DINAS PARIWISATA DAERAH	1.311.800,00	2.656.000,00
34	DINAS PERTANIAN DAERAH	9.000.000,00	20.964.977.000,00
40	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0	270.000,00
43	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	700.000,00
44	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	0	2.874.450,00
45	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.595.500,00	945.000,00
49	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	4.536.000,00	8.215.638,00
90	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.646.000,00	3.734.000,00
	JUMLAH TOTAL	12.655.807.356,24	39.270.900.952,61

Jumlah persediaan tersebut diatas dapat diuraikan berdasarkan jenis persediaan yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.100 Rincian Persediaan per 31 Desember 2023

NO	Jenis Persediaan	Jumlah Rekapitan Tahun 2023 (Rp)	Jumlah Rekapitan Tahun 2022 (Rp)
I	Barang Pakai Habis		
	1. Persediaan Alat Tulis	22.937.700,00	8.129.413,00
	2. Persediaan Kertas dan Cover	21.704.300,00	12.845.850,00
	3. Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan	255.000,00	-
	4. Persediaan Alat Listrik	12.681.000,00	6.022.000,00
	5. Persediaan Benda Pos	1.210.000,00	120.000,00
	6. Persediaan Perabot Kantor	3.792.500,00	1.859.000,00
	7. Persediaan Perabot Kantor (BLUD)	1.398.000,00	2.330.496,00
	8. Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas (BLUD)	613.600,00	1.185.900,00
	9. Persediaan Belanja Cetak	181.893.808,51	205.843.754,13
	10. Persediaan Blanko KTP-Elektronik	14.448.258,00	104.327.390,00
	Jumlah (1 s.d 10)	260.934.166,51	342.663.803,13
II	Bahan Material		
	11. Persediaan Bahan Kimia	9.000.000,00	9.000.000,00
	12. Persediaan Bahan Makanan Pokok (Hibah 2022)	-	50.364.569,12
	13. Persediaan Bahan Makanan Pokok (BLUD)	8.655.942,25	6.987.250,00
	Jumlah (11 s.d 13)	17.655.942,25	66.351.819,12
II	Bahan Material Obat-obatan dan Pakai Habis / Bahan Medis		
	14. Persediaan Bahan Obat-obatan BLUD	614.464.593,35	770.020.157,46
	15. Persediaan Bahan Habis Pakai BLUD	292.412.311,36	276.173.124,91
	16. Persediaan Bahan Obat-obatan	2.997.500.214,51	3.560.201.766,00
	17. Persediaan Bahan Obat-obatan (Kapitasi)	500.107.945,50	440.399.351,00
	18. Persediaan Bahan Habis Pakai	4.151.516.490,36	2.827.200.147,00
	19. Persediaan Bahan Habis Pakai (Kapitasi)	127.590.571,00	249.713.426,00
	20. Persediaan Bahan Medis Habis Pakai (Hibah kementerian Kesehatan)	34.555.750,00	377.370.000,00
	Jumlah (14 s.d 20)	8.718.147.876,08	8.501.077.972,37
III	Persediaan Barang Lainnya		
	21. Persediaan Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat	2.610.686.150,00	28.480.643.150,00
	Jumlah (21)	2.610.686.150,00	28.480.643.150,00
IV	Bahan Persediaan Belanja Tak Terduga		
	22. Persediaan Obat-obatan (Dinas Kesehatan)	49.134.150,00	97.835.400,00
	23. Persediaan Obat-obatan (RSU Liung Paduli)	-	98.815.880,00
	24. Persediaan Habis Pakai (Dinas Kesehatan)	346.493.125,00	787.722.449,00
	25. Persediaan Habis Pakai (Liung Paduli)	578.849.402,00	797.532.334,00
	26. Persediaan Habis Pakai (Liun Kendage)	15.256.544,40	29.292.745,00
	Jumlah (22 s.d 26)	989.733.221,40	1.811.198.808,00
V	Bahan Persediaan COVID-19		
	27. Persediaan Habis Pakai (Dinas Kesehatan)	58.650.000,00	5.016.000,00
	28. Persediaan Habis Pakai	-	63.949.400,00
	Jumlah (27 s.d 28)	58.650.000,00	68.965.400,00
	Jumlah	12.655.807.356,24	39.270.900.952,62

Berdasarkan surat nomor 800/27/118/DPPKB dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat yang belum diserahkan hingga 31 Desember 2023 yaitu Penyaluran BKB Kit Stunting belum semuanya tersalurkan pada penerima yaitu kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) karena situasi dan kondisi politik persiapan Pemilu Serentak dibulan Februari 2024. Namun pada bulan Maret 2024 sudah ada

10 (sepuluh) Paket BKB Kit Stunting jadi total yang sudah diserahkan sejumlah 17 (tujuh belas) paket kepada penerima yaitu Kelompok Bina Balita (BKB) sesuai SK Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 68 Tahun 2023 tentang penerima Bina Keluarga Balita Kit Stunting Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 dan sisanya sementara dalam proses penyaluran.

Untuk persediaan barang tak terduga pada RSUD Liun Kendage yaitu persediaan BMHP dan Obat-obatan yang bersumber dari dana BTT tahun 2020 berjumlah Rp15.256.544 yang terdiri dari Universal Kit dan Anti bakteri pembunuh kuman Lysoli 100ml untuk universal kit yang digunakan oleh petugas kesehatan pada saat melakukan operasi, sedangkan untuk anti bakteri /pembunuh kuman adalah cairan yang digunakan untuk desinfektan ruangan yang digunakan untuk mensterilkan ruangan pasien Covid 19 jadi penggunaannya terbatas sesuai dengan kasus pada pasien yang menderita penyakit menular. Sehingga per 31 Desember 2023 masih tersisa karena sudah tidak ada lagi pasien COVID 19.

Untuk persediaan barang tak terduga pada RSUD Liung Paduli per 31 Desember 2023 masih terdapat persediaan dikarenakan rumah sakit umum Liung Paduli sudah tidak merawat pasien penderita Covid 19. Untuk menghindari sisa persediaan rusak atau kadaluwarsa walaupun tidak ada pasien penderita Covid 19, barang tersebut tetap digunakan petugas kesehatan untuk melayani pasien dengan penyakit menular lainnya pada RSUD Liung Paduli.

Pada Dinas Kesehatan dan ada beberapa Puskesmas lain yaitu seperti Puskesmas Manganitu, Puskesmas Enemawira, Puskesmas Marore, Puskesmas, Kendahe, Puskesmas Pintareng, Puskesmas Dagho, Puskesmas Nusa dan Puskesmas Kalasuge terdapat persediaan obat-obatan dan barang medis habis pakai yang rusak atau kadaluarsa di tahun 2023. Selain itu terdapat 11 (sebelas) puskesmas juga yang sudah membuat Berita Acara Pemusnahan obat dan bahan medis habis pakai ditahun yaitu Puskesmas Lapango, Puskesmas Tahuna Barat, Puskesmas Manalu, Puskesmas Tona, Puskesmas Marore, Puskesmas Manente, Puskesmas Salurang, Puskesmas Kuma, Puskesmas Kahakitang, Puskesmas Tamako dan RSD Liung Paduli Jumlah Persediaan obat rusak atau kadaluarsa dapat dilihat pada lampiran.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.358.793.545,80 Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp14.511.892.094,38 mengalami penurunan sebesar Rp153.098.548,58 atau 1,05% sebagai berikut.

Tabel 5.101 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	14,358,793,545.80	14,511,892,094.38

Rincian saldo Investasi Jangka Panjang untuk Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.102 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo (Rp)	Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (Rp)
2022				
1	Dana Bergulir	644.100.000,00	(644.100.000,00)	0,00
2	Investasi Permanen	14.511.892.094,38	-	14.511.892.094,38
	Jumlah	15.155.992.094,38	(644.100.000,00)	14.511.892.094,38
2023				
3	Dana Bergulir	644.100.000,00	(644.100.000,00)	0,00
4	Investasi Permanen	14.358.793.545,80	-	14.358.793.545,80
	Jumlah	15.002.893.545,80	(644.100.000,00)	14.358.793.545,80

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp644.100.000,00 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp644.100.000,00 tidak naik atau turun.

Tabel 5.103 Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dana Bergulir	644.100.000,00	644.100.000,00

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp644.100.000,00 sama dengan 31 Desember 2022. Dana bergulir diberikan kepada koperasi dan UMKM serta perorangan dari tahun 2006 sampai dengan 2008 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104 Rincian Dana Bergulir

NO.	Tahun	Jumlah (Rp)
1	Tahun 2006	250.000.000,00
2	Tahun 2007	630.000.000,00
3	Tahun 2008	550.000.000,00
	Jumlah	1.430.000.000,00

Nilai perolehan awal dana bergulir ini berjumlah Rp1.430.000.000,00 dan selang tahun 2007 sampai dengan tahun 2023 telah disetor sebesar Rp792.400.000,00 dan di tahun 2022 tidak ada penerimaan setoran Dana Bergulir sebagaimana rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Perhitungan Dana Bergulir Tahun 2006 - 2023

No	Tahun	Jumlah Awal Dana Bergulir (Rp)	Jumlah Penerimaan Setoran (Rp)	Koreksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2006	250.000.000,00	0,00	0,00	
2	2007	630.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
3	2008	550.000.000,00	54.300.000,00	0,00	
3	2009	0,00	118.800.000,00	0,00	
4	2010	0,00	105.700.000,00	0,00	
5	2011	0,00	120.600.000,00	0,00	
6	2012	0,00	109.100.000,00	0,00	
7	2013	0,00	97.400.000,00	0,00	
8	2014	0,00	79.600.000,00	0,00	
9	2015	0,00	34.300.000,00	0,00	
10	2016	0,00	21.500.000,00	4.000.000,00	
11	2017	0,00	12.100.000,00	2.500.000,00	
12	2018	0,00	3.500.000,00	0,00	
13	2019	0,00	5.500.000,00	0,00	
14	2020	0,00	2.000.000,00	0,00	
15	2021	0,00	13.000.000,00	0,00	
16	2022	0,00	4.500.000,00	0,00	
17	2023	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah	1.430.000.000,00	792.400.000,00	6.500.000,00	644.100.000,00

Nilai Investasi Non Permanen yang disajikan adalah sesuai dengan Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu nilai bersih setelah dikurangi penyisihan dengan menggunakan Analisis Umur Dana Bergulir (*Aging Schedule*)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih dan Macet sebagai pengurang nilai investasi non permanen tersebut tidak berarti dihapuskan secara mutlak (dihapustagihkan) melainkan baru dihapusbukukan sehingga tetap dipantau dan diupayakan penagihannya.

5.3.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. Dimana di Tahun 2023 terdapat penyisihan Dana bergulir sebesar -Rp644.100.000,00

Tabel 5.106 Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo (Rp)	Penyisihan (Rp)	Net Realizable Value (Rp)
	Penyisihan Dana Bergulir	644.100.000,00	644.100.000,00	0,00

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.358.793.545,80 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp14.511.892.094,38 terjadi penurunan sebesar Rp153.098.548,58 atau 1,05% sebagai berikut.

Tabel 5.107 Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Permanen	14,358,793,545.80	14,511,892,094.38

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp14.358.793.545,80 dan Rp14.511.892.094,38 yang dapat dilihat pada rincian berikut.

Tabel 5.108 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	PT. PPSU Manado	250,000,000.00	250,000,000.00
2	PT. Bank SulutGo	11,848,300,000.00	11,848,300,000.00
3	PDAM Kab. Kepl. Sangihe	2,260,493,545.80	2,413,592,094.38
4	PD. Pembangunan Bersatu	-	0,00
	Jumlah	14,358,793,545.80	14,511,892,094.38

Penjelasan selengkapnya mengenai investasi permanen adalah sebagai berikut:

- 1) PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT. PPSU)
Berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara Ir.Jullesses Eddy Kenap, MM Nomor: 03/Direksi/PT.PPSU/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal konfirmasi saham untuk posisi sampai dengan 31 Desember 2022 pada PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU) bahwa didasarkan pada Akte Keputusan RUPS masih dalam proses. Sesuai Akte Notaris Eddy F Sarapung, SH, MH Nomor 5 tanggal 8 Oktober 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-064454.AH01.02 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alamat Kelurahan Soataloara 1 Kecamatan Tahuna Kab.Kepl, Sangihe 95613 tercatat memiliki saham kepemilikan 0,31%, sebesar 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp500.000,00 per lembar sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp250.000.000,00, menggunakan metode biaya (*Cost Method*).
- 2) PT. Bank SulutGo
Sesuai Surat Bank Sulut Cabang Tahuna Nomor : 040/A/THN/ I/2024 tanggal 26 Januari 2024 Perihal Konfirmasi data Penyertaan Modal, dimana jumlah saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di PT. Bank SulutGo per 31 Desember 2023 sebanyak 118.483 lembar saham dengan nominal Rp11.848.300.000,00 dan komposisi kepemilikan sebesar 0,94%. Di Tahun 2024 komposisi saham Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami delusi seiring dengan penyeteroran saham dari pemegang saham dari 1,08% menjadi 0,94%. Dan untuk Pencatatan Investasi pada Bank Sulut menggunakan *cost method*.
- 3) PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe
Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai berdasarkan PSAP 06 (Revisi 2016) tentang Akuntansi Investasi yaitu menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.109 Perhitungan Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Per 31 Desember 2023

Nilai Penyertaan Modal Pemda sampai dengan Tahun 2022 (Audited)	Rp	16,387,233,646.38
Terdiri dari :		
- Total Investasi Pemerintah Daerah	Rp	10,637,010,254.27
- Penambahan Penyertaan Modal berdasarkan BA Rekonsiliasi No. BA-763/WBP.12?KP.10/2017	Rp	<u>5,750,223,392.11</u>
Mutasi Pencatatan Penyertaan Modal :		
a. Pemda Sitaro	Rp	1,238,389,316.00
b. Pemda Talaud	Rp	<u>1,753,409,907.00</u>
		<u>Rp 2,991,799,223.00</u>
Nilai Penyertaan Modal awal Pemda setelah penyerahan	Rp	13,395,434,423.38
Nilai Penyertaan Modal sesuai metode Ekuitas		
Laba/(Rugi) PDAM Kab. Kepl. Sangihe		
a. Laba/(Rugi) s.d. Tahun 2022	Rp	(10,981,842,329.00)
b. Rugi Tahun 2023 (Unaudited)	Rp	<u>(153,098,548.58)</u>
		<u>Rp (11,134,940,877.58)</u>
Nilai Penyertaan Modal Pemda per 31 Desember 2023	Rp	2,260,493,545.80

Sumber Data : Laporan Keuangan PDAM Tahun 2023 (Unaudited)

Berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

- Nilai Penyertaan Modal Pemerintah sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar Rp16.387.010.233.646,38;
- Mutasi pencatatan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro sebesar Rp1.238.389.316,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 01/BA/PDAM/2016 Tgl 5 Januari 2016 dan mutasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud sebesar Rp1.753.409.907,00 dengan Berita Acara Nomor 02/BA/PDAM/2016 tgl 11 Januari 2016;
- Rugi PDAM sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp11.134.940.877,58. Saldo tersebut terdiri dari Rugi sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp10.981.842.329,00; ditambah dengan Rugi Tahun 2023 sebesar Rp153.098.548,58;
- Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada PDAM Sangihe per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.260.439.545,80;

Laporan Keuangan PDAM Tahun 2023 telah dilakukan Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si.Ak dan rekan, namun sampai tanggal 31 Mei 2024 belum menerima Laporan Keuangan Audited.

4) PD. Pembangunan Bersatu

Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu dan Akta Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 240 tanggal 28 November 2012.

Namun dalam keberadaannya PD Pembangunan Bersatu mengalami permasalahan peralihan kepengurusan serta periodisasi kepengurusan yang telah berakhir yang sudah dijelaskan melalui Surat Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 04/Ekon/I/2024 Tanggal 24 Januari 2024, dimana sejak Tahun 2016 sampai dengan saat ini PD Pembangunan Bersatu sudah tidak aktif beroperasi. Sehingga PD Pembangunan Bersatu tidak menyampaikan laporan keuangan Tahun 2023 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

5.3.1.3 Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2023 per 31 Desember 2023 dan 2022 memiliki aset tetap sebesar Rp1.531.165.121.223,73 dan Rp1.551.283.200.354,25 turun sebesar Rp20.118.079.130,52 atau 1,30% yang dapat di uraikan sebagai berikut:

Tabel 5.110 Mutasi Aset Tetap Tahun 2023

	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap	2,450,781,900,192.20	117,854,995,126.98	36,686,677,273.88	2,531,950,218,045.30
Akumulasi Penyusutan	(899,498,699,838.48)	(120,493,812,286.52)	(19,207,415,303.43)	(1,000,785,096,821.57)
Jumlah	1,551,283,200,353.72	(2,638,817,159.54)	17,479,261,970.45	1,531,165,121,223.73

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan dan apabila penilaian atas aset tetap tidak memungkinkan maka nilai aset ditentukan sesuai nilai wajar pada saat perolehan aset tetap yaitu sesuai dengan biaya perolehannya.

5.3.1.3.1 Tanah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki aset tetap tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp147.184.169.536,64 dan Rp147.086.829.337,64 naik sebesar Rp97.340.199,00 atau 0.07% yang dapat di uraikan sebagai berikut.

Tabel 5.111 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023

	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	147.086.829.337,64	97.340.200,00	1,00	147.184.169.536,64

Penambahan nilai aset tanah sebesar Rp97.340.200,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima hibah Aset berupa Tanah untuk bangunan Kesehatan dari Masyarakat kampung Talawid sesuai berita acara serah terima hibah sebesar Rp2.470.200,00;
- 2) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima hibah Aset berupa Tanah untuk bangunan Kesehatan dari Masyarakat kampung Tariang Lama sesuai berita acara serah terima sebesar Rp120.000,00;
- 3) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima hibah Aset berupa Tanah untuk bangunan Kesehatan dari Masyarakat kampung Kauhis sesuai surat pernyataan pelepasan hak sebesar Rp250.000,00;
- 4) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima hibah Aset berupa Tanah untuk bangunan Kesehatan dari Masyarakat kampung Bahu sesuai berita acara pelepasan hak sebesar Rp15.000.000,00;
- 5) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima hibah Aset berupa Tanah untuk bangunan Kesehatan dari Masyarakat kampung Kauhis sesuai surat pernyataan pelepasan hak sebesar Rp45.000.000,00;

- 6) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima hibah Aset berupa Tanah untuk bangunan Kesehatan dari Masyarakat kampung Kulur II sesuai berita acara serah terima hibah sebesar Rp2.500.000,00;
- 7) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima hibah Aset berupa Tanah untuk bangunan Kesehatan dari Masyarakat kampung malisade sesuai berita acara serah terima hibah sebesar Rp7.000.000,00; dan
- 8) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima hibah Aset berupa Tanah untuk bangunan Kesehatan dari Masyarakat kampung sowaeng sesuai berita acara serah terima hibah sebesar Rp25.000.000,00.

Pengurangan nilai aset tanah sebesar Rp1,00 karena terdapat koreksi saldo awal yang disebabkan oleh pembulatan angka desimal.

Selain penjelasan di atas, terdapat 4 (empat) bidang aset tanah yang belum memiliki luasan, karena belum di sertifikat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.112 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023

Jenis/ Nama Barang	Kode barang & Register	Tahun Pengadaan	Lokasi	Harga	UPB
Tanah Untuk Jalan Kabupaten	01.01.03.07.003.000001	2016	Kel. Santiago Kec. Tahuna	1.300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006.000011	2023	Kpg. Tariang Lama, Kec. Kendahe	120.000,00	Dinas Kesehatan
Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006.000011	2023	Kpg. Tariang Baru, Kec. Kendahe	15.000.000,00	Dinas Kesehatan
Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.01.01.04.002.000002	2022	Kpg. Hesang Lindongan I, Kec. Tamako	3.500.000,00	Dinas Pendidikan

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp456.989.839.692,12 dan Rp445.658.559.777,45 naik sebesar Rp11.331.279.914,64 atau 2,54% yang dapat di uraikan sebagai berikut.

Tabel 5.113 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023

	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin	445,658,559,777.45	33,322,687,721.59	21,991,607,806.92	456,989,639,692.12

Penambahan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp33.332.887.721,59 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Realiasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.990.770.289,00;
- 2) Pemerintah daerah menerima Hibah barang milik Negara dari Kementerian Perhubungan berupa 1 (satu) unit Bus ukuran sedang dan 1 (satu) unit bus sekolah ukuran kecil sesuai dengan BAST Nomor PL.301/04/8.A/AJ/VIII/2022 dan nomor 550/28/2258 pada Dinas Perhubungan Daerah sebesar Rp1.161.380.110,00;
- 3) Pemerintah daerah menerima Hibah barang milik Negara dari Perpustakaan Nasional berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) sesuai dengan BAST

Nomor 4726/4.2/PLK.03.03/X.2023 kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp523.710.000,00;

- 4) Pemerintah daerah menerima Hibah barang milik Negara dari Perpustakaan Nasional berupa 1 (satu) unit Smart TV dan Branket sesuai dengan BAST Nomor 4726/4.2/PLK.03.03/X.2023 kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp5.000.000,00;
- 5) Pemerintah daerah menerima Hibah barang milik Negara dari Perpustakaan Nasional berupa 1 (satu) unit UPS BVX sesuai dengan BAST Nomor 4726/4.2/PLK.03.03/X.2023 kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp2.214.500,00;
- 6) Pemerintah daerah menerima Hibah barang milik Negara dari Perpustakaan Nasional berupa 1 (satu) unit Genset sesuai dengan BAST Nomor 4726/4.2/PLK.03.03/X.2023 kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp7.400.000,00;
- 7) Pemerintah daerah menerima Hibah barang milik Negara dari Perpustakaan Nasional berupa 1 (satu) unit Multimedia Speaker sesuai dengan BAST Nomor 4726/4.2/PLK.03.03/X.2023 kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp1.300.000,00;
- 8) Pemerintah daerah menerima Hibah barang milik Negara dari Perpustakaan Nasional berupa 1 (satu) paket DLS (Digital Library Sistem) sesuai dengan BAST Nomor 4726/4.2/PLK.03.03/X.2023 kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp59.610.000,00;
- 9) Pemerintah daerah menerima Hibah barang milik Negara dari Perpustakaan Nasional berupa 4 (empat) unit Tabelt Android sesuai dengan BAST Nomor 4726/4.2/PLK.03.03/X.2023 kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp15.896.000,00;
- 10) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin berupa CCTV pada Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp12.087.900,00;
- 11) Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin berupa Meubelair pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp794.502.055,59;
- 12) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin berupa meubelair dan alat praktik sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp198.047.057,00;
- 13) Reklasifikasi Peralatan personal komputer yang direalisasikan dari belanja bahan komputer Belanja Barang pada Dinas Pariwisata Daerah sebesar Rp2.975.000,00;
- 14) Reklasifikasi Peralatan personal komputer yang direalisasikan dari belanja bahan komputer Belanja Barang pada Kecamatan Tahuna Barat sebesar Rp1.350.000,00;
- 15) Reklasifikasi alat kantor lainnya yang direalisasikan dari belanja bahan lainnya pada Kecamatan Tahuna Timur sebesar Rp1.980.000,00;
- 16) Reklasifikasi personal komputer yang direalisasikan dari belanja bahan komputer pada Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp152.833.310,00;
- 17) Reklasifikasi personal komputer/ peralatan personal komputer yang direalisasikan dari belanja bahan komputer pada Dinas Pendidikan Daerah berupa sebesar Rp82.850.000,00;
- 18) Koreksi pencatatan 1 (satu) unit Laptop Tahun 2022 pada SMP N 1 Tahuna sebesar Rp9.600.000,00;
- 19) Koreksi atas pengadaan software aplikasi tahun 2021 yang direalisasikan pada belanja barang dan jasa ke peralatan jaringan komputer sebesar Rp99.770.000,00; dan
- 20) Kapitalisasi pemeliharaan software aplikasi ke peralatan jaringan komputer sebesar Rp199.411.500,00.

Pengurangan nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.991.607.806,92 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi buku umum dari peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya pada dinas Pendidikan dan kebudayaan daerah sebesar Rp12.288.000,00;
- 2) Koreksi atas meubelair dan alat praktik sekolah yang diserahkan ke sekolah swasta pada dinas Pendidikan dan kebudayaan daerah, direklasifikasi dari meubelair ke beban barang dan jasa sebesar Rp789.839.500,00;
- 3) Reklasifikasi jasa pemasangan internet ke beban barang dan jasa pada dinas Pendidikan dan kebudayaan daerah sebesar Rp500.000,00;
- 4) Penghapusan kendaraan bermotor yang terjual sesuai dengan SK Bupati Kepulauan Sangihe nomor 328/900/Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp1.193.419.316,01;
- 5) Reklasifikasi peralatan dan mesin yang sudah berubah kondisi rusak berat ke Aset Lain-lain sebesar Rp19.445.356.020,32;
- 6) Koreksi Aset Tetap yang bernilai dibawah batas Kapitalisasi (*Ekstracomptable*) sebesar Rp550.204.970,38; dan
- 7) Koreksi saldo awal yang disebabkan oleh pembulatan angka desimal sebesar Rp0,21.

Selain mutasi tambah kurang tersebut, terdapat hal-hal yang perlu dijelaskan yaitu:

- 1) Tahun 2010 Pemerintah Daerah menerima hibah 1 (satu) unit kapal eks. KRI Karang Unarang-985 dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Komando Armada RI Kawasan Barat, sesuai BAST nomor BA/30/XI/2013 Tanggal 19 November 2010 dengan harga perkiraan Rp120.000.000.000,00 dan pada tanggal 13 Desember 2010 pemerintah mengadakan perjanjian Kerjasama operasional dengan PT. Dian Osiania Indonesia untuk pengelolaan kapal tersebut. Namun, hibah ini belum dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena belum ada Naskah hibah dan SK penghapusan dari Kementerian Pertahanan Nasional. Saat ini kapal tersebut berada di Pelabuhan Laut Manado dengan kondisi rusak berat;
- 2) Terdapat tiga software sebesar Rp399.281.500,00 yang diklasifikasikan sebagai peralatan jaringan komputer karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum mengatur masa manfaat dan metode amortisasi.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp724.612.863.334,22 dan Rp704.163.559.209,22 naik sebesar Rp20.449.304.125,00 atau 2.90% yang dapat di uraikan sebagai berikut .

Tabel 5.114 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023

	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Gedung dan Bangunan	704.163.559.209,22	27.274.374.597,00	6.825.070.472,00	724.612.863.334,22

Penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp27.274.374.597,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.139.374.597,00

- 2) Pemerintah Daerah menerima hibah berupa Bangunan Rumah Dinas Camat dari masyarakat Kampung Nipa pada Kecamatan Nusa Tabukan sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 641/59/01 tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp135.000.000,00

Pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.825.070.472,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin berupa Meubelair pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp794.502.055,59;
- 2) Koreksi atas pembangunan gedung sekolah yang diserahkan ke sekolah swasta, reklasifikasi bangunan tempat Pendidikan ke Beban Diserahkan pada Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp3.116.854.009,00;
- 3) Bangunan Kesehatan pada Rumah Sakit Liun Kendage yang belum selesai pengerjaannya di tahun 2023, sehingga belum dapat digunakan direklasifikasi sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.530.523.000,00;
- 4) Perencanaan bangunan Kantor Perpustakaan Daerah untuk rencana Pembangunan tahun 2024, sehingga direklasifikasi sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp85.600.580,00;
- 5) Penghapusan Bangunan tempat pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sesuai SK Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 321/900/Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp741.336.000,00;
- 6) Penghapusan Fasilitas umum pada Dinas Kesehatan Daerah sesuai SK Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 272/900 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp17.817.045,80;
- 7) Penghapusan bangunan apotik rumah sakit umum pada Dinas Kesehatan Daerah sesuai SK Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 271/900 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp183.000.000,00;
- 8) Reklasifikasi Gedung dan Bangunan yang berubah kondisi rusak berat ke Aset Lain-lain sebesar Rp355.437.781,30; dan
- 9) Koreksi saldo awal yang disebabkan oleh pembulatan angka desimal sebesar Rp0,31.

Sesuai PSAP Nomor 17 tentang Properti investasi maka pemerintah daerah, memiliki beberapa Aset tetap Gedung dan Bangunan yang dijadikan sebagai Properti Investasi, untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Tabel 5.115 Daftar Aset Tetap Properti Investasi

Uraian	Kode Barang & Register	Pihak Penyewa	Nilai	OPD Pengguna
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001.000012	Pengusaha/ Penjual	8,227,823,360.90	Dinas Perindustrian dan perdagangan
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001.000034	Pengusaha/ Penjual	31,807,921,000.00	Dinas Perindustrian dan perdagangan
Rumah Khusus	03.01.02.12.003.000001	ASN	28,323,300,918.00	Dinas Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan
Total			68,359,045,278.90	

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.156.669.434.578,77 dan Rp1.116.305.522.488,26 naik sebesar Rp40.363.912.090,51 atau 3.62% yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.116 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.116.305.522.488,26	48.023.776.129,00	7.659.864.038,49	1.156.669.434.578,77

Penambahan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp48.023.776.129,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.345.833.817,00;
- 2) Pemerintah Daerah menerima hibah Pembangkit Listrik Tenaga Surya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp16.677.942.311,00; dan
- 3) Koreksi saldo awal yang disebabkan oleh pembulatan angka desimal sebesar Rp1,00.

Pengurangan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp7.659.864.038,49 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Jalan lokal Kabupaten Ruas Jalan Utaurano-Kedang-Bowongkalaeng-Beha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum selesai pengerjaannya di Tahun 2023, sehingga direklasifikasi sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.638.044.451,39 dan Piutang Lainnya sebesar Rp57.103.991,40.
- 2) Reklasifikasi jaringan listrik pada Sekretariat Daerah dan Dinas Perikanan Daerah yang berubah kondisi rusak berat ke Aset Lain-lain sebesar Rp964.715.595,70

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp23.831.278.521,16 dan Rp23.198.645.109,16 naik sebesar Rp632.633.412,00 atau 2.73% yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.117 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	23.198.645.109,16	842.768.369,00	210.134.957,00	23.831.278.521,16

Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp842.768.369,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp795.435.169,00;
- 2) Reklasifikasi buku umum yang direalisasikan dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp6.255.000,00;

- 3) Reklasifikasi buku umum dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp12.288.000,00; dan
- 4) Pemerintah Daerah menerima Hibah Barang Milik Negara dari Perpustakaan Nasional berupa satu paket buku kepustakaan sesuai BAST nomor 4726/4.2/PLK.03.03/X.2023 kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp28.790.200,00.

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp210.134.957,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin berupa CCTV pada Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp12.087.900,00; dan
- 2) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin berupa meubelair dan alat praktik sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp198.047.057,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap dalam proses pembangunan yang sampai pada tanggal 31 Desember 2023 belum selesai dikerjakan/dibangun. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp22.662.832.382,39 dan Rp14.368.784.271,00 naik sebesar Rp8.294.048.111,39 atau 57,72% yang dapat di uraikan sebagai berikut.

Tabel 5.118 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.368.784.271,00	8.294.048.111,39	0,00	22.662.832.382,39

Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.368.784.271,00 merupakan Bangunan Gedung Olahraga yang awal perencanaan dan pembangunannya sejak Tahun 2019. Pada tahun 2020 pekerjaan telah diserahkan tetapi belum dapat difungsikan. Pada tahun 2021 masih belum dilanjutkan pembangunannya karena anggaran untuk pembangunan gedung olahraga di-*refocusing* untuk penanganan COVID 19 dan pada tahun 2023, Pj Bupati Kepulauan Sangihe sudah melakukan tindak lanjut melalui Surat Nomor 400.5.5.3/32/1333 tanggal 31 Mei 2023 kepada Gubernur Sulawesi Utara perihal permohonan rekomendasi pembangunan lanjutan GOR dan Gubernur Sulawesi Utara telah memberikan surat permohonan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia perihal penyelesaian pembangunan gedung olahraga (GOR) Kab. Kepl. Sangihe. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga telah memberikan pernyataan kepada BPKPD bahwa masih akan melanjutkan pembangunan GOR sambil menunggu anggaran dari pemerintah pusat.

Mutasi atas Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2023, dapat dirinci sesuai OPD sebagai berikut:

Tabel 5.119 Rincian Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD Tahun 2023

No	OPD	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Kesehatan					1.530.523.000,00
	Bangunan rumah sakit umum (Gedung kardiovaskular)	0,00	0,00	1.398.859.450,00	0,00	
	Perencanaan Bangunan rumah sakit umum (Gedung kardiovaskular)	0,00	0,00	99.970.000,00	0,00	
	Pengawasan Bangunan rumah sakit umum (Gedung kardiovaskular)	0,00	0,00	31.693.550,00	0,00	
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah					85.600.580,00
	Jasa perencanaan bangunan gedung layanan perpustakaan	0,00	0,00	85.600.580,00	0,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum Daerah					6.677.924.531,39
	Rekonstruksi Ruas Jalan Utaurano-Kedang-Bowongkalaeng-Beha Kec. Tabukan Utara	0,00	0,00	6.582.895.008,60	0,00	
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Utaurano-Kedang-Bowongkalaeng-Beha Kec. Tabukan Utara	0,00	0,00	55.149.442,79	0,00	
	Jasa Perencanaan kantor lurah lesa	0,00	0,00	39.880.080,00	0,00	
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga					14.368.784.270,94
	Perencanaan pembangunan gedung tempat olahraga	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pembangunan Gedung Olahraga	13.653.057.674,00	0,00	0,00	0,00	
	Jasa Konsultasi Perencanaan pembangunan gedung tempat olahraga	99.271.096,94	0,00	0,00	0,00	
	Jasa Konsultasi Pengawasan pembangunan gedung tempat olahraga	381.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Jasa Konsultasi Penelitian pembangunan gedung tempat olahraga	99.555.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Jasa Konsultasi Perencanaan pembangunan gedung tempat olahraga	78.980.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah	14.368.784.270,94	0,00	8.294.048.111,39	0,00	22.662.832.382,33

Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.294.048.111,39 dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Bangunan Kesehatan pada Rumah Sakit Liun Kendage yang belum selesai pengerjaannya di tahun 2023, sehingga belum dapat di gunakan direklasifikasi sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.530.523.000,00;
- 2) Perencanaan bangunan Kantor Perpustakaan Daerah untuk rencana Pembangunan tahun 2024, sehingga direklasifikasi sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp85.600.580,00
- 3) Jalan lokal Kabupaten Ruas Jalan Utaurano-Kedang-Bowongkalaeng-Beha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum selesai pengerjaannya di tahun 2023, sehingga direklasifikasi sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.638.044.451,39; dan
- 4) Jasa perencanaan untuk Pembangunan Gedung Kantor Lurah Lesa Kec. Tahuna Timur tahun 2024 sebesar Rp39.880.080,00.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar -Rp1.000.785.096.821,57

dan -Rp899.498.699.838,48 naik sebesar Rp101.286.396.983,09 atau 11,26% yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.120 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin	(301,544,449,060.76)	(44,241,108,841.27)	(18,551,188,364.64)	(327,234,369,537.38)
Gedung dan Bangunan	(79,521,157,983.01)	(13,628,459,476.00)	(351,795,628.79)	(92,797,821,830.22)
Jalan Irigasi dan Jaringan	(518,433,092,794.72)	(62,624,243,969.26)	(304,431,310.00)	(580,752,905,453.97)
Jumlah	(899,498,699,838.48)	(120,493,812,286.52)	(19,207,415,303.43)	(1,000,785,096,821.57)

Penambahan Nilai akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar -Rp120.493.812.286,52 merupakan beban penyusutan tahun 2023 yang diperoleh dari hasil perhitungan SIMDA BMD,

Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar -Rp19.207.415.303,43 terdiri dari :

- 1) Akumulasi penyusutan yang di reklasifikasi ke asset lain-lain karena berubah kondisi sebesar -Rp17.357.769.048,63
- 2) Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang di reklasifikasi ke asset lain-lain karena berubah kondisi sebesar -Rp117.921.287,00
- 3) Akumulasi penyusutan Jalan Irigasi Jaringan yang di reklasifikasi ke aset lain-lain karena berubah kondisi sebesar -Rp304.431.310,00
- 4) Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang dihapuskan sebesar Rp1.193.419.316,01
- 5) Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebesar -Rp233.874.341,79

5.3.1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan Dana Cadangan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024.

Dana Cadangan di Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui Rekening Bank SulutGO Cabang Tahuna tanggal 31 Desember 2022. Pada Tahun 2023 bertambah sebesar Rp15.000.000.000,00 sehingga total Dana Cadangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp16.000.000.000,00, namun di akhir tahun 2023 pada tanggal 18 Desember 2023 oleh Bank SulutGo Cabang Tahuna di pindahkan ke Rekening Kas Daerah nomor rekening 004.01.12.020000-2 sebagai berikut.

Tabel 5.121 Dana Cadangan Tahun 2023

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dana Cadangan	16.000.000.000,00	1.000.000.000,00

5.3.1.5. Aset Lainnya

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp215.302.597.805,31 dan Rp211.840.623.735,00 naik sebesar Rp3.461.974.068,41 atau 1,63% yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.122 Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Lainnya	215,302,597,805.31	211,840,623,735.90

5.3.1.5.1 Aset Lain-lain

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp364.421.854.915,45 dan Rp347.428.611.752,50 naik sebesar Rp16.993.243.162,95 atau 4,89% yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.123 Aset Lain-lain Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2022 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR 2023 (Rp)
1	Aset yang akan dihibah ke instansi vertikal	721,864,750.00			721,864,750.00
2	Aset yang akan dihibah ke politeknik Nusa Utara	4,496,092,957.90			4,496,092,957.90
3	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat	19,523,646,072.42			19,523,646,072.42
4	Aset yang akan di serahkan ke sekolah swasta	72,929,020,208.91			72,929,020,208.91
5	Aset yang akan di diserahkan ke provinsi	40,831,047,772.00			40,831,047,772.00
6	Koreksi Atas Pembulatan Pencatatan Aset	0.01			0.01
7	Aset yang direklas dari aset tetap	195,101,645,012.77	20,765,509,397.71	5,784,094,551.10	210,083,059,859.38
A	Jumlah Aset Tetap yang direklas ke Aset lain-lain	333,603,316,774.01	20,765,509,397.71	5,784,094,551.10	348,584,731,620.62
9	Piutang TP/TGR belum ada pembebanan	9,630,078,304.49	5,377,946,623.06	569,801,099.72	14,438,223,827.83
10	Piutang Restitusi Pajak	1,398,899,467.00			1,398,899,467.00
11	Dana TDF	2,796,317,207.00	0.00	2,796,317,207.00	0.00
B	Jumlah Aset Lain-lain selain yang berasal dari reklas aset tetap	13,825,294,978.49	5,377,946,623.06	3,366,119,306.72	15,837,123,294.83
	Jumlah A + B	347,428,611,752.50	26,143,456,020.77	9,150,212,857.82	364,421,854,915.45

Penambahan Aset Lainnya Rp26.143.456.020,77 terdiri dari:

- Reklasifikasi aset tetap Peralatan dan Mesin yang berdasarkan hasil inventarisasi 2023 telah berubah kondisi rusak berat/ hilang/ tidak ditemukan sebesar Rp19.445.356.020,71;
- Reklasifikasi aset tetap Gedung dan bangunan yang berdasarkan hasil inventarisasi 2023 telah berubah kondisi rusak berat sebesar Rp355.437.781,30;

- c) Reklasifikasi aset tetap Jaringan yang berdasarkan hasil inventarisasi 2023 telah berubah kondisi rusak berat sebesar Rp964.715.595,70; dan
- d) Penambahan Aset lain-lain Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang belum ada penetapannya atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.377.946.623,06.

Pengurangan sebesar Rp9.150.212.857,82 adalah sebagai berikut:

- a. Penyetoran sebagai tindak lanjut atas Kerugian Daerah dan Koreksi Pencatatan Tahun 2022 sebesar Rp569.801.099,72;
- b. Penghapusan atas Aset lain-lain Peralatan dan Mesin dengan cara di Jual sebesar Rp4.239.654.551,10;
- c. Penghapusan atas Aset lain-lain Gedung dan Bangunan dengan cara di musnahkan sebesar Rp1.544.440.000,00; dan
- d. Dana dalam bentuk non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp2.796.317.207,00, sesuai surat nomor s-542/WBP.30/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Penyampaian Daftar saldo dan Remunerasi serta kebijakan akuntansi TDF transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022.

Penjelasan terhadap nilai saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Aset yang untuk di hibah ke instansi vertikal sebesar Rp721.864.750,00 adalah Aset Tanah yang direncanakan untuk di hibah karena sudah berdiri bangunan milik Komando Distrik Militer, proses hibah masih menunggu surat permohonan hibah sesuai ketentuan dalam Permendagri no 19 Tahun 2016;
- 2. Aset yang akan dihibah ke Politeknik Nusa Utara sebesar Rp4.496.092.957,90 adalah Aset yang sudah diserahkan sesuai BAST nomor 169/D/T/2011, proses hibah masih harus melaksanakan rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah dan Politeknik Nusa Utara karena terdapat perbedaan nilai pencatatan;
- 3. Aset yang akan diserahkan ke Masyarakat Rp19.523.646.072,42 adalah Aset yang diperuntukan pada masyarakat tetapi belum diserahkan karena belum ada Berita Acara Serah Terima;
- 4. Aset yang akan diserahkan ke sekolah swasta sebesar Rp72.929.020.208,91 adalah Aset yang diperuntukan pada swasta, belum diserahkan karena belum ada berita acara serah terima;
- 5. Aset yang akan diserahkan ke Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp 40.831.047.772,00 adalah Jalan yang belum diserahkan karena menunggu SK penetapan jalan kabupaten; dan
- 6. Aset yang direklasifikasi dari Aset tetap sebesar Rp195.101.645.012,77 karena tidak lagi digunakan untuk tugas dan fungsi perangkat daerah karena perubahan kondisi; Rusak Berat sebesar Rp162.675.504.120,00, Hilang sebesar Rp626.272.306,00, tidak ditemukan sebesar Rp31.799.868.587,00.

5.3.1.5.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar -Rp149.119.257.111,14 dan

-Rp135.587.988.016,60 naik sebesar Rp13.531.269.094,54 atau 9,98% yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.124 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 dan Tahun 2022

	URAIAN	SALDO AWAL 2022 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR 2023 (Rp)
	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	(135,587,988,016.60)	(17,780,121,645.64)	(4,248,852,551.10)	(149,119,257,111.14)

Penambahan sebesar -Rp17.780.121.645,64 terdiri dari :

- Akumulasi penyusutan barang rusak berat peralatan dan mesin -Rp17.357.769.048,64;
- Akumulasi penyusutan barang rusak berat gedung dan bangunan -Rp117.921.287,00;
- Akumulasi penyusutan barang rusak berat jalan irigasi dan jaringan -Rp304.431.310,00.

Pengurangan sebesar -Rp4.333.289.419,67 adalah Penghapusan Akumulasi Penyusutan atas Aset lain-lain.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sangihe per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp210.725.304.107,77 dan Rp207.156.714.249,14 mengalami kenaikan sebesar Rp3.568.589.858,63 atau 1,72% sebagai berikut.

Tabel 5.125 Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kewajiban	210.725.304.107,77	207.156.714.249,14

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Kabupaten Kepulauan Sangihe per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp44.604.727.586,77 dan Rp14.194.991.305,14 mengalami kenaikan sebesar Rp30.409.736.281,63 atau 214,23% sebagai berikut.

Tabel 5.126 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	44.604.727.586,77	14.194.991.305,14

Rincian kewajiban jangka pendek dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.127 Rincian Mutasi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL 31/12/2022 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO PER 31/12/2023 (Rp)
1	Utang PFK	11.763.937,00	4.277.600,00	11.763.937,00	4.277.600,00
2	Utang Bunga	-	1.027.034.440,00		1.027.034.440,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	26.800.241.440,00		26.800.241.440,00
4	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	61.411.456,20	2.506.849,32	29.641.929,75	34.276.375,77
5	Utang Belanja	13.934.609.407,00	15.327.113.003,00	12.522.824.679,00	16.738.897.731,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	187.206.504,94		187.206.504,94	0,00
	Jumlah	14.194.991.305,14	43.161.173.332,32	12.751.437.050,69	44.604.727.586,77

5.3.2.1.1 Utang PFK

Utang PFK Kabupaten Kepulauan Sangihe per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.277.600,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp11.763.937,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.486.337,00 atau 63,64% dengan rincian adalah sebagai berikut.

Tabel 5.128 Rincian Mutasi Utang PFK per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL 31/12/2022 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO PER 31/12/2023 (Rp)
1	Utang Pajak Penghasilan Ps 21	436.150,00	2.522.325,00	436.150,00	2.522.325,00
2	Utang Pajak Penghasilan Ps 22	265.607,00	179.687,00	265.607,00	179.687,00
3	Utang Pajak Penghasilan Ps 23	352.000,00	256.320,00	352.000,00	256.320,00
4	Utang Pajak Pertambahan Nilai Pusat	10.710.180,00	1.319.268,00	10.710.180,00	1.319.268,00
	Jumlah	11.763.937,00	4.277.600,00	11.763.937,00	4.277.600,00

Berdasarkan tabel diatas, rincian utang PFK terjadi pada OPD berikut :

- 2) Utang PPh Pasal 21 sebesar Rp2.522.325,00 terdapat pada :
 - a. Puskesmas Manalu sebesar Rp445.000,00;
 - b. Bagian Tata Pemerintahan Setda sebesar Rp1.012.500,00 dan
 - c. Bagian Umum Setda sebesar Rp1.064.825,00.
- 3) Utang PPh Pasal 22 sebesar Rp179.687,00 terdapat pada :
 - a. Puskesmas Manalu sebesar Rp37.243,00;
 - b. Puskesmas Enemawira sebesar Rp47.797,00;
 - c. RSUD Liun Paduli sebesar Rp32.762,00;
 - d. Dinas Kesehatan sebesar Rp40.746,00, dan

- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah sebesar Rp21.139,00
- 4) Utang PPh Pasal 23 sebesar Rp256.320,00 terdapat pada :
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp80.000,00;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp160.000,00; dan
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp16.320,00.
- 5) Utang PPN sebesar Rp1.319.268,00 terdapat pada :
 - a. Puskesmas Manalu sebesar Rp273.117,00;
 - b. Puskesmas Enemawira sebesar Rp350.513,00;
 - c. RSUD Liunpaduli sebesar Rp240.256,00;
 - d. Dinas Kesehatan sebesar Rp298.801,00; dan
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp156.581,00.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Utang Bunga Kabupaten Kepulauan Sangihe per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.027.034.440,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang tidak ada Utang Bunga maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.027.034.440,00 atau 100%.

Tabel 5.129 Rincian Mutasi Utang Bunga per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL 31/12/2022 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO PER 31/12/2023 (Rp)
1	Utang Bunga	-	1.027.034.440,00	-	1.027.034.440,00

Utang Bunga ini adalah Bunga Angsuran Pinjaman Dana PEN yang telah jatuh tempo tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibayarkan pada Tahun 2024.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Sangihe per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.800.241.440,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang tidak ada Bagian Utang Jangka Panjang maka terdapat kenaikan sebesar Rp26.800.241.440,00 atau 100%.

Tabel 5.130 Rincian Mutasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL 31/12/2022 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO PER 31/12/2023 (Rp)
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	26.800.241.440,00	-	26.800.241.440,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang ini adalah Reklasifikasi atas Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2022 yaitu Nilai Pokok Pinjaman Dana PEN sebesar Rp192.961.722.944,00 namun akan Jatuh tempo pada tahun 2024 sebesar Rp26.800.241,40.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 adalah pendapatan atas penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan beberapa Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah berupa Lahan dan Bangunan untuk dijadikan Lokasi tempat mesin ATM dan Kantor Kas PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna. Saldo Pendapatan Sewa diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.276.375,77. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp61.411.456,20 maka mengalami penurunan sebesar Rp27.135.080,43 atau 44,19%. Rincian Pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut.

Tabel 5.131 Rincian Pendapatan Diterima dimuka per 31 Desember 2023

No	Uraian	Periode Sewa	Harga Sewa (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2023 (Rp)	Lokasi
1	PKS No. 003/PE.S/THN/XII/202	8 Desember 2021 - 8 Desember 2024	36.507.000,00	23.582.989,05		12.157.896,90	11.425.092,15	Kantor Bupati
2	PKS No. 002/PE.S/THN/XII/202	8 Desember 2021 - 8 Desember 2024	15.000.000,00	9.689.781,02		4.995.437,95	4.694.343,07	Kantor Bapditbang
3	PKS No. 004/PE.S/THN/XII/202	8 Desember 2021 - 8 Desember 2024	7.500.000,00	4.844.890,51		2.497.718,98	2.347.171,53	Kantor Bupati
4	PKS No. 005/PE.S/THN/XII/202	28 Desember 2021 - 28 Desember 2024	15.000.000,00	9.963.503,65		4.995.437,96	4.968.065,69	PSUD Liundendage
5	PKS No. 800/003a/LS/1/2023	01 Januari 2022 - 31 Desember 2025	7.500.000,00	-	7.500.000,00	4.993.150,68	2.506.849,32	Dinas Pendidikan
6	PKS No. 001/PE.S/THN/VIII/20	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2025	15.000.000,00	13.330.291,97		4.995.437,96	8.334.854,01	Puskemas Mangaritu
	Jumlah		96.507.000,00	61.411.456,20	7.500.000,00	34.635.080,43	34.276.375,77	

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Tahun 2023 sebesar Rp16.738.897.731,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp13.934.609.407,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.804.288.324,00 atau 20,12% yang merupakan Utang atas Belanja Pegawai dan Utang Belanja Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.132 Rincian Mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2023

	Uraian	Saldo Awal 31/12/2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31/12/2023 (Rp)
A	Utang Belanja Pegawai	8.326.081.554,00	9.023.263.406,00	6.914.296.826,00	10.435.048.134,00
B	Utang Belanja Barang dan jasa	5.608.527.853,00	6.303.849.597,00	5.608.527.853,00	6.303.849.597,00
	Jumlah	13.934.609.407,00	15.327.113.003,00	12.522.824.679,00	16.738.897.731,00

Hal-hal yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

- 1) Saldo awal Utang Belanja sebesar Rp13.934.609.407,00 yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai Rp8.326.081.554,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.608.527.853,00;
- 2) Penambahan atas Saldo Utang Belanja atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa Rp15.327.113.003,00, yang terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp9.023.263.406,00 dan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp6.303.849.597,00;
- 3) Pengurangan atas Utang Belanja atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp12.522.824,00 merupakan beban Tahun Anggaran 2022 tetapi telah terbayar di Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp6.914.296.826,00 dan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp5.608.527.853,00; ;
- 4) Saldo akhir utang belanja tahun 2023 sebesar Rp16.738.897.731,00 yang terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp10.435.048.134,00 dan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp6.303.849.597,00; dan
- 5) Pada Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 masih terdapat Utang belanja Tahun 2022 yang belum terealisasi atau hanya sebagian yakni Utang belanja Insentif Covid 19 pada RSUD Liun Kendage sebesar Rp1.654.644.152,00,- hal ini disebabkan karena dalam penyusunan perubahan anggaran 2023 jumlah dana yang tersedia belum mencukupi dan Utang Pelaksana Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp2.500.000,00;

Tabel 5.133 Rekap Saldo Utang Belanja Tahun 2023

No	Uraian	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa		Jumlah (Rp)
			Barang (Rp)	Jasa (Rp)	
1	UB Selisih Gaji dan Tunjangan	1.187.204.681,00			1.187.204.681,00
2	UB TP Berdasarkan Beban Kerja	8.332.324.553,00			8.332.324.553,00
3	UB TP Berdasarkan Tempat Bertugas	128.400.000,00			128.400.000,00
4	UBTP Berdasarkan Kondisi Kerja	85.195.900,00			85.195.900,00
5	UB TP Berdasarkan Kelangkaan Profesi	701.923.000,00			701.923.000,00
6	UB Jasa - Belanja Tagihan Air			48.916.300,00	48.916.300,00
7	UB Jasa - Belanja Tagihan Listrik			136.615.689,00	136.615.689,00
8	UB Jasa - Kawat/Internet/tv berlangganan			54.553.450,00	54.553.450,00
9	UB Makan Minun		8.853.600,00	0,00	8.853.600,00
10	UB Sewa Gedung Pertemuan/Tempat Pendidikan			28.900.000,00	28.900.000,00
11	UB Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Covid-19			2.189.644.152,00	2.189.644.152,00
12	UB - Obat-Obatan		2.714.800,00		2.714.800,00
13	UB Iuran Jaminan Asuransi -Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			47.934.412,00	47.934.412,00
14	UB. Jasa- Jasa Kesehatan			3.474.234.434,00	3.474.234.434,00
15	UB - Honorarium Narasumber/Pembahas /Moderator			40.800.000,00	40.800.000,00
16	UB Jasa -Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			2.500.000,00	2.500.000,00
17	UB - Belanja BBM		22.600.000,00		22.600.000,00
18	UB - Belanja ATK		60.007.760,00		60.007.760,00
19	UB - Belanja Bahan Cetak		80.575.000,00		80.575.000,00
20	UB - Belanja Perabot Kantor		30.000.000,00		30.000.000,00
21	UB - Alat Listrik,		30.000.000,00		30.000.000,00
22	UB - Tenaga Administrasi Kantor			15.000.000,00	15.000.000,00
23	UB Jasa - Tenaga Jasa Kebersihan			30.000.000,00	30.000.000,00
	Jumlah	10.435.048.134,00	234.751.160,00	6.069.098.437,00	16.738.897.731,00

5.3.2.1.6 Utang jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan utang pada pihak ketiga atas kontrak/pekerjaan lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp187.206.504,84, mengalami penurunan sebesar Rp187.206.504,84 atau 100% yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.134 Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	187.206.504,94

Tabel 5.135 Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023

URAIAN	Saldo Awal 2022	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2023
Utang Jangka Pendek Lainnya	134.346.450,00	0,00	134.346.450,00	0,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	52.860.054,94	0,00	52.860.054,94	0,00
Jumlah	187.206.504,94	0,00	187.206.504,94	0,00

Utang jangka Pendek lainnya sebesar Rp134.346.450,00 adalah Penyediaan Makan Minum Penanganan Penyebaran Covid-19 Tahun 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 15/Pdt/G.S/2022/PN Tanggal 20 September 2022, sedang utang pengadaan aset tetap adalah seperti dalam rincian berikut.

Tabel 5.136 Mutasi Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2023

No	Uraian	Saldo Awal 31/12/2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31/12/2023 (Rp)
1	Dinas PU	47.896.500,00	0,00	47.896.500,00	0,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.963.554,94		4.963.554,94	0,00
	Jumlah	52.860.054,94	0,00	52.860.054,94	0,00

Utang pengadaan aset tetap sebesar Rp52.860.064,94 terdiri dari :

- Jasa Konsultasi Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dilaksanakan oleh CV. Sari Buana Sulut dengan nilai kontrak sebesar Rp.99.271.096,94 dan dibayarkan sebesar Rp94.307.542,00 sehingga menjadi Utang pengadaan aset tetap sebesar Rp4.963.554,94 yang dibayarkan Tahun 2023.
- Jasa Pengawasan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai oleh PT. Wowongtehu yang sudah dibayarkan Tahun 2023 sebesar Rp47.896.500,00.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka Panjang tahun 2023 dan 2022 merupakan Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan sebesar Rp166.120.576.521,00 dan Rp192.961.722.944,00 sebagai berikut.

Tabel 5.137 Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kewajiban Jangka Panjang	166.120.576.521,00	192.961.722.944,00

5.3.2.2.1 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Rp166.120.576.521,00 dan sebesar Rp192.961.722.944,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.841.146.423,00 atau 13,91% sebagai berikut.

Tabel 5.138 Dana PEN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Dana PEN	166.120.576.521,00	192.961.722.944,00

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI.

Kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun; serta biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah dan Pembayaran Pokok utangnya sejak tahun 2024.

Adapun Utang melalui Dana PEN di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2022 sebesar Rp192.920.817.961,00 dengan rincian per OPD/ unit kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 5.139 Rincian Dana PEN per OPD/Unit Kerja Tahun 2023

No	Uraian	PLAFON PEN	NILAI PENGADAAN (NILAI KONTRAK)	AKUMULASI PENCAIRAN	AKUMULASI PEMBAYARAN
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	73.010.000.000,00	70.507.347.000,00	70.507.347.000,00	70.506.945.150,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	41.200.000.000,00	39.293.889.410,00	39.293.889.410,00	39.293.889.410,00
3	Dinas Pertanian Daerah	22.821.052.632,00	21.888.840.701,00	21.888.840.701,00	21.888.840.701,00
4	RSD Liun Kendage Tahuna	62.780.000.000,00	61.271.645.833,00	61.271.645.833,00	61.231.142.700,00
Jumlah		199.811.052.632,00	192.961.722.944,00	192.961.722.944,00	192.920.817.961,00

Rincian Penyerapan Dana PEN disajikan pada Lampiran.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

5.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.655.039.684.087,05 dan Rp1.725.250.735.011,75 mengalami penurunan sebesar Rp70.211.050.924,70 atau 4,07%, dengan rincian sebagai berikut.

- Ekuitas awal Rp1.725.250.735.011,75
- Penambahan Rp
- Pengurangan (Rp70.211.050.924,70)
- Ekuitas Akhir Rp1.655.039.684.087,05

Pengurangan nilai Ekuitas terjadi karena defisit LO sebesar -Rp58.648.919.382,40 ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan sebesar -Rp11.562.131.542,30. Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih rinci disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekitas.

Tabel 5.140 Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas	1,655,039,684,087.05	1,725,250,735,011.75

5.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Tahun 2023. Laporan Operasional disajikan secara komparatif antara Tahun 2023 dan 2022, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Kegiatan Operasional

5.4.1 Pendapatan

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Pendapatan untuk 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp792.639.585.928,57.

Tabel 5.141 Perbandingan Pendapatan LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	%
Pendapatan - LO	792.639.585.928,57	835.016.875.113,91	(42.377.289.185,34)	(5,08)

Penjelasan pos-pos pendapatan-LO didasarkan pada jenis pendapatan sesuai objek pendapatan pada masing-masing fungsi, Organisasi Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan pencapaian Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan 31 Desember 2023 telah mencapai Rp792.639.585.928,57 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp835.016.875.113,91 maka pada Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp42.377.289.185,34 atau turun 5,08%. Rincian atas Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.142 Rincian Perbandingan Pendapatan – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	%
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	81.253.317.650,57	65.583.586.428,40	15.669.731.222,17	23,89
2 Pendapatan Transfer	683.593.639.220,00	714.545.656.142,00	(30.952.016.922,00)	(4,33)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	27.792.629.058,00	54.887.632.543,51	(27.095.003.485,51)	(49,36)
Jumlah	792.639.585.928,57	835.016.875.113,91	(42.377.289.185,34)	(5,08)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Secara Umum Pencapaian Pendapatan Asli Daerah – LO di Tahun 2023 mencapai Rp81.253.317.650,57 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp65.583.586.428,40 maka pada Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp15.669.731.222,17 atau naik 23,89%. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah – LO terdiri dari :

Tabel 5.143 Perbandingan Rincian PAD Tahun 2023 dan Tahun 2022

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	%
1 Pendapatan Pajak Daerah - LO	11.583.860.585,00	13.562.009.118,00	(1.978.148.533,00)	(14,59)
2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.245.746.873,00	4.471.250.524,00	774.496.349,00	17,32
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	3.965.773.689,00	1.409.861.482,00	2.555.912.207,00	181,29
4 Lain-lain PAD yang Sah - LO	60.457.936.503,57	46.140.465.304,40	14.317.471.199,17	31,03
Jumlah	81.253.317.650,57	65.583.586.428,40	15.669.731.222,17	23,89

Secara lebih terperinci per masing-masing Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.144 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Pajak Daerah - LO	11,583,860,585.00	13,562,009,118.00	(1,978,148,533.00)
	Pajak Hotel	387,636,304.00	258,934,324.00	128,701,980.00
	Pajak Restoran	1,417,172,729.00	1,052,275,970.00	364,896,759.00
	Pajak Hiburan	20,326,000.00	1,143,000.00	19,183,000.00
	Pajak Reklame	138,084,348.00	199,840,664.00	(61,756,316.00)
	Pajak Penerangan jalan	5,157,350,738.00	4,799,274,277.00	358,076,461.00
	Pajak Sarang Burung Walet	55,706,925.00	60,651,336.00	(4,944,411.00)
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,835,305,620.00	2,389,274,428.00	(553,968,808.00)
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2,014,970,921.00	2,004,693,318.00	10,277,603.00
	BPHTB - Pemindahan Hak	557,307,000.00	2,795,921,801.00	(2,238,614,801.00)
2	Retribusi Daerah - LO	5,245,746,873.00	4,471,250,524.00	774,496,349.00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	2,503,086,200.00	1,214,411,000.00	1,288,675,200.00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	134,190,350.00	130,403,600.00	3,786,750.00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	67,850,000.00	59,050,000.00	8,800,000.00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	133,675,000.00	238,635,000.00	(104,960,000.00)
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	1,651,967,000.00	1,676,479,500.00	(24,512,500.00)
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum - LO	50,339,000.00	46,470,000.00	3,869,000.00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	54,000,000.00	466,426,000.00	(412,426,000.00)
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	60,244,000.00	66,625,000.00	(6,381,000.00)
	Pemberian Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman - LO	501,362,323.00	545,862,024.00	(44,499,701.00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	89,033,000.00	26,888,400.00	62,144,600.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	3,965,773,689.00	1,409,861,482.00	2,555,912,207.00
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden)	3,965,773,689.00	1,409,861,482.00	2,555,912,207.00
4	Lain-Lain PAD Yang Sah - LO	60,457,936,503.57	46,140,465,304.40	14,317,471,199.17
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan - LO	688,673,847.00	0.00	688,673,847.00
	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan - LO	169,651,053.83	24,190,709.28	145,460,344.55
	Jasa Giro Kas Daerah - LO	1,664,075,921.15	2,052,551,110.15	(388,475,189.00)
	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS - LO	6,160,287.40	26,877,847.00	(20,717,559.60)
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LO	42,324,436.00	220,816.09	42,103,619.91
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	106,834,683.95	2,195,828,520.54	(2,088,993,836.59)
	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP -LO	25,313,851.34	0.00	25,313,851.34
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	7,873,328,583.94	3,110,798,019.99	4,762,530,563.95
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	58,442,995.00	0.00	58,442,995.00
	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	20,027,784.00	10,785,203.00	9,242,581.00
	Pendapatan dari Pengembalian - LO	233,829,117.00	0.00	233,829,117.00
	Pendapatan BLUD - LO	49,569,273,942.96	38,567,537,958.35	11,001,735,984.61
	Lain-Lain PAD Yang Sah	0.00	151,675,120.00	(151,675,120.00)
	Jumlah	81,253,317,650.57	65,583,586,428.40	15,669,731,222.17

Tabel 5.145 Rincian Pendapatan Asli Daerah pada LO dan LRA yang Memiliki Selisih

		LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Bilboard/Megatron - LO	133,507,948.00	136,712,948.00	(3,205,000.00)
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain- LO	5,157,350,738.00	5,109,971,166.00	47,379,572.00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Granit/Andesit) - LO	1,447,448,374.00	378,247,732.00	1,069,200,642.00
4	PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan - LO	2,014,970,921.00	1,552,693,147.00	462,277,774.00
5	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	557,307,000.00	542,970,000.00	14,337,000.00
6	Retribusi Penyewaan tanah dan Bangunan - LO	133,675,000.00	48,175,000.00	85,500,000.00
7	Hasil Sewa BMD - LO	19,651,053.83	0.00	19,651,053.83
8	Pendapatan Bunga atas penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	106,834,683.95	107,512,875.91	(678,191.96)
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	0.00	3,200,000.00	(3,200,000.00)
10	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain -	7,873,328,583.94	3,062,694,471.96	4,810,634,111.98
11	Pendapatan BLUD - LO	49,569,273,942.96	48,186,618,300.00	1,382,655,642.96
Jumlah				7,884,552,604.81

Rincian Pendapatan Asli Daerah pada LO dan LRA yang Memiliki Selisih dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Untuk Pajak Reklame Papan/*Bill Board*/Videotron/Megatron terdapat perbedaan antara LO dengan LRA hal ini disebabkan karena adanya setoran Piutang 2016 dan Tahun 2017, sebesar Rp3.205.000,00.
- 2) Untuk Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp47.379.572,00. Perbedaan ini disebabkan karena adanya penambahan Piutang Pajak PPJU Tahun 2023 sebesar Rp473.390.615,00 dan penyeteroran Piutang Pajak PPJU Tahun 2022 sebesar Rp426.011.043,00.
- 3) Untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) khususnya Pajak Granit/Andesit terdapat Perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp1.069.200.642,00 hal ini di sebabkan adanya penambahan Piutang Pajak MLB Tahun 2023 sebesar Rp1.080.200.642,00 dan penyeteroran Piutang Pajak MLB Tahun 2018 sebesar Rp11.000.000,00
- 4) Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp462.277.774,00 hal ini disebabkan karena adanya penambahan Piutang PBB Tahun 2023 sebesar Rp559.456.165,00 dan adanya Setoran Piutang PBB Tahun 2022 sebesar Rp97.178.391,00

- 5) Untuk Pajak BPHTB – Pemindahan Hak terdapat Perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp14.337.000,00 hal ini disebabkan karena adanya Penambahan Piutang Pajak BPHTB Tahun 2022.
- 6) Untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp85.500.000,00 hal ini disebabkan karena adanya penambahan Piutang Retribusi Pemakaian Daerah Tahun 2022 sebesar Rp199.350.000,00 dan adanya penyetoran Piutang Kekayaan Daerah sebesar Rp113.850.000,00.
- 7) Untuk Hasil Sewa BMD terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp19.651.053,83 perbedaan ini disebabkan karena adanya Jurnal Penyesuaian Pendapatan Sewa ATM BSGo Tahun 2022 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp19.651.053,83
- 8) Untuk Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp678.191,96 perbedaan ini disebabkan karena adanya Jurnal Penyesuaian Pengakuan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah dari Remunerasi Dana TDF Tahun 2022 yang diterima Tahun 2023 sebesar Rp678.191,96
- 9) Untuk Tuntutan Ganti Kerugian Derah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp3.200.000,00 perbedaan ini disebabkan karena adanya Jurnal Penyesuaian atas Penyetoran Piutang TP – TGR terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara Tahun 2023
- 10) Untuk Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain terdapat Perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp4.810.634.111,98 hal ini disebabkan karena adanya Penambahan nilai Aset Lain-lain atas penambahan Piutang TGR tanpa Penetapan sebesar Rp5.377.946.623,06, ditambah penerimaan sewa BMD ATM sebesar Rp4.995.437,96 dan Pengurangan karna adanya penyetoran Piutang TGR Tanpa Penetapan sebesar Rp569.801.099,72, ditambah Pengakuan Pendapatan diterima dimuka atas Pendapatan Sewa BMD sebesar Rp2.506.849,32.
- 11) Untuk Pendapatan BLUD terdapat Perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp1.382.655.642,96, hal ini disebabkan adanya Setoran Pajak BPJS Tahun 2023 sebesar Rp3.320.144.851 ditambah setoran Piutang Lainnya Rp26.107.882,00 dikurangi Pendapatan diterima dimuka Sewa BMD Tahun 2023 sebesar Rp4.995.437,96, Penambahan Piutang BPJS Tahun 2023 sebesar Rp4.491.242.700,00 dan Piutang Lainnya sebesar Rp232.670.238,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Kepulauan Sangehe adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 secara keseluruhan pencapaian realisasi untuk Pendapatan Transfer – LO adalah sebesar Rp683.593.639.220,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp714.545.656.142,00 maka pada Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp30.952.016.922,00 atau turun 4,33 %. Rincian dari Pendapatan Transfer – LO adalah sebagai berikut :

Tabel 5.146 Perbandingan Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	658.698.071.900,00	684.600.853.168,00	(25.902.781.268,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	24.895.567.320,00	29.944.802.974,00	(5.049.235.654,00)
	Jumlah	683.593.639.220,00	714.545.656.142,00	(30.952.016.922,00)

Secara lebih terperinci per masing-masing Pendapatan Transfer - LO dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.147 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	658.698.071.900,00	684.600.853.168,00	19.818.975.976,00
	- Dana Bagi Hasil (DBH) :	12.841.473.000,00	38.102.991.280,00	(25.261.518.280,00)
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	947.576.000,00	7.021.963.883,00	(6.074.387.883,00)
	Bagi Hasil PPh Pasal 21	4.282.543.000,00	4.902.875.766,00	(620.332.766,00)
	Bagi Hasil PPh pasal 25 dan 29 WP Orang Pribadi dalam Negeri	-	582.103.041,00	(582.103.041,00)
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	513.206.000,00	2.548.107.458,00	(2.034.901.458,00)
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Landrent	-	152.958.423,00	(152.958.423,00)
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Royalti	2.435.743.000,00	20.723.914.532,00	(18.288.171.532,00)
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-PSDH	5.863.000,00	1.003.966,00	4.859.034,00
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	4.656.542.000,00	2.170.064.211,00	2.486.477.789,00
	- Dana Alokasi Umum (DAU) :	515.081.173.000,00	492.162.712.900,00	22.918.460.100,00
	Dana Alokasi Umum	481.606.385.000,00	492.162.712.900,00	(10.556.327.900,00)
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - LO	4.400.000.000,00	-	4.400.000.000,00
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - LO	29.074.788.000,00	-	29.074.788.000,00
	- Dana Alokasi Khusus (DAK) :	130.775.425.900,00	139.960.866.125,00	(9.185.440.225,00)
	DAK Fisk Bidang Pendidikan Reguler - PAUD	512.936.550,00	424.212.800,00	88.723.750,00
	DAK Fisk Bidang Pendidikan Reguler - SD	1.164.936.300,00	9.798.340.000,00	(8.633.403.700,00)
	DAK Fisk Bidang Pendidikan Reguler - SMP	1.761.884.000,00	3.713.881.000,00	(1.951.997.000,00)

NO	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Perpustakaan Daerah	-	265.453.170,00	(265.453.170,00)
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Pelayanan Kefarmasian		3.089.913.183,00	(3.089.913.183,00)
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penurunan AKI dan AKB		4.265.396.941,00	(4.265.396.941,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	9.188.075.850,00	1.083.502.331,00	8.104.573.519,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		201.099.998,00	(201.099.998,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1.880.472.031,00	(1.880.472.031,00)
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		3.153.121.672,00	(3.153.121.672,00)
	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		4.647.514.903,00	(4.647.514.903,00)
	DAK Fisik Bidang Jalan - Reguler- Jalan	12.338.247.900,00	5.823.012.550,00	6.515.235.350,00
	DAK Fisik Bidang Jalan - Penugasan - Jalan		6.671.250.395,00	(6.671.250.395,00)
	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler		4.262.400.000,00	(4.262.400.000,00)
	DAK Fisik Bidang Sanitasi - Reguler		5.275.000.000,00	(5.275.000.000,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	16.782.808.460,00	41.434.808.943,00	(24.652.000.483,00)
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan - Reguler - LO	601.400.000,00		601.400.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	695.000.000,00		695.000.000,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	21.720.901.550,00		21.720.901.550,00
	DAK Non Fisik BOS Kinerja-LO	2.455.000.000,00		2.455.000.000,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	37.110.916.000,00	35.316.552.335,00	1.794.363.665,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.056.500.000,00	-	1.056.500.000,00
	DAK Non Fisik - TKG PNSD	6.183.143.000,00	5.945.722.820,00	237.420.180,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	1.951.993.250,00	-	1.951.993.250,00
	DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan-LO	791.890.000,00	-	791.890.000,00
	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	11.181.825.090,00	6.631.240.016,00	4.550.585.074,00
	DAK Non Fisik - BOKKB BOKB	3.946.513.200,00	3.191.269.180,00	755.244.020,00
	DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	531.622.750,00	317.443.120,00	214.179.630,00
	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00		438.800.000,00
	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	361.032.000,00	774.767.600,00	(413.735.600,00)
	Dana Insentif Daerah	-	6.168.774.000,00	(6.168.774.000,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LO	24.895.667.320,00	29.944.802.974,00	(5.049.235.654,00)
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.413.589.501,00	4.475.177.555,00	(1.061.588.054,00)
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.598.517.416,00	2.495.444.764,00	(896.927.348,00)
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.505.121.620,00	15.566.405.516,00	(3.061.283.896,00)
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan Air Permukaan	109.356.470,00	198.999.202,00	(89.642.732,00)
	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	7.268.982.313,00	7.208.775.937,00	60.206.376,00
	JUMLAH	683.593.639.220,00	714.545.656.142,00	(30.952.016.922,00)

Tabel 5.148 Pendapatan Transfer pada LO dan LRA yang Memiliki Selisih

		LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	947.576.000,00	1.526.886.465,00	(579.310.465,00)
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	4.282.543.000,00	4.820.076.047,00	(537.533.047,00)
3	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	513.206.000,00	653.855.924,00	(140.649.924,00)
4	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Royalti	2.435.743.000,00	3.762.715.594,00	(1.326.972.594,00)
5	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan	5.863.000,00	5.960.966,00	(97.966,00)
6	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	4.656.542.000,00	4.868.295.211,00	(211.753.211,00)
7	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.413.589.501,00	3.856.850.962,00	(443.261.461,00)
8	Bagi Hasil dari BBNKB	1.598.517.416,00	1.717.789.485,00	(119.272.069,00)
9	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar KB	12.505.121.620,00	12.824.639.523,00	(319.517.903,00)
10	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	109.356.470,00	143.149.392,00	(33.792.922,00)
11	Dana Desa	-	107.491.407.902,00	(107.491.407.902,00)
	Jumlah	30.468.058.007,00	141.671.627.471,00	(111.203.569.464,00)

- 1) Untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp579.310.465,00 hal ini disebabkan karena adanya penerimaan dana penempatan uang Pemerintah Daerah (Dana TDF) Tahun 2022 yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Lainnya.
- 2) Untuk Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp537.533.047,00 hal ini disebabkan karena adanya penerimaan dana penempatan uang Pemerintah Daerah (Dana TDF) Tahun 2022 yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Lainnya.
- 3) Untuk Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp140.649.924,00 hal ini disebabkan karena penerimaan dana penempatan uang Pemerintah Daerah (Dana TDF) Tahun 2022 yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Lainnya.
- 4) Untuk Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara – Royalti terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp1.326.972.594,00 hal ini disebabkan karena penerimaan dana penempatan uang Pemerintah Daerah (Dana TDF) Tahun 2022 yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Lainnya.
- 5) Untuk Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp97.966,00 hal ini disebabkan karena penerimaan dana penempatan uang Pemerintah Daerah (Dana TDF) Tahun 2022 yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Lainnya.
- 6) Untuk Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp211.753.211,00 hal ini disebabkan karena penerimaan dana penempatan uang Pemerintah Daerah (Dana TDF) Tahun 2022 yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Lainnya.
- 7) Untuk Bagi Hasil Pajak Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp443.261.461,00 hal ini disebabkan karena adanya

- penambahan piutang Tahun 2023 sebesar Rp2.024.723.780,00 dan adanya penyeteroran Piutang Tahun 2022 sebesar Rp2.467.985.241,00
- 8) Untuk Bagi Hasil Pajak Provinsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp119.272.069,00 hal ini disebabkan karena adanya Penambahan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp992.266.610,00 dan adanya penyeteroran piutang Tahun 2022 sebesar Rp1.111.538.679,00
 - 9) Untuk Bagi Hasil Pajak Provinsi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp319.517.903,00 hal ini disebabkan karena adanya penambahan piutang Tahun 2023 sebesar Rp7.464.719.601,00 dan Adanya penyeteroran Piutang Tahun 2022 sebesar Rp7.784.237.504,00
 - 10) Untuk Bagi Hasil Pajak Provinsi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp33.792.922,00 hal ini disebabkan karena adanya penambahan piutang Tahun 2023 sebesar Rp71.398.124,00 dan Adanya penyeteroran Piutang Tahun 2022 sebesar Rp105.191.046,00
 - 11) Untuk Dana Desa terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp107.491.407.902,00 perbedaan ini disebabkan karena adanya pengakuan penerimaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2023.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2023, secara keseluruhan pencapaian realisasi dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp27.792.629.058,00 bila dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2022 sebesar Rp54.887.632.543,51 maka pada Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp27.095.003.485,51 atau turun 49,36%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.149 Perbandingan Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah -LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	19.572.583.321,00	20.574.058.082,51	(1.001.474.761,51)
2	Pendapatan Lainnya - LO	8.220.045.737,00	34.313.574.461,00	(26.093.528.724,00)
	Jumlah	27.792.629.058,00	54.887.632.543,51	(27.095.003.485,51)

Secara lebih terperinci per masing-masing Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.150 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2023

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	19.572.583.321,00
	- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri - LO	857.000.000,00
	- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan Dalam Negeri - LO	822.470.700,00
	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	17.893.112.621,00
2	- Pendapatan Lainnya	8.220.045.737,00
	- Pendapatan Hibah Dana JKN - LO	8.220.045.737,00
	Jumlah	27.792.629.058,00

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah– LO Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2023, secara keseluruhan pencapaian realisasi dari Pendapatan Hibah sebesar Rp19.572.583.321,00 bila dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2022 sebesar Rp20.574.058.082,51 maka pada Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp1.001.474.761,51 atau turun 4,87%. Rincian Pendapatan Hibah-LO sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp857.000.000,00 terdiri dari penerimaan hibah atas Dana CSR Bank SulutGo Cabang Tahuna sebesar Rp357.000.000,00 dan penerimaan hibah uang untuk Program Air Bersih Perdesaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp500.000.000,00;
- 2) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp822.470.700,00 terdiri dari Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Aset Peralatan dan Mesin sesuai dengan BAST nomor4726/4.2/PLK.03.03/X.2023 sebesar Rp615.130.500,00, penerimaan hibah Aset Tetap pada Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp72.340.200,00, dan penerimaan hibah berupa Bangunan Rumah Dinas Camat dari Masyarakat Kampung Nipa pada Kecamatan Nusa Tabukan sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 641/59/01 tanggal 03 oktober 2023 sebesar Rp135.000.000,00; dan
- 3) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp17.893.112.621,00 terdiri dari Penerimaan Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Perhubungan berupa satu unit bus ukuran sedang dan bus sekolah ukuran kecil sebesar Rp1.161.380.110,00 sesuai BAST Nomor PL.301/04/8.A/AJ/VIII/2022 dan Nomor 550/28/2258, penerimaan hibah Tanah dari Pemerintah Pusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.000.000,00, penerimaan hibah berupa satu paket buku kepustakaan sesuai BAST nomor 4726/4.2/PLK.03.03/X.2023 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp28.790.200,00, penerimaan hibah Jalan Irigasi dan Jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai BAST Nomor 36.BAST/92.02/SDE/2015 sebesar Rp16.677.942.311,00.

Tabel 5.151 Pendapatan Hibah pada LO dan LRA yang Memiliki Selisih

		LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
1	- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri - LO	857.000.000,00	500.000.000,00	357.000.000,00
2	- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan Dalam Negeri - LO	822.470.700,00	-	822.470.700,00
3	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	17.893.112.621,00	-	17.893.112.621,00
	Jumlah	19.572.583.321,00	500.000.000,00	19.072.583.321,00

Penjelasan atas tabel di atas sebagai berikut.

- 1) Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri antara LO dengan LRA sebesar Rp357.000.000,00 hal ini disebabkan karena adanya Penerimaan Hibah dari Dana CSR Bank SulutGo Cabang Tahuna;
- 2) Pendapatan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp822.470.700,00 terdiri dari Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Aset Peralatan dan Mesin sesuai dengan BAST nomor4726/4.2/PLK.03.03/X.2023 sebesar Rp615.130.500,00, Penerimaan Hibah Aset tetap pada Dinas Kesehatan Daerah sebesar

- Rp72.340.200,00, dan Penerimaan hibah berupa Bangunan Rumah dinas camat dari Masyarakat kampung nipa pada kecamatan nusa tabukan sesuai berita acara serah terima Nomor 641/59/01 tanggal 03 oktober 2023 sebesar Rp135.000.000,00; dan
- 3) Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat terdapat perbedaan antara LO dengan LRA sebesar Rp17.893.112.621,00 hal ini disebabkan karena adanya Penerimaan Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.161.380.110,00, Penerimaan Hibah Tanah dari Pemerintah Pusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.000.000,00, Penerimaan Hibah buku kepustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp28.790.200,00, penerimaan hibah Jalan Irigasi dan Jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp16.677.942.311,00.

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya-LO

Pendapatan Lainnya– LO Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2023, secara keseluruhan pencapaian realisasi dari Pendapatan Lainnya adalah sebesar Rp8.220.045.737,00 bila dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2022 sebesar Rp34.313.574.461,00 maka pada Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp26.093.528.724,00 atau turun 76,04% yang merupakan Dana JKN sebesar Rp8.220.045.737,00 adalah merupakan Penerimaan Dana Kapitasi dari Pemerintah Pusat yang ditransfer langsung ke rekening Bendahara JKN di Puskesmas-Puskesmas. Tidak ada perbedaan nilai pendapatan lainnya pada LO dan LRA.

5.4.2 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Jumlah Beban sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp850.363.446.636,66 bila dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp851.782.867.572,68 maka pada Tahun 2023 terjadi penurunan senilai Rp1.419.420.936,02 atau turun sebesar 0,17% dan dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.152 Perbandingan Beban Tahun 2023 dan Tahun 2022

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	%
Beban	850,363,446,636.66	851,782,867,572.68	(1,419,420,936.02)	(0.17)

Secara lebih terperinci Realisasi Beban Tahun 2023 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.153 Realisasi Beban Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Pegawai-LO	376,198,542,584.00	389,505,529,889.00	(13,306,987,305.00)
2	Beban Barang dan Jasa	270,683,072,703.53	251,607,397,689.82	19,075,675,013.71
3	Beban Bunga	12,108,718,981.00	6,044,722,252.00	6,063,996,729.00
4	Beban Hibah	13,916,198,271.11	17,859,147,802.00	(3,942,949,530.89)
5	Beban Bantuan Sosial	300,383,000.00	5,007,896,133.00	(4,707,513,133.00)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	120,493,812,286.53	124,567,000,035.42	(4,073,187,748.89)
7	Beban Penyisihan Piutang	1,347,872,749.50	948,745,927.44	399,126,822.06
8	Beban Transfer	54,764,641,091.00	55,862,998,652.00	(1,098,357,561.00)
9	Beban Lain-lain	550,204,969.99	379,429,192.00	170,775,777.99
	Jumlah	850,363,446,636.66	851,782,867,572.68	(1,419,420,936.02)

5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp376.198.542.584,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp389.505.529.889,00 terdapat penurunan sebesar Rp13.306.987.305,00 atau turun 3,42 %. Nilai Beban Pegawai Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai LRA sebesar terdapat perbedaan sebesar Rp2.108.966.580,00 yang disebabkan oleh penambahan dan pengurangan Utang Belanja Pegawai. Beban Pegawai dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.154 Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	238.007.783.759,00	234.664.674.226,00	3.343.109.533,00
2	Beban Tambahan Penghasilan	76.349.399.631,00	91.742.357.596,00	(15.392.957.965,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	48.952.548.700,00	50.270.438.854,00	(1.317.890.154,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.671.482.358,00	11.671.438.925,00	43.433,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	38.840.188,00	(38.840.188,00)
6	Beban penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.879.996,00	350.640.000,00	160.239.996,00
7	Beban Pegawai BLUD	706.448.140,00	767.140.100,00	(60.691.960,00)
	Jumlah	376.198.542.584,00	389.505.529.889,00	(13.306.987.305,00)

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp270.683.072.703,53. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp251.607.397.689,82 terdapat kenaikan sebesar Rp19.075.675.013,71 atau naik 7,58%. Terdapat perbedaan nilai Beban Barang dan Jasa-LO dengan nilai Belanja Barang dan Jasa-LRA sebesar Rp20.722.569.878,53 karena adanya pengakuan persediaan ditahun berjalan, reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap dan pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2023. Beban barang dan Jasa Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.155 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Persediaan/Barang	63.330.099.367,53	48.989.484.149,83	14.340.615,218
	- Beban Barang Pakai Habis	63.330.099.367,53	48.989.484.149,83	14.340.615,218
2	Beban Jasa	157.132.926.638,00	160.818.879.897,99	(3.685.953.359,99)
	- Beban Jasa Kantor	62.767.432.875,00	64.356.299.950,00	(1.588.867,075)
	- Beban Iuran Jaminan/Asuransi	24.830.530.633,00	26.443.494.453,00	(1.612.963,820)
	- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.341.110.000,00	1.369.655.500,00	(28.545,500)
	- Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.673.499.730,00	358.669.098,00	1.314.830,632
	- Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	11.500.000,00	(11.500,000)
	- Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	1.115.278.500,00	3.878.148.805,99	(2.762.870,306)
	- Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	506.093.758,00	299.700.000,00	206.393,758
	- Beban Beasiswa Pendidikan PNS	86.750.000,00	114.201.398,00	(27.451,398)
	- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.241.560.000,00	686.474.700,00	555.085,300
	- Beban Barang dan Jasa BOS	13.568.130.543,00	14.237.311.509,00	(669.180,966)
	- Beban Barang dan Jasa BLUD	48.070.410.599,00	46.825.024.584,00	1.245.386,015
	- Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.932.130.000,00	2.238.400.000,00	(306.270,000)
3	Beban Pemeliharaan	9.825.354.057,00	4.038.203.966,00	5.787.150,091
	- Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	9.842.500,00	(9.842,500)
	- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.358.933.205,00	1.656.071.857,00	(297.138,652)
	- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.438.184.000,00	1.134.885.990,00	5.303.298,010
	- Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.028.236.852,00	1.237.403.619,00	790.833,233
4	Beban Perjalanan Dinas	40.394.692.641,00	37.760.829.576,00	2.633.863,065
	- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.394.692.641,00	37.760.829.576,00	2.633.863,065
	Jumlah	270.683.072.703,53	251.607.397.689,82	19.075.675.013,71

1. Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp63.330.099.367,53. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp48.989.484.149,83 terdapat kenaikan sebesar Rp14.340.615.217,70 atau 7,58%.
2. Beban Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp157.132.926.638,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp160.818.879.997,99 terdapat penurunan sebesar Rp3.685.953.359,99 atau 2,29%.
3. Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.825.354.057,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp4.038.203.966,00 terdapat kenaikan sebesar Rp5.787.150.091,00 atau 143,31%.
4. Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp40.394.692.641,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp37.760.829.576,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.633.863.065,00 atau 6,98%.

5.4.2.3 Beban Bunga

Beban Bunga sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp12.108.718.981,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp6.044.722.252,00 terdapat kenaikan senilai Rp6.063.996.729,00 atau 100,32%. Beban Bunga yang disajikan merupakan Beban atas pembayaran Bunga Dana PEN. Jika dibandingkan dengan Belanja Bunga pada LRA sebesar Rp12.110.224.124,00 terdapat perbedaan sebesar Rp1.505.143,00 hal ini disebabkan karena adanya pembayaran Bunga Dana PEN Tahun 2022 sebesar Rp1.028.539.583,00 dan adanya Utang Bunga Dana PEN Tahun 2023 yang akan dibayarkan di tahun 2024 sebesar Rp1.027.034.440,00.

Tabel 5.156 Rincian Beban Bunga Tahun 2023

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Uraian	2023 (Rp)
1	31 Januari 2023	Januari 2023	1,028,539,583.00
2	28 Februari 2023	Februari 2023	929,003,495.00
3	31 Maret 2023	Maret 2023	1,028,539,583.00
4	30 April 2023	April 2023	995,360,887.00
5	31 Mei 2023	Mei 2023	1,028,539,583.00
6	30 Juni 2023	Juni 2023	995,360,887.00
7	31 Juli 2023	Juli 2023	1,028,539,583.00
8	31 Agustus 2023	Agustus 2023	1,028,539,583.00
9	30 September 2023	September 2023	995,360,887.00
10	31 Oktober 2023	Oktober 2023	1,028,539,583.00
11	30 November 2023	November 2023	995,360,887.00
12	31 Desember 2023	Desember 2023	1,027,034,440.00
Jumlah			12,108,718,981.00

5.4.2.4 Beban Hibah

Beban Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp13.916.198.271,11. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp17.859.147.802,00 maka pada Tahun 2023

terjadi penurunan senilai Rp3.942.949.530,89 atau turun 22,08% dan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.157 Rincian Beban Hibah Tahun 2023

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	500.000.000,00	684.010.250,00	-184.010.250,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	50.364.569,11	0,00	50.364.569,11
3	Beban Hibah Bantuan Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia	6.438.316.708,00	10.658.139.000,00	-4.219.822.292,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	451.468.900,00	404.167.100,00	47.301.800,00
5	Beban Hibah BOS	6.476.048.094,00	6.112.831.452,00	363.216.642,00
	Jumlah	13.916.198.271,11	17.859.147.802,00	-3.942.949.530,89

Nilai Belanja Hibah pada LRA sebesar Rp13.865.833.702,00 lebih kecil dari Beban Hibah karena terdapat Penerimaan Hibah Makanan Tambahan di Puskesmas-Puskesmas pada Tahun 2022 yang sudah menjadi Beban ditahun 2023 sebesar Rp50.364.569,11.

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp300.383.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp5.007.896.133,00 terjadi penurunan sebesar Rp4.707.513.133,00 atau turun 94,00%. Nilai Belanja Bantuan Sosial pada LRA sebesar Rp300.383.000,00 sama dengan Nilai Beban Bantuan Sosial. Adapun rincian Beban Bantuan Sosial tersebut terdiri dari :

Tabel 5.158 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
	Beban Bantuan Sosial			
	- Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	300.383.000,00	5.007.896.133,00	-4.707.513.133,00
	Jumlah	300.383.000,00	5.007.896.133,00	-4.707.513.133,00

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp1.347.872.749,50. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp948.745.927,44 maka pada Tahun 2023 terjadi kenaikan senilai Rp399.126.822,06 atau naik 42,07%. Beban Penyisihan Piutang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.159 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	509,721,519.34	242,957,141.47	266,764,377.87
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	7,421,500.00	92,627,500.00	(85,206,000)
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan	9,400,298.99	0.00	9,400,299
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	238,089,944.90	122,172,970.20	115,916,974.70
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	58,053,167.77	57,344,762.36	708,405.41
6	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	525,186,318.50	433,643,553.41	91,542,765.09
	Jumlah	1,347,872,749.50	948,745,927.44	399,126,822.06

5.4.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp120.493.812.286,53 Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp124.567.000.035,42 maka pada Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp4.073.187.748,89 atau 3,27%. Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.160 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	44,241,108,841.27	45,440,066,314.42	(1,198,957,473.15)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13,628,459,476.00	10,690,517,652.00	2,937,941,824.00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	62,624,243,969.26	68,436,416,069.00	(5,812,172,099.74)
	Jumlah	120,493,812,286.53	124,567,000,035.42	(4,073,187,748.89)

5.4.2.8 Beban Transfer

Beban Transfer sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp54.764.641.091,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp55.862.998.652,00 maka pada Tahun 2023 terjadi penurunan senilai Rp1.098.357.561,00 atau turun 1,97 %. Terdapat Perbedaan antara Beban Transfer dan Belanja Transfer LRA sebesar Rp107.491.407.902 pada LRA disebabkan karena adanya Belanja Transfer Dana Desa yang bersumber dari APBN. Beban Transfer terdiri dari :

Tabel 5.161 Rincian Beban Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Bagi Hasil	2.335.858.581,00	1.911.079.759,00	424.778.822
	- Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.417.499.462,00	1.101.371.135,00	316.128.327
	- Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab/Kota Kepada Pemerintah Desa	918.359.119,00	809.708.624,00	108.650.495
2	Beban Bantuan Keuangan	52.428.782.510,00	53.951.918.893,00	(1.523.136.383)
	- Beban Bantuan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	162.477.550,00	100.000.000,00	62.477.550
	- Beban Bantuan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	52.266.304.960,00	53.851.918.893,00	(1.585.613.933)
	Jumlah	54.764.641.091,00	55.862.998.652,00	(1.098.357.561)

5.4.2.9 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp550.204.969,99. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp379.429.192,00 terdapat kenaikan sebesar Rp170.775.777,99 atau 45,01%. Beban lain-lain merupakan Koreksi atas Aset Tetap yang bernilai dibawah batas Kapitalisasi (*Ekstracomtable*), reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin asset tetap ke Beban Lain-lain sebesar Rp550.204.969,99.

Tabel 5.162 Rincian Beban Lain-lain

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Ekstracomtable	550.204.969,99	379.429.192,00	170.775.777,99
	Jumlah	550.204.969,99	379.429.192,00	170.775.777,99

5.4.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 Pos Operasional terjadi Defisit sebesar Rp57.723.860.708,09. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang Defisit sebesar Rp16.765.992.458,77 terjadi kenaikan sebesar Rp40.957.868.249,32 atau 244,29%.

Tabel 5.163 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Pendapatan -LO	792,639,585,928.57	835,016,875,113.91	(42,377,289,185)
2	Beban	850,363,446,636.66	851,782,867,572.68	(1,419,420,936)
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional (1-2)	(57,723,860,708.09)	(16,765,992,458.77)	(40,957,868,249.32)

Kegiatan Non Operasional

5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Defisit untuk periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 senilai Rp646.196.809,31. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 surplus sebesar Rp6.410.755,22 maka mengalami penurunan sebesar Rp652.607.564,53. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Kabupaten Kepulauan Sangihe Per 31 Desember 2023 sebesar Rp215.180.443,28. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp121.004.755,22 terdapat kenaikan sebesar Rp94.175.688,06 atau 77,83%.

Tabel 5.164 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	215.180.443,28	121.004.755,22	94.175.688,06
	Jumlah	215.180.443,28	121.004.755,22	94.175.688,06

Tabel 5.165 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

No.	Uraian	NILAI (Rp)
1	-Jurnal Penyesuaian atas Penyisihan Piutang Pajak MBLB atas setoran Piutang Pajak MBLB Tahun 2022	11.000.000,00
2	-Jurnal Penyesuaian atas Penyisihan Piutang Pajak PPJU atas setoran Tahun 2022	2.130.055,22
3	-Jurnal Penyesuaian atas Penyisihan Piutang Pajak Reklame dan setoran Piutang Tahun 2016 dan 2017	3.205.000,00
4	-Jurnal Penyesuaian atas Penyisihan Piutang atas setoran retribusi tahun 2018 dan 2022	56.615.250,00
5	-Jurnal Penyesuaian atas Penyisihan Bagian Lancar Ganti Kerugian Daerah TGR atas setoran TGR Tahun 2023	3.200.000,00
6	-Jurnal Penyesuaian atas Penyisihan Bagian Lancar Ganti Kerugian Daerah TGR atas setoran Tahun 2022	300.000,00
7	-Jurnal Penyesuaian atas Penyisihan Piutang Transfer bagi Hasil Pajak Daerah atas Penyetoran Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2022	62.632.389,54
8	-Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang Pajak PBBP2 atas Penyetoran Pajak PBBP2 Tahun 2023	10.222.540,59
9	- Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang BPJS Tahun 2022	49.688.428,26
10	- Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang Pajak Pasien atas Penyetoran Piutang Pajak Pasien Tahun 2023	16.186.779,67
	Jumlah	215.180.443,28

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar Kabupaten Kepulauan Sangihe Per 31 Desember 2023 sebesar Rp708.278.704,01 Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp114.594.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp593.684.704,01 atau 518,08%.

Tabel 5.166 Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	708.278.704,01	114.594.000,00	593.684.704,01
	Jumlah	708.278.704,01	114.594.000,00	593.684.704,01

Tabel 5.167 Rincian Defisit Penjualan Aset Non Lancar

No.	Uraian	NILAI (Rp)
1	-Jurnal Penghapusan Bangunan pada Dinas Pendidikan	116.566.348,80
2	-Jurnal Penghapusan Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan Pendidikan	162.920.309,29
3	-Jurnal Penhapusan Aset tetap Bangunan pada Dinas Pendidikan	428.792.045,93
	Jumlah	708.278.704,02

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Kabupaten Kepulauan Sangihe Per 31 Desember 2023 sebesar Rp153.098.548,58 Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 tidak ada Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp153.098.548,58 atau 100%.

Tabel 5.168 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	153.098.548,58	0,00	153.098.548,58
	Jumlah	153.098.548,58	0,00	153.098.548,58

Tabel 5.169 Rincian Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

No.	Uraian	NILAI (Rp)
1	-Jurnal Penyesuaian Pengakuan Laba/Rugi BUMD terhadap Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tahun 2023	153.098.548,59
	Jumlah	153.098.548,59

5.4.5 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Defisit untuk periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 sebesar Rp278.861.865,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp5.517.418.662,00 terdapat penurunan sebesar Rp5.238.556.797,00.

Tabel 5.170 Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	-278.861.865,00	-5.517.418.662,00	5.238.556.797,00
	Jumlah	-278.861.865,00	-5.517.418.662,00	5.238.556.797,00

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2023 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta diluar kendali entitas Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah memiliki Pos Beban Luar Biasa pada Laporan Keuangannya senilai Rp278.861.865,00 yang merupakan beban atas penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp5.517.418.662,00, mengalami penurunan sebesar Rp5.238.556.797,00 atau 94,95%. Pos Beban Luar Biasa bila dibandingkan dengan Belanja Tidak Terduga LRA sebesar Rp319.766.848,00 terdapat perbedaan senilai Rp40.904.983,00 yang merupakan Pengembalian Pokok Pinjaman Utang PEN yang cair melalui Belanja Tidak Terduga.

5.4.6 Surplus/Defisit – LO

Kegiatan Operasional, Non Operasional dan Luar Biasa untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 menghasilkan defisit LO sebesar Rp58.648.919.382,40 yang diperhitungkan sebagai penambah ekuitas tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp22.277.000.365,55 terdapat penurunan sebesar Rp36.371.919.016,85 atau 163,27%.

Tabel 5.171 Rincian Surplus/Defisit – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Surplus/Defisit - LO	-58.648.919.382,40	-22.277.000.365,55	-36.371.919.016,85
	Jumlah	-58.648.919.382,40	-22.277.000.365,55	-36.371.919.016,85

5.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tahun 2023 yang di klasifikasikan **berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan non anggaran.**

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas

LKPD 2023 – Audited

bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan daerah (selain penjualan aset tetap) dikurangi dengan belanja daerah (selain belanja modal) selama tahun 2023.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah senilai Rp61.414.950.324,76 yang merupakan selisih dari arus kas masuk senilai Rp874.317.285.820,76 yang merupakan seluruh Realisasi APBD Tahun 2023 dari Pos Pendapatan Daerah selain pendapatan dari penjualan aset tetap, dan dengan Arus Kas Keluar Rp812.902.335.496,00 yang merupakan Realisasi Pengeluaran Tahun 2023 dari Pos Belanja Daerah selain Belanja Modal, lebih rinci seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.172 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk (Rp)	874,317,285,820.76	902,325,462,502.54
Pendapatan Pajak Daerah	9,993,870,597.00	13,470,745,714.00
Pendapatan Retribusi Daerah	5,160,246,873.00	4,275,600,524.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	2,085,713,890.00	1,409,861,482.00
Lain-lain PAD Yang Sah	53,560,200,039.76	45,909,808,530.54
Dana Bagi Hasil Pajak	15,637,790,207.00	35,306,674,073.00
Dana Alokasi Umum	515,081,173,000.00	492,162,712,900.00
Dana Alokasi Khusus Fisik	43,045,289,060.00	95,989,379,917.00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87,730,136,840.00	52,176,995,071.00
Dana DID	-	6,168,774,000.00
Dana Desa	107,491,407,902.00	100,664,305,890.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	25,811,411,675.00	26,589,861,392.00
Hibah Pemerintah Pusat	500,000,000.00	0.00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Perundang-Undangan	8,220,045,737.00	28,200,743,009.00
Arus Kas Keluar (Rp)	812,902,335,496.00	839,021,612,324.00
Belanja Pegawai	374,089,576,004.00	386,995,607,862.00
Belanja Barang dan Jasa	249,960,502,825.00	267,487,163,223.00
Belanja Bunga	12,110,224,124.00	6,044,722,252.00
Belanja Hibah	13,865,833,702.00	11,562,306,100.00
Belanja Bantuan Sosial	300,383,000.00	5,007,896,133.00
Pembayaran Tak Terduga	319,766,848.00	5,396,612,212.00
Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah	2,335,858,581.00	1,911,079,759.00
Transfer Bantuan Keuangan Provinsi	159,920,190,412.00	154,616,224,783.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (Rp)	61,414,950,324.76	63,303,850,178.54

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2023 senilai -Rp103.582.740.025,00 Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, aset lainnya serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi bersumber dari pendapatan atas penjualan investasi Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Sangihe baik berupa aset tetap maupun investasi selain aset tetap dikurangi dengan pengeluaran investasi baik berupa investasi terhadap aset tetap maupun investasi dalam bentuk lainnya. Arus kas bersih dari aktivitas ini adalah selisih antara arus kas masuk dari aktivitas investasi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi senilai -Rp103.582.740.025,00 dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.173 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk (Rp)	688.673.847,00	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya	688.673.847,00	-
Arus Kas Keluar (Rp)	104.271.413.872,00	265.807.715.480,00
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.990.770.289,00	55.224.985.888,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.139.374.597,00	84.094.755.629,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.345.833.817,00	124.889.748.339,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	795.435.169,00	598.225.624,00
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(103.582.740.025,00)	(265.807.715.480,00)

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus Kas aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 Tidak ada atau Rp0,00.

Tabel 5.174 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk (Rp)	0,00	192.966.222.944,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	192.961.722.944,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Koperasi	0,00	4.500.000,00
Arus Kas Keluar (Rp)	0,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	192.966.222.944,00

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya

potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/ daerah.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah senilai -Rp7.486.337,00 yang merupakan selisih dari total penerimaan PFK senilai Rp55.204.661.627,02 yang terdiri dari Penerimaan PFK ditahun 2023 sebesar Rp55.200.384.027,02 ditambah dengan Utang PFK Tahun 2023 senilai Rp4.277.600,00 dan Total pengeluaran PFK senilai Rp55.212.147.964,02 yang terdiri atas Pengeluaran PFK ditahun 2023 sebesar Rp55.200.384.027,02 ditambah dengan Utang PFK Tahun 2022 yang terbayar ditahun 2023 sebesar Rp11.763.937,00. Rincian penerimaan dan pengeluaran pada aktivitas transitoris dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.175 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk (Rp)	55.204.661.627,02	74.115.466.950,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	55.204.661.627,02	74.115.466.950,00
	-	-
Arus Kas Keluar (Rp)	55.212.147.964,02	74.104.621.326,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	55.212.147.964,02	74.104.621.326,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(7.486.337,00)	10.845.624,00

5.5.5 Kenaikan/ (Penurunan) Kas

Selang 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atas transaksi-transaksi yang terjadi dan mempengaruhi Kas baik transaksi dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan maupun transitoris terjadi penurunan kas senilai Rp42.175.276.037,24.

Tabel 5.176 Ringkasan Kenaikan / (Penurunan) Kas

URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(42.175.276.037,24)	(9.526.796.733,46)
1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	61.414.950.324,76	63.303.850.178,54
2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(103.582.740.025,00)	(265.807.715.480,00)
3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	192.966.222.944,00
4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(7.486.337,00)	10.845.624,00

5.5.6 Saldo Akhir Kas - LAK

Angka 5.5.1 sampai dengan angka 5.5.4 di atas adalah menjelaskan kronologis atau pembagian dari mutasi Kas Daerah selama Tahun 2023. Dimana selama Tahun 2023 terjadi penurunan kas daerah senilai Rp42.175.276.037,24 dan koreksi atas penggunaan silpa tahun 2022 sebesar Rp97.329.503.991,60 sehingga posisi kas daerah menjadi Rp55.122.753.191,56 yang diperoleh dari rincian sebagai berikut.

Tabel 5.177 Ringkasan Penjelasan Saldo Akhir Las - LAK

URAIAN	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Kas	97.329.503.991,60
- Kenaikan/Penurunan Kas	(42.175.276.037,24)
- Koreksi Silpa	(31.474.762,80)
Saldo Akhir Kas	55.122.753.191,56

Secara lebih terperinci Posisi Kas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.178 Rincian Posisi Kas Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Kas Akhir - LAK	55.122.753.191,56	97.329.503.991,60
Rincian Kas :		
Kas di Kas Daerah	49.480.226.504,62	90.678.575.040,51
Kas di Bendahara Penerimaan	646.086.910,00	9.569.816,09
Kas di Bendahara Pengeluaran	15.628.937,00	7.599.482,00
Kas di BLUD	1.518.422.518,00	3.840.843.637,00
Kas Dana BOSP	526.576.425,00	663.079.204,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.427.802.220,00	2.118.072.875,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.480.838.202,00	0,00
Kas Lainnya	27.171.474,94	11.763.937,00
Saldo Akhir Kas	55.122.753.191,56	97.329.503.991,60

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivasi operasional pada Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.725.250.735.011,75 yang merupakan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023. Jika dibandingkan dengan TA. 2022 senilai Rp1.729.543.774.051,15 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.293.039.039,40 atau 0,25%.

Tabel 5.179 Ekuitas Awal Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	1.725.250.735.011,75	1.729.543.774.051,15

5.6.2 Surplus/Defisit – LO.

Surplus/Defisit - LO Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe per 31 Desember 2023 adalah defisit senilai Rp58.648.919.382,40, Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp22.277.000.365,55 maka terjadi penurunan sebesar Rp36.371.919.016,85 atau 163,27%.

Tabel 5.180 Surplus/Defisit – LO Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Surplus/Defisit-LO	(58,648,919,382.40)	(22,277,000,365.55)	(36,371,919,016.85)

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2023, merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada TA 2023. Koreksi-koreksi tersebut yaitu senilai -Rp11.562.131.542,30, Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp17.983.961.326,15 maka terjadi penurunan sebesar Rp29.546.092.868,45 atau 164,29% dengan rincian sebagai berikut. Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 5.181 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(11,562,131,542.30)	17,983,961,326.15	(29,546,092,868.45)
1 Koreksi Nilai Kas FKTP		45,029,411.00	(45,029,411.00)
2 Koreksi Nilai Investasi		1,914,148,871.18	(1,914,148,871.18)
3 Koreksi Nilai Kewajiban		368,637,225.00	(368,637,225.00)
4 Koreksi Ekuitas lainnya	(11,562,131,542.30)	15,656,145,818.97	(27,218,277,361.27)

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 senilai Rp1.655.039.684.087,05 merupakan perhitungan dari ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit LO ditambah koreksi atas dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.725.250.735.011,75 terdapat penurunan sebesar Rp70.211.050.924,70 atau 4,07%.

Tabel 5.182 Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas Akhir	1,655,039,684,087.05	1,725,250,735,011.75

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Daerah

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Kepulauan Sangihe dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tanggal 14 Juli 1959 dengan nomenklatur Kabupaten Daerah Tingkat II Sangihe dan Talaud, yang kemudian berubah nomenklatur menjadi Kabupaten Sangihe dan Talaud seiring dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan pemberlakuan Otonomi Daerah, pada Tahun 2002 Kabupaten Sangihe dan Talaud telah dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), yang penetapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Selang 5 (lima) Tahun berikut tepatnya Tanggal 23 Mei 2007, kembali diresmikan Daerah Otonomi Baru pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Sangihe dan Talaud sebagai daerah induk kemudian berganti nomenklatur menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara.

Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, setiap akhir tahun anggaran disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menggambarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe tertuang Visi, Misi, maupun strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang terukur. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan kepada Pemerintah dan dievaluasi dengan

tujuan untuk menilai kinerja pemerintah daerah sehingga diketahui prestasinya secara nasional.

2. Kebijakan Pembangunan

Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 5 (lima) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis (Renstra), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Dari segi waktu, dokumen-dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Dokumen Perencanaan Jangka Panjang (20 tahun) yaitu RPJP Daerah, Jangka Menengah (5 tahun) yaitu RPJM Daerah dan Renstra SKPD serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPD dan Renja SKPD

Dengan berakhirnya masa Jabatan Bupati terpilih periode 2017 – 2022 maka visi pembangunan daerah Kabupaten kepulauan Sangihe sesuai RPJMD yakni Kepulauan Sangihe Daerah Perbatasan NKRI, Sebagai Gerbang Maritim Indonesia Yang Maju, Sejahterah Dan Mandiri juga telah selesai. Untuk itu dalam kelanjutan Perencanaan Daerah kedepan maka Berdasarkan hasil analisa isu-isu strategis yang kemudian dikaitkan tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023- 2026.

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2023-2026 tidak terlepas dari RPJPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2025, dimana telah masuk dalam Tahap keempat RPJPD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Adapun Tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah 2023-2026 adalah :

Tabel 6.1 Tabel Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	1 Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan.
		2 Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas,.
		3 Mendorong peran serta pemuda serta memajukan keolahragaan dan jiwa entrepreneur
		4 Mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan informal, termasuk Pelaksanaan Program Paket A dan B.
		5 Mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender
		6 Mendorong pelestarian budaya dan kearifan local
		7 Meningkatkan cakupan terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan non formal
		8 Pemberian bantuan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin

LKPD 2023 – Audited

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		9 Meningkatkan efektifitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta penyehatan lingkungan
2 Meningkatkan sektor strategis unggulan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.	1 Meningkatnya perekonomian rakyat yang berbasis potensi wilayah	1 Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi Masyarakat
		2 Mendorong pengembangan pertanian organic
		3 Mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
		4 Meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi Kelapa , pala dan produk turunannya serta peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
		5 Pengembangan pariwisata budaya heritage
		6 Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan
		7 Meningkatkan produktifitas sektor IKM dan UMKM
		8 Mendorong kinerja ekspor produk unggulan daerah
		9 Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi
3 Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah dan antar pulau	1 Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dan antar pulau	1 Mengembangkan sistem konektivitas antar Wilayah yang berkualitas dan Berkelanjutan
		2 Mendorong penataan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
		3 Mendorong Pembangunan PLBN di Sangihe untuk mendukung Sulut sebagai Super Hub Indonesia Timur
		4 Mendorong transformasi digital di wilayah kabupaten
		5 Mendorong pembangunan wilayah Perbatasan, terluar, dan pulau-pulau kecil
		6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi wilayah
		7 Membangun infrastruktur perdesaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
4 Terwujudnya Pembangunan yang berwawasan lingkungan	1 Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	1 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
		2 Mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum aman dan sanitasi layak
		3 Mendorong upaya mitigasi bencana dan perubahan iklim
		4 Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya
5 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan akuntabel	Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi yang terbuka dan terintegrasi	Percepatan penerapan reformasi birokrasi.
		1. Memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
		2. Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah.
		3. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan dan sinergitas antar wilayah
		4. Mendorong sinergitas program antara Pemerintah Kabupaten dengan Provinsi dan pemerintah pusat

Strategi dan Arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan dan merupakan operasionalisasi dari masing-masing strategi. arah kebijakan akan menjadi petunjuk bagi perumusan kegiatan pada level Renstra. Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan harus dijalankan dan dicapai setiap tahun yang disertai adanya penekanan dan prioritas tahunan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu disusun arah kebijakan tahunan yang berbasis pada proyeksi kebutuhan daerah yang perlu diintervensi setiap tahun. Arah Kebijakan tahunan akan membangun sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah 2023-2026 dengan perencanaan tahunan.

Tabel 6.2 Tabel Arah Kebijakan Tahun 2023 – 2026

TAHUN	ARAH KEBIJAKAN
2023	Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui pengembangan kapasitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan SDA (Perikanan dan Pertanian) menuju pemulihan dan Stabilitas Ekonomi
2024	Memperkuat sektor unggulan daerah dalam pencapaian pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak serta suksesnya pelaksanaan pemilu
2025	Meningkatkan investasi dan mempercepat ekspor wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendukung Provinsi Sulawesi Utara menjadi superhub di Kawasan Timur Indonesia
2026	Memperkuat Investasi dan Ekspor untuk mendukung Kabupaten Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik

3. Kondisi Geografis

Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Ibukota Tahuna memiliki jarak tempuh 142 mil laut dari Manado yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Secara astronomis, Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di antara 2°4'13''- 4°44' 22'' Lintang Utara, 125°9' 28''-125°56' 57'' Bujur Timur, berada diantara Pulau Sulawesi dan Pulau Mindanao (Republik Filipina).

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten mencapai 11.863,58 km² yang terdiri dari daratan seluas 736,98 km² atau 6,2% dan lautan seluas 11.126,60 km² atau 93,8% dengan panjang garis pantai 382.150 m. Disebut sebagai kawasan kepulauan karena terdiri atas 105 buah pulau, di antaranya 79 buah pulau belum berpenghuni dan 26 buah pulau yang berpenghuni, terbagi menjadi 15 Kecamatan, 145 Kampung dan 22 Kelurahan. Kondisi dataran Sangihe umumnya berbukit, dengan tinggi wilayah pemukiman di atas permukaan laut berkisar dari 1–250 meter. Dari segi tingkat kemiringan, wilayah pemukiman di Sangihe sebagian besar landai sisanya sedang. Puncak tertinggi dari dataran Sangihe adalah Gunung Awu dengan ketinggian 1.320 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Republik Filipina
Sebelah Timur	:	Kabupaten Kepulauan Talaud
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Sebelah Barat	:	Laut Sulawesi

4. Gambaran Umum Demografis

Aspek demografi Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

Berdasarkan *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe per 31 Desember 2022, Penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 136.609 jiwa dengan jumlah laki-laki 69.559 jiwa dan perempuan 67.050 jiwa. Penduduk paling banyak ada di Kecamatan Tabukan Utara sebanyak 22.142 jiwa atau 16,21 % dari total penduduk. Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Marore sebanyak 1.608 jiwa atau hanya 1,18 % dari total penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumlah Penduduk menurut kecamatan serta banyaknya penduduk menurut kelompok umur dan agama berdasarkan *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe per 31 Desember 2022, selengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Tabukan Utara	11.516	10.784	22.300
2	Nusa Tabukan	1.771	1.566	3.337
3	Manganitu Selatan	5.591	5.248	10.839
4	Tatoareng	2.410	2.324	4.734
5	Tamako	7.156	7.081	14.237
6	Manganitu+	7.555	7.366	14.921
7	Tabukan Tengah	6.179	5.806	11.985
8	Tabukan Selatan	3.319	3.110	6.429
9	Kendahe	3.759	3.574	7.333
10	Tahuna	7.942	8.105	16.047
11	Tabukan Selatan Tengah	1.516	1.403	2.919
12	Tabukan Selatan Tenggara	1.349	1.220	2.569
13	Tahuna Barat	2.964	2.934	5.898
14	Tahuna Timur	6.168	6.116	12.284
15	Kepulauan Marore	860	802	1.662
	JUMLAH	70.055	67.439	137.494

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe

**Tabel 6.4 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023**

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
00-04	2.751	2.560	5.311
05-09	4.581	4.234	8.815
10-14	5.271	4.891	10.162
15-19	5.624	5.064	10.688
20-24	5.588	5.239	10.827
25-29	5.754	5.280	11.034
30-34	5.843	5.370	11.213
35-39	5.274	4.665	9.939
40-41	5.316	4.783	10.099
45-49	5.110	4.753	9.863
50-54	5.093	4.888	9.981
55-59	4.603	4.511	9.114
60-64	3.680	3.696	7.376
65-69	2.700	2.938	5.638
70-74	1.610	2.138	3.748
>=75	1.257	2.429	3.686
JUMLAH	70.055	67.439	137.494

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe

**Tabel 6.5 Jumlah Penduduk menurut Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2023**

		ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONG- HUCU	KERPER- CAYAAN	TOTAL
1	Tabukan Utara	13.127	8.798	23				352	22.300
2	Nusa Tabukan	1.943	1.121	5				268	3.337
3	Manganitu Selatan	1.489	9.309	41					10.839
4	Tatoareng	14	4.423	296	1				4.734
5	Tamako	134	14.033	68				2	14.237
6	Manganitu+	243	14.361	317					14.921
7	Tabukan Tengah	2.618	9.323	24				20	11.985
8	Tabukan Selatan	344	6.060	24				1	6.429
9	Kendahe	2.853	4.471	8				1	7.333
10	Tahuna	2.820	12.963	260	1	3			16.047
11	Tabukan Selatan Tengah	66	2.846	6				1	2.919
12	Tabukan Selatan Tenggara	87	2.478	4					2.569
13	Tahuna Barat	128	5.750	20					5.898
14	Tahuna Timur	3.152	9.022	102	1	-		7	12.284
15	Kepulauan Marore	162	1.489	11					1.662
	JUMLAH	29.180	106.447	1.209	3	3	0	652	137.494

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe

**Tabel 6.6 Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-Rata Anggota
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK	RATA-RATA ANGGOTA
1	Tabukan Utara	8.110	22.300	2,7
2	Nusa Tabukan	1.146	3.337	2,9
3	Manganitu Selatan	3.929	10.839	2,8
4	Tatoareng	1.726	4.734	2,7
5	Tamako	5.304	14.237	2,7
6	Manganitu+	5.500	14.921	2,7
7	Tabukan Tengah	4.430	11.985	2,7
8	Tabukan Selatan	2.402	6.429	2,7
9	Kendahe	2.622	7.333	2,8
10	Tahuna	5.828	16.047	2,8
11	Tabukan Selatan Tengah	1.091	2.919	2,7
12	Tabukan Selatan Tenggara	964	2.569	2,7
13	Tahuna Barat	2.112	5.898	2,8
14	Tahuna Timur	4.393	12.284	2,8
15	Kepulauan Marore	599	1.662	2,8
	JUMLAH	50.156	137.494	2,7

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe

5. Kondisi Ekonomi

Sektor-sektor yang selama ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Pertanian/Perkebunan, Jasa Administrasi Pemerintahan, Perdagangan, Bangunan/Konstruksi, Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Transportasi Angkutan Laut, Industri pengolahan dan Perbankan dan Pariwisata

a. Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Jasa Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian baik regional maupun nasional, mengingat sektor pertanian terbukti masih dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Pembangunan di sektor pertanian selain bertujuan meningkatkan produksi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pertanian.

Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat mengandalkan sektor pertaniannya, khususnya tanaman perkebunan. Meliputi semua jenis kegiatan tanaman perkebunan yang diusahakan baik oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan di Sangihe masih perkebunan rakyat. Tanpa mengabaikan tanaman perkebunan lainnya, komoditas perkebunan utama yang menjadi andalan di Sangihe adalah kelapa, cengkeh dan pala dan sagu, dengan luas lahan seperti table berikut.

Tabel 6.7 Luas Lahan Tanaman Perkebunan (ha)

TAHUN	KOMODITI				
	Kelapa Dalam	Kelapa Hibrida	Cengkih	Pala	Sagu
2019	25.171,40	305,50	4.158,38	5.885,80	1.649,80
2020	25.159,78	322,90	4.192,85	5.861,80	1.649,80
2021	25.134,78	305,50	4.192,85	6.443,50	1.770,75
2022	25.309,23	315,50	4.223,90	6.828,35	2.103,80
2023	25.069,28	308,50	4.223,90	6.816,65	1.652,75

Sumber : Dinas Pertanian Daerah

Adapun Produksi akan Tanaman Perkebunan dalam 5 Tahun terakhir adalah sebagai berikut

Tabel 6.8 Produksi Tanaman Perkebunan (ton)

TAHUN	KOMODITI				
	Kelapa Dalam	Kelapa Hibrida	Cengkih	Pala	Sagu
2019	24.457,60	502,90	1.878,70	4.285,50	2.320,30
2020	23.675,64	506,86	2.474,00	3.871,03	2.320,25
2021	23.712,21	497,86	-	4.335,00	2.621,01
2022	23.712,21	497,86	-	4.335,50	2.544,74
2023	23.583,57	497,86	7,00	1.104,42	2.546,53

Sumber : Dinas Pertanian Daerah

Selain tanaman perkebunan tanaman pangan juga menjadi salah satu potensi dalam meningkatkan kapasitas tanaman hortikultura di daerah. Komoditas tanaman pangan

dan hortikultura di Sangihe adalah padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, cabe, tomat dan kangkung.

Tabel 6.9 Luas Tanaman pada Lahan Keing (ha)

Tahun	Jenis Tanaman						
	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Cabe	Tomat	Kangkung
2021	9,00	250,30	377,63	163,50	313,00	199,30	38,70
2022	9,00	250,30	377,63	163,55	313,00	199,30	38,70
2023	00	14,82	211,1	115,03	294,10	113,20	42,24

Sumber : Dinas Pertanian Daerah

Tabel 6.10 Produksi Tanaman pada Lahan Kering (ton)

Tahun	Produksi Tanaman pada Lahan Kering						
	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Cabe	Tomat	Kangkung
2021	44,6	151,80	652,50	132,90	313,50	725,90	183,40
2022	44,6	151,80	652,50	132,90	313,50	725,90	183,40
2023	0	27,475	446,80	89,40	121,90	374,00	170,534

Sumber : Dinas Pertanian Daerah

Tabel 6.11 Luas Panen dan Produksi Tanaman pada Lahan Basa

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ha)
2021	14,70	58,80
2022	14,70	58,80
2023	6,00	24,00

Sumber : Dinas Pertanian Daerah

Sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan data Sangihe Dalam Angka Tahun 2021, dan 2022 dan 2023 sektor pertanian, merupakan menyumbang terhadap PDRB Sangihe.

b. Perikanan

Mencakup semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air asin maupun di air tawar. Pengembangan produksi di sektor Perikanan merupakan salah satu potensi andalan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menunjang pendapatan asli daerah. Produksi ikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe berasal dari penangkapan dan budidaya di laut, perikanan darat, hasil budidaya di tambak dan kolam. Produksi perikanan meningkat dari tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan didominasi perikanan laut. Adapun secara lengkapnya dapat di lihat pada table berikut

Tabel 6.12 Produksi Perikanan Menurut Jenis Perikanan (ton)

No.	JENIS PERIKANAN	2021	2022	2023
A.	Perikanan Laut/ Marine Fisheries			
	1. Tangkap	14.967,00	14.969,00	17.542,59
	2. Budidaya	45,77	33,25	31,35
B.	Perikanan Darat			
	1. Perairan	-	-	-
	2. Tambak	76,04	89,25	71,90
	9. Budidaya Kolam	200,36	200,10	208,12
	10. Karamba	-	-	-
	Jumlah	15.289,17	15.294,60	17.853,96

Tabel 6.13 Nilai Produksi Perikanan Menurut Jenis Perikanan (Rupiah)

No.	JENIS PERIKANAN	2021	2022	2023
A.	Perikanan Laut/Marine Fisheries			
	1. Tangkap	150.957.179.239,47	152.974.675.491,22	179.827.771.594,92
	2. Budidaya	889.650.000,00	757.560.000,00	795.825.000,00
B.	Perikanan Darat			
	1. Perairan	-	-	-
	2. Tambak	2.738.750.000,00	3.265.800.000,00	4.546.000.000,00
	11. Budidaya Kolam	8.283.550.000,00	8.269.400.000,00	10.405.000.000,00
	12. Karamba	-	-	-
	Jumlah	164.869.129.239,47	165.267.435.491,22	195.574.596.594,92

Dan juga Berdasarkan Data BPS pada Buku Statistik Daerah Tahun 2023 Pada kategori perikanan laut, banyak rumah tangga perikanan yang menggunakan pancing, termasuk pancing tonda dan kedua terbanyak adalah jaring insang hanyut. Dari sisi produksi, perikanan laut yang menggunakan pukat cincin menghasilkan produksi terbesar yaitu sekitar 7.484 ton. Dari sisi jenis ikan yang diproduksi, ikan layang dan ikan tongkol merupakan ikan yang paling banyak diproduksi dari perikanan laut yaitu 10.383,193 ton dan 1.150,407 ton

c. Jasa Pemerintahan

Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki 15 kecamatan yang terdiri dari 145 desa dan 22 kelurahan. Jika dibagi menurut klasifikasi wilayah, pada tahun 2018 terdapat 161 desa/kel swakarya (96,41 persen), dan 6 desa/kel swasembada (0,03 persen). Berdasarkan jumlah desa, Kecamatan Tabukan Utara merupakan kecamatan yang memiliki desa paling banyak yaitu 24 desa. Secara keseluruhan, terdapat 706 SLS (Satuan Lingkungan Setempat) di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki tiga lembaga utama yang menjalankan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas tersendiri.

Kekuasaan legislatif di Kabupaten Kepulauan Sangihe dipegang oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Jumlah anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Sangehe adalah 25 orang anggota. Dan Untuk Periode 2019-2023 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangehe di isi oleh 9 Partai yakni Partai Golongan Karya (Gokar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Aparatur Sipil Negara(ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (UU No. 5 Tahun 2014), dan berdasarkan data dari Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangehe per 31 Desember 2023 jumlah ASN pada Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe adalah 3373 orang. Dari Jumlah tersebut sebesar 64,96 persen PNS Pemerintah Daerah di Kepulauan Sangehe merupakan pegawai perempuan, dan 35,04 adalah Laki-laki. Sedang berdasarkan golongan kepangkatan, mayoritas PNS berada pada golongan III, yaitu sebanyak 2.192 orang pegawai. PNS yang telah berada pada golongan IV di Kepulauan Sangehe hanya terdapat 639 orang pawai, sedang 542 Pegawai pada Golongan I dan II.

Selain ASN Daerah juga terdapat ASN Pusat yang berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Sangehe berjumlah 521 orang pegawai yang tersebar pada 19 Dinas dan Instansi pemerintah.

d. Perdagangan

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan). Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 pasal II, istilah pasar tradisional dibaca menjadi pasar rakyat dan istilah toko modern dibaca menjadi toko swalayan. Oleh karena itu dalam Kegiatan penyusunan direktori pasar dan pusat perdagangan digunakan istilah pasar rakyat dan toko swalayan. Berdasarkan Data BPS pada Buku Statistik Daerah Tahun 2023 bahwa Jumlah pedagang di Kabupaten Kepulauan Sangehe tahun 2022 tercatat sebanyak 2.531 pedagang. Dan di Tahun 2023 meningkat menjadi 2.554 pedagang, Meskipun dari Jumlah tersebut ada menurun drastis dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak 4.448 pedagang.

Dan berdasarkan Data BPS pada Buku Sangehe dalam angka 2024 bahwa pedagang di Kabupaten Kepulauan Sangehe di tahun 2023 dari Jumlah Sarana Perdagangan menurut Jenisnya sebagian besar pedagang masih menggunakan sarana meja sebagai tempat berdagangnya yaitu sejumlah 1.531 pedagang (59,95 persen), dan pedagang dengan hamparan sejumlah 228 pedagang (8,93) Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang masih sangat sederhana.

Sektor ini berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang sangat penting. Berdasarkan data Sangehe dalam Angka, Tahun 2023 sektor perdagangan menyumbang 16,91 % yakni sebesar 601,73 terhadap PDRB Sangehe. Semakin

meningkatnya pendapatan masyarakat dan kecenderungan budaya konsumtif ternyata berpengaruh positif terhadap sektor ini.

e. Bangunan/Konstruksi

Pada tahun 2023, kontribusi kategori konstruksi mencapai 571,89 miliar rupiah dimana mengalami peningkatan sebesar 54,75 miliar rupiah dari tahun sebelumnya (2022) dengan nilai sebesar 517,14 milyar rupiah atau sebesar 9,90 persen terhadap total perekonomian Kepulauan Sangihe. Kontribusi kategori ini relatif sama selama periode 2019-2023 yaitu berkisar 9-10 persen.

f. Pertambangan dan Energi

Tingginya pembangunan di Sangihe berdampak pada penggunaan sumber daya pertambangan dan penggalian seperti pasir, sirtu, batu, dll. Komoditi penggalian di Kepulauan Sangihe lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan belakangan ini. Namun, aktivitas pertambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe umumnya masih dilakukan secara tradisional. Sebagian besar masyarakat biasanya hanya menjadi pekerja tambang batu. Sementara itu, produksi listrik semakin tahun semakin bertambah. Berdasarkan data PT. PLN Persero, pada tahun 2022 terjadi peningkatan produksi dibandingkan tahun 2021. Listrik terbukti menjadi sebuah bagian utama untuk kelangsungan hidup manusia. Hampir seluruh wilayah di bumi ini sudah membutuhkan energi ini untuk menggerakkan roda kehidupan. Bahkan dalam masalah kedaulatan sebuah Negara, peranan listrik ini sangat di prioritaskan, bahkan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Negara tersebut.

Dari sisi daya terpasang (data BPS), di tahun tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 5.825 kw dari 18.762 Kwh di tahun 2022 menjadi 24.587 Kw di tahun 2023. Sedangkan jumlah pelanggan air bersih dari PDAM mengalami Kenaikan. Jumlah pelanggan pada tahun 2021 hanya sejumlah 11.736 pelanggan, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 12.116 pelanggan. Berdasarkan data dari PDAM, jumlah air disalurkan pada tahun 2022 adalah 2.497.803 m³ yaitu sejumlah Rp 11.702.481,950.

g. Transportasi dan Komunikasi

Sistem transportasi nasional memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, transportasi memiliki fungsi sangat penting dalam pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara kepulauan dimana pembangunan sektor transportasi dirancang untuk tiga tujuan yaitu: mendukung gerak perekonomian, stabilitas nasional dan juga mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan memperluas jangkauan arus distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok nusantara. Jumlah kedatangan pesawat di Bandar Udara Naha pada tahun 2022 sebanyak 242 unit, Hal ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 46 unit. Untuk jumlah kedatangan penumpang, pada tahun 2022 juga naik yaitu sebesar 3.366 orang dari tahun sebelumnya yang hanya 1.009 penumpang. Sama seperti jumlah kedatangan pesawat dan penumpang bagasi juga mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebanyak

7.104 kg dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 1.304 kg. Sama halnya dengan jumlah kedatangan, jumlah keberangkatan pesawat dan penumpang di Bandar Udara Naha mengalami kenaikan pada tahun 2022. Untuk jumlah keberangkatan penumpang, pada tahun 2022 meningkat menjadi sebanyak 2.996 orang. Begitu pula dengan bagasi, pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 7.049 kg. Berdasarkan data Susenas 2022, menunjukkan bahwa 75,69 persen penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan telepon seluler/komputer. Jika dilihat menurut jenis kelamin, tidak terlalu banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, jika dilihat menurut pendidikan tertinggi terdapat perbedaan yang cukup besar antara SD ke bawah dengan SMP ke atas. Penduduk dengan pendidikan SMP ke atas hampir seluruhnya menggunakan telepon seluler/komputer, yaitu sebesar 80,29 persen. Penggunaan telepon seluler meningkat secara tajam dikalangan masyarakat, selain karena biaya pengiriman SMS yang murah, fitur komunikasi juga semakin interaktif. Perkembangan telepon seluler sekarang ini juga menjadi menarik untuk diamati karena penggunaan teknologi yang sekarang terjadi mengisyaratkan kita bahwa kemajuan teknologi komunikasi informasi sekarang ini tidak memiliki batas sama sekali.

h. Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank

Keberadaan dan eksistensi lembaga perbankan dalam mendukung perekonomian daerah diberbagai aspek pelayanan publik telah berlangsung lancar dan semua kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain seperti menerima simpanan, memberikan pinjaman, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat berharga, menyewakan tempat penyimpanan barang berharga. sampai akhir tahun 2022 ada 7 Bank yang ada di Sangihe masing-masing BRI, BNI, Mandiri, BTPN, Prisma Dana) dan 1 lembaga Bank Daerah (Bank SulutGo) serta lembaga keuangan non bank / koperasi seperti PT. Pos, Perusahaan Asuransi, Pegadaian serta Koperasi Unit Desa.

Sektor jasa keuangan dan asuransi mempunyai peran penting dalam mendorong perekonomian yaitu sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan data pada BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa pada tahun 2023, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 110 Koperasi dimana dari tahun sebelumnya mengalami penurunan dari 124 koperasi pada tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Sangihe saat ini sedang berkembang, ditargetkan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah investasi. Investasi merupakan sebuah kegiatan menanam modal dalam jangka waktu cukup lama dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa depan.

i. Pariwisata.

Sektor pariwisata adalah sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa maupun kesempatan kerja (penciptaan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata). Bagi Kabupaten Sangihe,

diharapkan sektor pariwisata mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan, mengingat Sangihe sangat potensial jika dikembangkan sektor pariwisatanya, khususnya wisata bahari. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu lapangan usaha penunjang aktivitas pariwisata. Lapangan usaha ini terdiri dari penyediaan akomodasi baik berbintang maupun tidak berbintang serta penyediaan makan minum termasuk diantaranya restoran. Setelah mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2020, kategori ini mengalami pertumbuhan Positif pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, pertumbuhan kategori ini mencapai besaran 11,22 persen. Sementara untuk kontribusi terhadap PDRB tidak terdapat perubahan yang signifikan. Selama tahun 2020-2021 kontribusi kategori ini terhadap PDRB hanya sekitar 1,09 persen dan tidak mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2022 yaitu 1,09 persen.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, jumlah kunjungan Wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan terlebih di 3 (tiga) Tahun terakhir seperti terlihat pada table berikut

Tabel 6.14 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Kepulauan Sangihe

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	689	22	6	22	78
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	37.860	6.158	26.994	28.330	37.863

Sumber: Dinas Pariwisata Daerah

Bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, diharapkan sektor pariwisata mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan mengingat potensi objek wisata di Sangihe yang menarik, khususnya wisata bahari. Lokasi destinasi wisata di kabupaten Kepulauan Sangihe yang selama ini ramai dikunjungi turis mancanegara dan lokal yakni Puncak Pusunge, Puncak Lose Tanjung Lelapide, Tanjung Bebu, Pantai Panualeng, Pantai Sapaeng, Teluk Sensong, Teluk Talengen, Teluk Kulur, Pantai Embuhanga, Puncak Pusunge, Pulau Leppe, Pantai Kasaraeng, Air Terjun Pempanikiang Air Terjun Sura, Air Terjun Kadadima, Teluk Ngalipaeng, Teluk Lapango, Teluk Batunderang Air Terjun Ellong, Teluk Manalu, Pulau Laotongang, Pulau Batuwingkung, Pulau Beeng Laut, Pulau Beng Darat, Puncak Malamenggu Pantai Salurang, Air Terjun Ngurahlawo, Tanjung Lelapide, Teluk Tamako, Teluk Dagho, Genting Mahumu, Tanjung Bebu, Gunung Sahendarumang, PRP Mangrove (tahna) Air Terjun Puirang, Teluk Tawoali Teluk Manganitu, Makam Raja Makaampo, Makam Tua Manalu, Makam Raja Bataha Santiago, Makam Raja WMP Macodumpis< Makam Raja M Macodompis, Makam Tua Mahumu, Makam Tua Kaluwatu, Makam Nangka, Makam Raja Sangihe, Makam Raja Tatehe Woba, Makam Raja Tompoliu. Islam Tua “Masade” Makam Raja David P. Sarapil, Tengkorak Suku Mindanau Kolam Renang Kolongan Beha, Kolam Renang “Manganitu”, Kolam Renang Sensong, Boulevard Tahuna, Kolam Renang Telletubies Selain itu Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat hamparan panorama bawah laut yang sangat luas dan unik untuk lokasi lokasi *diving*, yaitu pada Pulau Para. Pulau Nitu, Pulau Kahakitang, Pulau Kalama, Plau Dakupang, Pulau Mendaku, Pulau Bebalang, Pulau Batunderang, Pulau Bukide, Pulau Nusa, Pulau Poa, Pulau Liang, Pintu Kota, Batuwingkung, dan Beng darar

Selain berbagai objek diatas, Sangihe juga memiliki tradisi kegiatan budaya yang dilestarikan menjadi kalender tahunan daerah yaitu pelaksanaan Upacara Adat “Tulude”. Agenda ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perayaan HUT Daerah Kepulauan Sangihe, dan dilaksanakan setiap tanggal 31 Januari. Saat pelaksanaan “Tulude”, puluhan ribu masyarakat terhimpun dalam satu prosesi kebersamaan yang mengucapkan syukur kepada “I Genggongalangi Dumatang Saruruang” Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kebaikannya di setahun berlalu dan memohon berkat untuk tahun yang baru, setelah itu dilanjutkan dengan pesta adat dan budaya menampilkan segala jenis kesenian tari dan musik.

6. Prioritas Daerah

Strategi dan Arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan dan merupakan operasionalisasi dari masing-masing strategi. arah kebijakan akan menjadi petunjuk bagi perumusan kegiatan pada level Renstra. Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan harus dijalankan dan dicapai setiap tahun yang disertai adanya penekanan dan prioritas tahunan yang berbeda berdasarkan arah kebijakan tahunan yang berbasis pada proyeksi kebutuhan daerah. Adapun prioritas pembangunan daerah 2023-2026 adalah :

Tabel 6.15 Tabel Prioritas Pembangunan Tahun 2023 - 2026

TAHUN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Kemiskinan Daerah Secara Komprehensif, Konkret Dan Terukur 2. Memperkuat Ekonomi Masyarakat Melalui Peran Industri Kecil Menengah Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Memanfaatkan Potensi Unggulan Daerah (Pertanian Dan Perikanan) Yang Berdaya Guna Dan Berdaya Saing 3. Pemenuhan Infrastruktur, Konektivitas Antar Wilayah Dan Antar Pulau 4. Penguatan Kapasitas Sdm Dan Pemberdayaan Peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menggerakkan Pembangunan Di Daerah 5. Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Akuntabel Di Era Digitalisasi 6. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Serta Mitigasi Dan Pemulihan Pasca Bencana 7. Optimalisasi Pemenuhan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah 8. Pembangunan Kebudayaan Daerah
2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk mendukung sektor unggulan perikanan, perkebunan, pariwisata dan pertanian 2. Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan 3. Percepatan penanggulangan kemiskinan daerah 4. Memperkuat ketahanan pangan daerah untuk menjamin kehidupan masyarakat 5. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah 6. Memperkuat kerjasama antar daerah untuk meningkatkan ekspor di wilayah perbatasan 7. Optimalisasi pemenuhan infrastruktur telekomunikasi daerah 8. Menjamin stabilitas daerah.
2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan investasi melalui pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana 2. Mempercepat ekspor daerah sebagai wilayah perbatasan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat 3. Memperkuat infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah perbatasan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 7. Optimalisasi pemenuhan infrastruktur telekomunikasi daerah.
2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama antar daerah melalui produk unggulan untuk menciptakan ekspor yang berkelanjutan 2. Penguatan kapasitas SDM Kabupaten 3. Mengoptimalkan keunggulan budaya, wisata bahari dan kuliner daerah 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik 7. Optimalisasi Pemenuhan infrastruktur telekomunikasi daerah.

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sangihe Tahun 2023. Catatan atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan mudah dipahami oleh pembaca luas sehingga laporan yang disampaikan bersifat informatif dan dapat memfasilitasi upaya untuk memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan efisiensi sumber daya. Informasi yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi realisasi anggaran dan posisi keuangan selaku entitas pelaporan dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi sehingga seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta telah berupaya secara maksimal memenuhi acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diharapkan dapat memberikan peningkatan dan perbaikan pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kepl. Sangihe menuju ke arah transparansi dan akuntabilitasnya. Dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mudah-mudahan pembahasannya dapat berjalan dengan lancar dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan disajikannya laporan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi baik informasi keuangan maupun non keuangan bagi seluruh pembaca sehingga dapat bermanfaat untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemampuan dalam penerapan Pengelolaan Keuangan yang baik. *Somahe Kai Kehage* (maju terus walau ada rintangan).*n*


PJ. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H. M.H

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG			SALDO AKHIR PIUTANG		
			4	5	6	7=4+5-6		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak	2.613.344.581,00	2.129.184.422,00	539.194.434,00	4.203.334.569,00		
2	Dinas Perhubungan Daerah	Piutang Retribusi	159.010.000,00	-	-	159.010.000,00		
3	Sekretariat Daerah	Piutang Retribusi	317.900.000,00	199.350.000,00	113.850.000,00	403.400.000,00		
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	1.880.059.799,00	-	1.880.059.799,00		
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang lain-lain PAD yang Sah	1.882.526.050,96	232.670.238,00	26.786.073,96	2.088.410.215,00		
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Piutang Transfer Antar Daerah	11.468.952.470,00	12.668.158.991,00	12.526.477.908,00	11.610.633.553,00		
7	Inspektoral Daerah	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3.895.816.270,63	-	3.500.000,00	3.892.316.270,63		
8	Dinas Pekerjaan Umum Daerah	Piutang lainnya	24.133.800,00	57.103.991,40	-	81.237.791,40		
9	Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna	Piutang lainnya	3.325.884.851,00	4.491.242.700,00	3.320.144.851,00	4.496.982.700,00		
		Jumlah	23.687.568.023,59	21.657.770.141,40	16.529.953.266,96	28.815.384.898,03		

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H., M.H.

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	97.317.739.854,00	97.286.265.291,80	(31.474.562,20)	99,97
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	97.317.739.854,00	97.286.265.291,80	(31.474.562,20)	99,97
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	82.317.739.854,00	82.286.265.291,80	(31.474.562,20)	99,96
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	55.118.475.591,56	60.573.839.687,56	0



PJ BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H., M.H.



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Pajak	4.203.334.569,00	1.317.731.361,02	2.885.603.207,98
2	Piutang Retribusi	562.410.000,00	319.056.750,00	243.353.250,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.880.059.799,00	9.400.298,99	1.870.659.500,01
4	Piutang lain-lain PAD yang Sah	2.088.410.215,00	1.943.665.597,42	144.744.617,58
5	Piutang Transfer Antar Daerah	11.610.633.553,00	58.053.167,79	11.552.580.385,21
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3.892.316.270,63	3.892.316.270,63	-
7	Piutang lainnya	4.578.220.491,40	115.246.379,00	4.462.974.112,40
	Jumlah	28.815.384.898,03	7.655.469.824,85	21.159.915.073,18

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H, M.H

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5=3-4
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	644.100.000,00	644.100.000,00	0,00
	Jumlah	644.100.000,00	644.100.000,00	0,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H, M.H

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



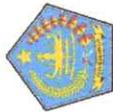
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/ PIHAK KE TIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	BENTUK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN	8 PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	9=7+8 JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN INI	10 SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	11 HASIL PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN INI	12 JUMLAH MODAL YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=9-12
1		PT. PPSU Manado		Saham	250.000.000,00	250.000.000,00		250.000.000,00				250.000.000,00
2		PT. Bank Sulut		Saham	11.848.300.000,00	11.848.300.000,00		11.848.300.000,00				11.848.300.000,00
3		PDAM			2.260.493.545,80	2.413.592.094,38	(153.098.548,58)	2.260.493.545,80				2.260.493.545,80
4		PD.Pembangunan Bersatu										-
Jumlah												14.358.793.545,80

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H., M.H.

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2				
1	SEKRETARIAT DPRD	24.299.063.055,31	1.007.225.412,00	212.976.519,00	25.093.311.948,31
2	SEKRETARIAT DAERAH	105.536.612.709,18	429.581.000,00	1.233.801.500,00	104.732.392.209,18
3	KECAMATAN TAHUNA	10.785.911.033,34	441.965.375,00	246.207.216,00	10.981.669.192,34
4	KECAMATAN MANGANITU	1.522.956.538,71	16.650.000,00	12.675.000,00	1.526.931.538,71
5	KECAMATAN TAMIako	2.575.708.633,00	17.345.000,00	137.257.333,00	2.455.796.300,00
6	KECAMATAN MANGANITU SELATAN	602.822.325,62	14.000.000,00	44.602.333,00	572.219.992,62
7	KECAMATAN TABUKAN SELATAN	1.416.467.703,00	36.841.820,00	13.440.000,00	1.439.869.523,00
8	KECAMATAN TABUKAN TENGAH	1.494.376.348,00	143.913.000,00	2.040.000,00	1.636.249.348,00
9	KECAMATAN TABUKAN UTARA	7.655.139.125,17	22.219.938,00	144.155.748,00	7.533.203.315,17
10	KECAMATAN KENDAHE	1.399.322.066,00	32.966.000,00	-	1.432.288.066,00
11	KECAMATAN NUSA TABUKAN	788.040.248,04	177.943.114,00	98.245.000,00	867.738.362,04
12	KECAMATAN TATOARENG	659.554.550,40	-	143.488.250,00	516.066.300,40
13	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH	1.732.997.044,16	17.685.314,00	82.172.311,91	1.668.510.046,25
14	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA	2.268.470.787,06	-	6.250.000,00	2.262.220.787,06
15	KECAMATAN TAHUNA TIMUR	8.084.229.221,49	524.431.800,00	51.955.800,00	8.556.705.221,49
16	KECAMATAN TAHUNA BARAT	9.579.320.273,58	298.518.000,00	50.706.000,00	9.827.132.273,58
17	KECAMATAN KEPULAUAN MARORE	1.058.325.881,00	3.289.992,00	24.795.575,00	1.036.820.298,00
18	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	7.478.841.023,60	-	39.984.135,00	7.438.856.888,60
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	1.002.224.382.576,00	33.116.037.170,39	6.695.148.442,79	1.028.645.271.303,60
20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH	43.004.449.260,10	-	12.500.000,00	42.991.949.260,10
21	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	31.698.846.341,33	1.337.232.110,00	240.250.000,00	32.795.828.451,33

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2				
22	DINAS KESEHATAN DAERAH	551.339.065.384,23	36.093.387.545,00	12.964.017.660,40	574.468.435.268,83
23	DINAS PENDIDIKAN DAERAH	254.836.153.973,24	24.617.184.416,59	5.912.818.931,11	273.540.519.458,72
24	DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	15.232.172.860,75	285.331.900,00	73.050.000,00	15.444.454.760,75
25	DINAS SOSIAL DAERAH	1.698.146.409,00	27.168.136,00	196.720.000,00	1.528.594.545,00
26	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	5.186.721.609,00	55.000.000,00	105.000.000,00	5.136.721.609,00
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	764.680.100,00	42.353.000,00	135.100.000,00	671.933.100,00
28	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH	9.332.842.328,00	99.999.900,00	424.384.279,00	9.008.457.949,00
29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	13.964.936.082,37	-	-	13.964.936.082,37
30	DINAS PERTANIAN DAERAH	35.070.874.686,86	-	-	35.070.874.686,86
31	DINAS PANGAN DAERAH	468.916.825,00	7.500.000,00	-	476.416.825,00
32	DINAS PERIKANAN DAERAH	65.359.920.273,02	6.131.250,00	3.390.644.184,70	61.975.407.338,32
33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	87.631.489.497,49	4.090.909,00	-	87.635.580.406,49
34	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	6.410.857.636,10	16.697.624.125,00	252.078.300,00	22.856.403.461,10
35	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	463.451.242,00	20.574.000,00	23.900.000,00	460.125.242,00
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	20.561.398.113,71	299.181.500,00	-	20.860.579.613,71
37	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	2.390.705.950,22	-	316.979.261,33	2.073.726.688,89
38	INSPEKTORAT DAERAH	3.415.445.031,22	144.067.815,00	129.559.498,00	3.429.953.348,22
39	BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.620.105.486,00	30.300.000,00	-	1.650.405.486,00
40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	45.916.782.993,36	34.800.000,00	697.264.782,00	45.254.318.211,36
41	DINAS PARIWISATA DAERAH	16.770.959.302,97	90.260.000,00	304.140.872,00	16.557.078.430,97
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	1.649.873.041,67	20.650.000,00	329.914.875,00	1.340.608.166,67
43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH	2.535.126.901,67	63.950.000,00	142.294.526,67	2.456.782.375,00
44	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33.446.434.822,85	-	1.266.693.712,50	32.179.741.110,35
45	BADAN KEPEGAWAJAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH	3.605.027.929,03	649.951.000,00	343.087.833,00	3.911.891.096,03
46	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	1.944.167.313,90	815.121.860,00	184.195.580,00	2.575.093.593,90
47	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	3.299.807.655,00	112.522.726,00	2.181.816,00	3.410.148.565,00
	TOTAL	2.450.781.900.192,73	117.854.995.127,98	36.686.677.275,41	2.531.950.218.045,30

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



AMBERT HUPPY WOUNDE, S.H, M.H

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2022	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	147.086.829.337,64	97.340.200,00	1,00	147.184.169.536,64
2	Peralatan dan Mesin	445.658.559.777,45	33.322.687.721,59	21.991.607.806,92	456.989.639.692,12
3	Gedung dan Bangunan	704.163.559.209,22	27.274.374.597,00	6.825.070.472,00	724.612.863.334,22
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.116.305.522.488,26	48.023.776.129,00	7.659.864.038,49	1.156.669.434.578,77
5	Aset Tetap Lainnya	23.198.645.109,16	842.768.369,00	210.134.957,00	23.831.278.521,16
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.368.784.271,00	8.294.048.111,39	-	22.662.832.382,39
	Jumlah	2.450.781.900.192,73	117.854.995.127,98	36.686.677.275,41	2.531.950.218.045,30

h

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H, M.H.

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
 PER 31 DESEMBER 2023



NO	SKPD	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI										REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH			BERKURANG								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN					
1	Dinas Pekerjaan Umum Daerah		39.880.080,00	6.638.044.451,39								6.677.924.531,39		
2	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah	14.368.784.271,00										14.368.784.271,00		
3	Dinas Kesehatan Daerah		1.530.523.000,00									1.530.523.000,00		
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		85.600.580,00									85.600.580,00		
	Jumlah		1.656.003.660,00	6.638.044.451,39								22.662.832.382,39		

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H, M.H

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
 PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	200.811.645.964,41	2.985.387.752,07	1.535.242.000,00	202.261.791.716,48
2	Inspektorat Daerah	11.028.977.771,49	5.377.946.623,06	3.366.118.306,72	13.040.806.087,83
	Jumlah	211.840.623.735,90	8.363.334.375,13	4.901.360.306,72	215.302.597.804,31

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H., M.H.

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2023



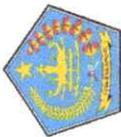
NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembiayaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan	16.000.000.000,00	1.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	16.000.000.000,00	-
Jumlah			16.000.000.000,00	1.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	16.000.000.000,00	-

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H., M.H.

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 PER 31 DESEMBER 2023



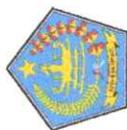
NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang PFK	11.763.937,00	4.277.600,00	11.763.937,00	4.277.600,00
2	Utang Bunga	-	1.027.034.440,00	-	1.027.034.440,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	26.800.241.440,00	-	26.800.241.440,00
4	Pendapatan Sewa diterima Dimuka	61.411.456,20	2.506.849,32	29.641.929,75	34.276.375,77
5	Utang Belanja	13.934.609.407,00	15.327.113.003,00	12.522.824.679,00	16.738.897.731,00
6	Utang jangka Pendek Lainnya	187.206.504,94	-	187.206.504,94	-
	Jumlah	14.194.991.305,14	43.161.173.332,32	12.751.437.050,69	44.604.727.586,77

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H, M.H.

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
 PER 31 DESEMBER 2023

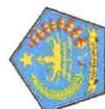


NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang Dana PEN	192.961.722.944,00		26.841.146.423,00	166.120.576.521,00
	Jumlah	192.961.722.944,00	-	26.841.146.423,00	166.120.576.521,00

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H, M.H

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DI ANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H, M.H

LAMPIRAN XX.1
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

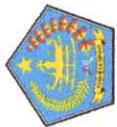


NO	BUMI/PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER a)	STATUS b)	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DI SETOR	BPYDS	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x 18	
1	Bidang Air Minum																		
	1. PDAM Tahuna			7.654.657.439,33	3.445.396.531,78	97.640.576.480,00	108.740.630.451,11	4.987.319.912,58	820.000,00	4.988.139.912,58			96.375.028.070,18	5.379.102.468,34		103.754.130.538,52	100		
	Sub Total			7.654.657.439,33	3.445.396.531,78	97.640.576.480,00	108.740.630.451,11	4.987.319.912,58	820.000,00	4.988.139.912,58			96.375.028.070,18	5.379.102.468,34		103.754.130.538,52	100		
	Total Seluruh Bidang Industri			7.654.657.439,33	3.445.396.531,78	97.640.576.480,00	108.740.630.451,11	4.987.319.912,58	820.000,00	4.988.139.912,58	-	-	96.375.028.070,18	5.379.102.468,34	-	103.754.130.538,52	100	-	

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 ALBERT HUPPY WONDÉ, S.H., M.H.

LAMPIRAN XX.2
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	BUMD/PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER a)	STATUS b)	PENDAPATAN	BEBAN	LABA (RUGI) KOTOR	PENDAPATAN DILUAR USAHA	BEBAN DI LUAR USAHA	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Air Minum								
	1. PDAM Tahuna			11.550.391.650,00	11.550.096.856,00	294.794,00	944.106,00	154.337.448,58	(153.098.548,58)
	Sub Total			11.550.391.650,00	11.550.096.856,00	294.794,00	944.106,00	154.337.448,58	(153.098.548,58)
	Total Seluruh Bidang Industri			11.550.391.650,00	11.550.096.856,00	294.794,00	944.106,00	154.337.448,58	(153.098.548,58)

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 ALBERT HUPPY WOUNDE, S.H., M.H.

LAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Daftar Isi	
II. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan	
III. Laporan Keuangan :	
- Laporan Realisasi Anggaran	1
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	2
- Neraca	3
- Laporan Operasional	4
- Laporan Arus Kas	5 - 6
- Laporan Perubahan Ekuitas	7
IV. Catatan Atas Laporan Keuangan	8 - 12
V. Opini Auditor Independen	



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA**

Jln. Tatehe Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna
Telp. (0432) 24014, 21033, 24411 Fax (0432) 24010 Kode Pos 95811
Website : <https://rsdliunkendage.sangihekab.go.id/> E-mail : rliunkendage@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
RSD LIUN KENDAGE TAHUNA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	dr. Aprikonus D. Loris, Sp.PD
Alamat Kantor	:	Jl. Tatehe Kelurahan Apengsembeka Kec. Tahuna
Telepon	:	0821-9190-9346
Jabatan	:	Direrktur

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan RSD Liun Kendage Tahuna.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan RSD Liun Kendage Tahuna telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan RSD Liun Kendage Tahuna tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam RSD Liun Kendage Tahuna.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tahuna,2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
LIUN KENDAGE TAHUNA



dr. APRIKONUS D. LORIS, Sp.PD
PEMBAWA TINGKAT I
NIP. 19810429 200804 1 001

Handwritten signature

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
PENDAPATAN - LRA				
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	47.934.425.912	38.621.382.837	(9.313.043.075)	80,57%
Pendapatan APBD	17.264.894.010	74.873.167.218	57.608.273.208	433,67%
Pendapatan Hasil Kerja Sama	58.538.571	85.478.992	26.940.421	146,02%
Lain - Lain Pendapatan BLUD yang Sah	193.653.817	223.970.070	30.316.253	115,65%
Jumlah Pendapatan - LRA	65.451.512.310	113.803.999.117	48.322.170.554	660,27%
BELANJA OPERASI - LRA				
Belanja Pegawai	706.448.140	767.140.100	60.691.960	-
Belanja Barang dan Jasa	49.382.230.759	49.663.454.413	281.223.654	100,57%
Jumlah Belanja Operasi - LRA	50.088.678.899	50.430.594.513	341.915.614	100,57%
BELANJA MODAL - LRA				
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.629.254.530	24.937.301.043	13.308.046.513	214,44%
Belanja Modal Gedung Bangunan	6.056.000.000	31.636.936.040	25.580.936.040	522,41%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	16.252.137.000	16.252.137.000	#DIV/0!
Jumlah Belanja Modal - LRA	17.685.254.530	72.826.374.083	55.141.119.553	411,79%
Jumlah Belanja	67.773.933.429	123.256.968.596	55.483.035.167	181,86%
SURPLUS/DEFISIT	(2.322.421.119)	(9.452.969.479)	(7.160.864.613)	407,03%
PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	3.840.843.637	13.748.358.571	9.907.514.934	357,95%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	1.518.422.518	4.295.389.092	2.746.650.321	282,88%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

NO	URAIAN	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	4.295.389.092	13.748.358.571
2	Penggunaan SAL	3.840.843.637	13.748.358.571
3	Subtotal (1 - 2)	454.545.455	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	1.518.422.518	4.295.389.092
5	Subtotal (3 + 4)	1.972.967.973	4.295.389.092
6	Penyetoran ke kas negara Pengembalian insentif pajak tahun 2021	(454.545.455)	
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	1.518.422.518	4.295.389.092

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NERACA
PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	2023	2022	Uraian	Catatan	2023	2022
ASET							
ASET LANCAR							
Kas dan setara kas	5.3.1	1.518.422.518	4.295.389.092	Utang Usaha	5.3.7	-	-
Piutang usaha	5.3.2	6.334.980.915	5.207.732.710	Utang Pihak Ketiga		31.459.700	44.322.000
Akumulasi penyisihan piutang usaha	5.3.3	-	-	Utang Bunga		-	-
Piutang lain-lain		-	-	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		2.119.265.350	1.655.866.550
Persediaan	5.3.4	1.066.929.200	1.090.939.674	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
Pajak masukan		-	-	Utang Beban		-	-
JUMLAH ASET LANCAR		8.920.332.633	10.594.061.476	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
ASET TIDAK LANCAR							
ASET TETAP							
Harga perolehan :	5.3.5			Utang Jangka Panjang		-	-
Tanah		3.195.204.000	3.195.204.000	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
Peralatan dan Mesin		135.421.336.450	123.792.081.920				
Gedung dan Bangunan		131.618.642.948	127.085.642.948				
Jalan, Jaringan, dan Instalasi		20.420.666.184	20.420.666.184				
Aset Tetap Lainnya		53.060.000	53.060.000				
Jumlah Harga Perolehan Aset		280.708.909.582	274.546.655.052				
Akumulasi Penyusutan		(95.346.634.297)	(75.523.472.237)	EKUITAS	5.3.8	223.269.102.439	227.523.652.311
JUMLAH ASET TETAP		185.362.275.285	199.023.182.815	Ekuitas		223.269.102.439	227.523.652.311
ASET LAINNYA							
Aset Lain-lain	5.3.6	19.606.696.571	19.606.696.571	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		225.419.827.489	229.223.940.861
Konstruksi Dalam Penyelesaian		1.530.523.000	-				
JUMLAH ASET LAINNYA		21.137.219.571	19.606.696.571				
JUMLAH ASET		225.419.827.489	229.223.940.861				

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

R

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
PENDAPATAN - LO				
Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan dari masyarakat	49.067.585.868	39.039.025.852	10.028.560.016	26%
Hasil Kerja Sama dengan pihak lain	51.881.820	72.365.255	(20.483.435)	-28%
Pendapatan APBD	17.264.894.010	74.873.167.218	(57.608.273.208)	-77%
Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	194.398.817	225.205.070	(30.806.253)	-14%
<i>Jumlah Pendapatan - LO</i>	<u>66.578.760.515</u>	<u>114.209.763.395</u>	<u>(47.631.002.880)</u>	<u>-42%</u>
BEBAN USAHA - LO				
Beban Pegawai	706.448.140	660.370.100	46.078.040	7%
Beban Barang Habis Pakai	16.566.968.354	13.845.657.704	2.721.310.650	20%
Beban Jasa	31.876.496.953	26.863.235.302	5.013.261.651	19%
Beban Pemeliharaan	754.979.369	471.774.125	283.205.244	60%
Beban Perjalanan Dinas	207.796.557	229.163.432	(21.366.875)	-9%
Beban Penyusutan Aset	19.823.162.060	14.587.831.302	5.235.330.758	36%
Jumlah Beban	<u>69.935.851.433</u>	<u>56.658.031.965</u>	<u>13.277.819.468</u>	<u>132%</u>
Surplus/Defisit Operasional	<u>(3.357.090.918)</u>	<u>57.551.731.430</u>	<u>(60.908.822.348)</u>	<u>-106%</u>
KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO				
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-	-
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	-	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	<u>(3.357.090.918)</u>	<u>57.551.731.430</u>	<u>(60.908.822.348)</u>	<u>-106%</u>
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA - LO				
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
SURPLUS/DEFISIT-LO	<u>(3.357.090.918)</u>	<u>57.551.731.430</u>	<u>(60.908.822.348)</u>	<u>-106%</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

N

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	Arus Kas Masuk		
	• Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	47.934.425.912	38.621.382.837
	• Pendapatan APBD	17.264.894.010	74.873.167.218
	• Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	-
	• Lain - Lain Pendapatan BLUD yang Sah	58.538.571	85.478.992
	• Pendapatan hibah	-	-
	• Lain - Lain Pendapatan BLUD yang Sah	193.653.817	223.970.070
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	<u>65.451.512.310</u>	<u>113.803.999.117</u>
	Arus Kas Keluar		
	• Belanja Pegawai	706.448.140	767.140.100
	• Belanja Barang dan Jasa	49.382.230.759	49.663.454.413
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	<u>50.088.678.899</u>	<u>50.430.594.513</u>
	Arus Bersih Kas dari Aktivitas Operasi	<u><u>15.362.833.411</u></u>	<u><u>63.373.404.604</u></u>
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	Arus Kas Masuk		
	• Penjualan atas Tanah	-	-
	• Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
	• Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
	• Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	• Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
	• Penjualan Aset Lainnya	-	-
	• Penerimaan dari Investasi	-	-
	• Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Arus Kas Keluar		
	• Perolehan Tanah	-	-
	• Perolehan Peralatan dan Mesin	11.629.254.530	24.937.301.043
	• Perolehan Gedung dan Bangunan	6.056.000.000	31.636.936.040
	• Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	16.252.137.000
	• Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
	• Perolehan Aset Lainnya	-	-
	• Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-
	• Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	<u>17.685.254.530</u>	<u>72.826.374.083</u>
	Arus Bersih Kas dari Aktivitas Investasi	<u><u>(17.685.254.530)</u></u>	<u><u>(72.826.374.083)</u></u>

B

3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Masuk

- Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
Jumlah Arus Masuk Kas

-	-
-	-

Arus Keluar Kas

- Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Bersih Kas dari Aktivitas Transitoris

454.545.455	
454.545.455	-
(454.545.455)	-

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK

(2.776.966.574) (9.452.969.479)

KAS DAN BANK AWAL TAHUN

4.295.389.092 13.748.358.571

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN

1.518.422.518 4.295.389.092

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	2023	2022
	Rp	Rp
EKUITAS AWAL	227.523.652.311	154.782.037.269
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.357.090.918)	57.551.731.430
DAMPAK KUMULATIF KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
- Koreksi Persediaan	-	-
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
- Koreksi Ekuitas Lainnya	(897.458.954)	15.189.883.612
EKUITAS AKHIR	<u>223.269.102.439</u>	<u>227.523.652.311</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

5.1 GAMBARAN UMUM

a. Struktur Organisasi

Susunan Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| - Direktur | : | dr. Aprikonus D. Loris, Sp.PD |
| - Kepala Bagian Tata Usaha | : | Maria Sumilat, SE |
| - Kepala Bidang Keperawatan | : | Deckie R. Kawuka S.Kep, Ns |
| - Kepala Bidang Pelayanan | : | Ram Marnex Tampilang, S.Kep |
| - Kepala Bidang Rekam Medis | : | dr. Rosmalam Malibu |
| - Dewan Pengawas: | | |
| Ketua | : | dr. Aprikonus D. Loris, Sp.PD |
| Bendahara Pengeluaran | : | Sovia Devi Potoboda, SE |
| Bendahara Penerimaan | : | Erni Makawimbang |
| Pengelolaan Barang RSUD | : | Nonce R. Lanongbuka |

5.2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

BLUD merupakan entitas pelaporan satuan kerja pelayanan yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.

Dalam penyusunan laporan keuangan RSUD Liun Kendage Tahuna menggunakan basis akrual, dimana pengukurannya menggunakan nilai historis dengan mata uang rupiah.

b. Sistem Akuntansi BLUD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLU dan PMK No. 76/PMK/05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan BLUD menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pernyataan Nomor 13 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. Piutang

Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. RSUD Liun Kendage Tahuna, menetapkan estimasi kerugian piutang tak tertagih sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----|
| - Piutang BPJS (Ranap) | : | 11% |
| - Piutang BPJS (Non Ranap) | : | 10% |
| - Piutang Asuransi Swasta Lain | : | 10% |
| - Piutang perorangan | : | 12% |
| - Piutang perorangan Lainnya | : | 0% |

d. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO). Pencatatan persediaan bahan operasi dan bahan kimia dilakukan dengan *physical inventory method*, sedangkan persediaan bahan instalasi menggunakan perpetual *inventory method*.

e. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset Tetap dicatat dengan harga perolehan, sedangkan penyusutannya dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

5.3 PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI

1 KAS DAN SETARA KAS	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Akun ini terdiri dari :		
Kas :		
Kas Bendahara Penerimaan	22.636.477	47.495.298
Kas Bendahara Pengeluaran	33.477.688	29.578.752
Bank :		
Bank SulutGo Cab. Tahuna (0076)	1.453.617.397	2.539.270.135
Bank SulutGo Cab. Tahuna (0064)	7.220.201	16.367.220
Bank BNI Cab. Tahuna (4895)	1.470.755	1.662.677.687
Tunai Bendahara BLUD		
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>1.518.422.518</u>	<u>4.295.389.092</u>

Saldo sebesar Rp.1.518.422.518,- tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 yang ada di Kas baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran serta yang ada di Bank.

2 PIUTANG PENDAPATAN	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Akun ini terdiri dari :		
Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD (Pasien Umum)	2.088.410.215	1.881.847.859
Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD (BPJS)	4.238.530.700	3.311.933.100
Piutang PKS 2023	1.000.000	7.656.751
Piutang Tagihan Air 2023	7.040.000	6.295.000
Jumlah Piutang Usaha	<u>6.334.980.915</u>	<u>5.207.732.710</u>

3 PENYISIHAN PIUTANG USAHA	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Akun ini terdiri dari :		
Penyisihan Piutang Usaha	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Usaha	<u>-</u>	<u>-</u>

Sampai dengan saat ini pihak RSUD Liun Kendage Tahuna belum pernah menyisihkan dan membentuk Penyisihan Piutang

4 PERSEDIAAN	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Akun ini terdiri dari :		
Persediaan obat & BMHP	1.055.575.657	1.080.436.028
Persediaan Perlengkapan Kantor/Alat Kebersihan (Anggaran BLUD)	1.398.000	6.987.250
Persediaan bahan makanan pokok pasien (Anggaran BLUD)	8.655.942	1.185.900
Persediaan bahan bakar minyak tanah (Anggaran BLUD)	613.600	2.330.496
Persediaan barang kertas & cover	375.000	-
Persediaan barang alat listrik	311.000	-
Jumlah Persediaan	<u>1.066.929.200</u>	<u>1.090.939.674</u>

5 ASET TETAP	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Akun ini terdiri dari :		
Harga perolehan :		
Tanah	3.195.204.000	3.195.204.000
Peralatan dan Mesin	135.421.336.450	123.792.081.920
Gedung dan Bangunan	131.618.642.948	127.085.642.948
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	20.420.666.184	20.420.666.184
Aset Tetap Lainnya	53.060.000	53.060.000
Nilai Histori Aset Tetap	<u>290.708.909.582</u>	<u>274.546.655.052</u>
Akumulasi penyusutan :		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(95.346.634.297)	(75.523.472.237)
Nilai buku Aset Tetap	<u>195.362.275.285</u>	<u>199.023.182.815</u>

N

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

6 ASET LAINNYA

Akun ini terdiri dari :	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aset Lain-lain	19.606.696.571	19.606.696.571
Konstruksi Dalam Penyelesaian	1.530.523.000	-
Jumlah Aset Lain-lain	<u>21.137.219.571</u>	<u>19.606.696.571</u>

7 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari :	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Utang Usaha	-	-
Utang Pihak Ketiga	31.459.700	44.322.000
Utang Pajak	-	-
Utang Jasa Pelayanan	2.119.265.350	1.655.966.550
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	<u>2.150.725.050</u>	<u>1.700.288.550</u>

8 EKUITAS

Akun ini terdiri dari :	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ekuitas	223.269.102.439	227.523.652.311
Jumlah Ekuitas	<u>223.269.102.439</u>	<u>227.523.652.311</u>

9 PENDAPATAN OPERASIONAL - LRA

Akun ini terdiri dari :	<u>2023</u>	<u>2022</u>
A. PENDAPATAN USAHA		
- Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat:		
Pendapatan Pasien Umum	2.156.705.712	2.436.123.837
Pendapatan Pasien BPJS	45.777.720.200	36.185.259.000
<i>Jumlah Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat</i>	<u>47.934.425.912</u>	<u>38.621.382.837</u>
- Pendapatan Hasil Kerjasama:		
PKS Kimia Farma	57.538.571	64.798.992
PKS Kantin Anugerah	-	4.680.000
PKS Fotocopy "RUT"	1.000.000	1.000.000
PKS ATM	-	15.000.000
<i>Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama</i>	<u>58.538.571</u>	<u>85.478.992</u>
- Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah:		
Pendapatan Jasa Giro	119.088.917	167.100.270
Denda Keterlambatan	-	-
Pendapatan Materai	10.000	150.000
Pembayaran Oksigen	43.000.000	30.125.000
Pembayaran Air	1.270.000	2.680.000
Sampah Medis	6.019.900	2.310.000
Praktek Mahasiswa	24.265.000	21.604.800
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah</i>	<u>193.653.817</u>	<u>223.970.070</u>
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL - LRA	<u>48.186.618.300</u>	<u>38.930.831.899</u>

A

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

B. PENDAPATAN NON USAHA

Pendapatan Non Usaha ini merupakan Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam bentuk APBD sepanjang tahun 2023 dan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan dari APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	17.264.894.010	74.873.167.218
--	-----------------------	-----------------------

C. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan		
- Penggunaan SiLPA	3.840.843.637	13.748.358.571
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LRA	3.840.843.637	13.748.358.571

10 BEBAN USAHA - LRA

Akun ini terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Gaji dan Tunjangan	-	-
Tambahan Penghasilan PNS	-	-
Beban Pegawai	706.448.140	324.307.600
Uang Lembur PNS & Non PNS	-	442.832.500
Jumlah Belanja Pegawai	706.448.140	767.140.100

b. Belanja Barang dan Jasa

(1) Belanja Bahan Habis Pakai

* Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	147.334.250	106.238.520
* Belanja Makanan Pokok Pasien	1.669.486.853	1.607.342.858
* Belanja Isi Tabung Gas Oksigen	982.474.240	954.864.342
* Belanja Bahan Baku Bangunan	37.172.300	8.720.000
* Belanja Bahan Lainnya	246.306.070	220.949.910
* Belanja Suku Cadang Lainnya	10.000.000	59.516.486
* Belanja ATK	191.452.734	291.488.705
* Belanja Kegiatan Kantor - Kertas & Cover	162.880.199	189.254.787
* Belanja Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	19.871.000	18.721.000
* Belanja Benda Pos, Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	7.000.000	4.000.000
* Belanja Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	-	-
* Belanja Kegiatan Kantor - Alat Listrik	134.262.100	50.558.685
* Belanja Obat	12.906.844.034	10.320.706.114
* Belanja Makan & Minuman Rapat	26.399.500	11.056.476
* Belanja Makan & Minuman Tamu	1.474.600	2.239.821
Jumlah Belanja Bahan Habis Pakai	16.542.957.880	13.845.657.704

(2) Belanja Jasa Kantor

* Belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan	23.605.076.012	26.194.391.431
* Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.472.879.808	5.312.450.000
* Belanja Jasa Tenaga Ahli	327.150.000	436.250.000
* Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keu	76.943.527	10.787.265
* Belanja Tagihan Air	365.709.100	475.502.200
* Belanja Tagihan Listrik	1.203.102.160	896.840.470
* Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar	14.500.000	14.700.000
* Belanja Kawat/Fax/Internet, dll	204.829.368	155.475.861
* Belanja Pembayaran Pajak, Izin dan Bea	-	626.500
* Belanja Iuran Jamkes Bagi Non ASN	-	-
* Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor	168.000.000	250.500.000
* Belanja Sewa Bangunan Gedung, dll	22.500.000	22.500.000
* Belanja Jasa Pengelolaan Limbah Medis	199.988.978	199.408.725
* Belanja Jasa Konsultasi Dokumen Lingkungan	-	16.000.000
* Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur	99.970.000	325.204.900
* Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	90.553.000	743.971.800
Jumlah Belanja Jasa Kantor	31.851.201.953	35.054.609.152

(3) Belanja Pemeliharaan

* Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	388.466.869	318.274.125
* Belanja Jasa Service	3.912.500	3.500.000
* Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	362.600.000	150.000.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan	754.979.369	471.774.125

(4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

	207.796.557	229.163.432
--	--------------------	--------------------

(5) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan

	25.295.000	62.250.000
--	-------------------	-------------------

Jumlah Belanja Barang dan Jasa	49.382.230.759	49.663.454.413
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

c. Belanja Modal

Belanja Modal Peralatan & Mesin

* Belanja Modal Alat Angkutan	-	369.200.000
* Belanja Modal Alat Penghancur Limbah Medis	1.765.000.000	-
* Belanja Modal Alat Besar Bantu	-	5.495.610.000
* Belanja Modal Alat Kantor & Rumah Tangga	1.201.140.000	105.450.000
* Belanja Modal Alat Studio, dll	-	-
* Belanja Modal Alat Kesehatan & Kedokteran	8.487.339.530	18.785.541.043
* Belanja Modal Komputer	175.775.000	181.500.000
Sub Jumlah Belanja Modal & Mesin	11.629.254.530	24.937.301.043

Belanja Modal Bangunan dan Gedung

6.056.000.000 **31.636.936.040**

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

- **16.252.137.000**

Jumlah Belanja Modal

17.685.254.530 **72.826.374.083**

Jumlah belanja - LRA

115.461.645.122 **171.390.095.352**

11 PENDAPATAN - LO

Akun ini terdiri dari :

1. Pendapatan Jasa Layanan

Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan dari masyarakat 49.067.585.868 39.039.025.852

2. Pendapatan Hasil Kerjasama

Hasil Kerja Sama dengan pihak lain 51.881.820 72.365.255

3. Pendapatan Non Usaha

Pendapatan APBD 17.264.894.010 74.873.167.218

4. Pendapatan Lain-lain Yang Sah

Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 194.398.817 225.205.070

JUMLAH PENDAPATAN USAHA - LO

66.578.760.515 **114.209.763.395**

12 BEBAN USAHA - LO

Akun ini terdiri dari :

Beban Pegawai 706.448.140 660.370.100

Beban Barang Habis Pakai 16.566.968.354 13.845.657.704

Beban Jasa 31.876.496.953 26.863.235.302

Beban Pemeliharaan 754.979.369 471.774.125

Beban Perjalanan Dinas 207.796.557 229.163.432

Beban Penyusutan Aset 19.823.162.060 14.587.831.302

JUMLAH BEBAN USAHA - LO

69.935.851.433 **56.658.031.965**



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si., Ak & REKAN

Ijin Menkeu: No Kep. 109/KM 5/2005

Nomor : 00077/2.0664/AU.5/11/1197-1/1/V/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dewan Pengawas dan Direksi
RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan RSD LIUN KENDAGE TAHUNA yang terdiri dari laporan realisasi anggaran tanggal 31 Desember 2023, serta laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan RSD LIUN KENDAGE TAHUNA tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini Wajar Dengan Pengecualian

RSD LIUN KANDAGE TAHUNA tidak melakukan secara utuh proses penyusunan laporan keuangan berbasis accrual melalui jurnal transaksi, sehingga berdampak terhadap adanya selisih pembukuan sebesar Rp. 897.458.954 yang tidak bisa dijelaskan oleh manajemen. RSD LIUN KANDAGE TAHUNA juga belum melakukan inventarisasi dan upaya-upaya penghapusan aset yang memiliki kondisi rusak berat dan hilang yang tercantum dalam akun Aset Lainnya.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

Office 1: Jl. Gubeng Kertajaya III F/10 Surabaya 60281
2. Regus Pakuwon Centre 23rd Floor
Jalan Embong Malang No.1 - 5 Surabaya 60261
Telp/ Fax - 031 - 5055789 / 5046348
Email : kapbasridanrekan@yahoo.co.id
www.kapbasrisurabaya.com



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan RSD LIUN KENDAGE TAHUNA dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan RSD LIUN KENDAGE TAHUNA.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat dapat diekspetasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap resiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis opini bagi kami. Resiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Office: 1 Jl. Gubeng Kertajaya III F/ 10 Surabaya 60281
2. Regus Pakuwon Centre 23rd Floor
Jalan Embong Malang No.1 - 5 Surabaya 60261
Telp / Fax : 031 - 5055789 / 5046348
Email : kapbasridanrekan@yahoo.co.id
www.kapbasrisurabaya.com



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan RSD LIUN KENDAGE TAHUNA untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & REKAN

Partner

Drs. Subyakto, MM., Ak., CA., CPA.
NRAP : AP. 1197

Surabaya, 27 Mei 2023



Office: 1 Jl. Cubeng Kertajaya III F/10 Surabaya 60281
2. Regus Pakuwon Centre 23rd Floor
Jalan Embong Malang No. 1 - 5 Surabaya 60261
Telp / Fax : 031 - 5055789 / 5046348
Email : kapbasridanrekan@yahoo.co.id
www.kapbasrisurabaya.com



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**



LAPORAN KEUANGAN

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN BUKU 2023**



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NERACA
Per 31 Desember 2023
LAPORAN KONSOLIDASI

NAMA PERKIRAAN	2023	2022	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
AKTIVA				
AKTIVA LANCAR				
Kas Dan Bank				
Kas Besar - Rupiah	20.075.580,00	27.987.609,00	(7.912.029,00)	(28,26)
Rekening Giro Bank Rupiah - Bri	35.518.286,32	6.051.624,72	29.466.661,60	486,92
Rekening Giro Bank Rupiah - Bank Sulut	22.860.381,00	20.224.219,00	2.636.162,00	13,03
Rekening Giro Bank Rupiah - Mandiri	0,00	1.377.809,18	(1.377.809,18)	(100,00)
Rekening Giro Bank Rupiah - Bni	14.521.207,00	9.536.396,00	4.984.809,00	52,27
Rekening Giro Bank Rupiah - Sulut li	6.825.027,00	7.065.027,00	(240.000,00)	(3,39)
Rekening Giro Bank Rupiah - Bri li	4.027.888,00	0,00	4.027.888,00	-
Jumlah Kas Dan Bank	103.828.369,32	72.242.686,90	31.585.682,42	43,72
Piutang Usaha				
Piutang Rekening Pelanggan Sosial - Umum	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Rekening Hidran/wc/kran Umum	98.507.360,42	91.647.860,42	6.859.500,00	7,48
Piutang Rek. Pelanggan Non Niaga - Inst. Pmrintah	707.256.360,83	720.636.760,83	(13.380.400,00)	(1,85)
Piutang Rekening Tempat Ibadah/ Sekolah/ Sosial	1.110.669.726,87	1.019.072.026,87	91.597.700,00	8,98
Piutang Rek. Pelanggan Niaga - Niaga Kecil	1.190.743.823,36	1.162.091.573,36	28.652.250,00	2,46
Piutang Rek. Pelanggan Niaga - Niaga Besar	69.900.995,14	53.864.895,14	16.036.100,00	29,77
Piutang Rumah Tangga A (kelompok liat)	1.104.194.029,70	1.109.531.629,70	(5.337.600,00)	(0,48)
Piutang Rumah Tangga B (kelompok lib)	7.330.792.360,99	5.875.341.310,99	1.455.451.050,00	24,77
Piutang Rumah Tangga C (kelompok lic)	1.924.800,00	0,00	1.924.800,00	-
Piutang Asrama Tni/polri/brimob/kompi	744.376.571,49	732.827.921,49	11.548.650,00	1,57
Piutang Kelompok Khusus/pelabuhan	106.180.019,56	79.700.769,56	26.479.250,00	33,22
Piutang Kelompok Khusus / Pelabuhan (kelompok lv)	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Air Tengku	181.319.033,65	195.191.033,65	(13.872.000,00)	(7,10)
Rekening Air Lainnya	(1.049.781.851,00)	0,00	(1.049.781.851,00)	-
Piutang Rekening Air - Tidak Teridentifikasi	(18.618.900,00)	0,00	(18.618.900,00)	-
Cad. Penyisihan Piutang Rekening Air/ Tangkr	(4.718.993.910,00)	(4.718.993.910,00)	0,00	0,00
Jumlah Piutang Usaha	6.858.470.421,01	6.320.911.872,01	537.558.549,00	8,50
Piutang Lain-lain				
Pinjaman Pegawai Direksi	162.850.000,00	162.850.000,00	0,00	0,00
Pinjaman Pegawai Kepala Bagian	5.200.000,00	12.000.000,00	(6.800.000,00)	(56,66)
Pinjaman Pegawai Pelaksana	54.413.045,00	12.494.148,00	41.918.897,00	335,50
Rupa-rupa Piutang Lainnya	7.336.700,00	20.145.000,00	(12.808.300,00)	(63,58)
Jumlah Piutang Lain-lain	229.799.745,00	207.489.148,00	22.310.597,00	10,75
Persediaan				
Tawas	0,00	0,00	0,00	-
Kaport	0,00	0,00	0,00	-
Alat Tulis Dan Cetakn	18.237.000,00	1.272.000,00	16.965.000,00	1333,72
Water Meter (kode ini Jangan Dipakai)	0,00	0,00	0,00	-

h

NAMA PERKIRAAN	2023	2022	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
Aksesoris Pipa (kode Ini Jangan Dipakai)	0,00	0,00	0,00	-
Pipa-pipa	15.281.000,00	7.560.000,00	7.721.000,00	102,12
Meter Air	57.600.000,00	3.510.000,00	54.090.000,00	1541,02
Accessories	70.722.950,00	30.255.500,00	40.467.450,00	133,75
Jumlah Persediaan	161.840.950,00	42.597.500,00	119.243.450,00	279,93
Pembayaran Dimuka				
Sewa Dibayar Dimuka - Kantor	148.250.000,00	115.750.000,00	32.500.000,00	28,07
Uang Muka Operasi	0,00	0,00	0,00	-
Uang Muka Perjalanan Dinas	35.023.479,00	44.101.000,00	(9.077.521,00)	(20,58)
Uang Muka Pengobatan	22.580.000,00	22.580.000,00	0,00	0,00
Uang Muka Kerja Lainnya	15.904.475,00	12.904.475,00	3.000.000,00	23,24
Uang Muka Pembelian Lokal	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	-
Uang Muka Pembelian Aset - Tanah	71.260.000,00	71.260.000,00	0,00	0,00
Rupa-rupa Pembayaran Dimuka Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Pembayaran Dimuka	300.717.954,00	266.595.475,00	34.122.479,00	12,79
JUMLAH AKTIVA LANCAR	7.654.657.439,33	6.909.836.681,91	744.820.757,42	10,77
AKTIVA TETAP				
Aktiva Tetap Produktif				
Tanah Dan Hak Atas Tanah	665.180.637,00	665.180.637,00	0,00	0,00
Instalasi Sumber Air Lainnya	1.392.730.355,78	1.392.730.355,78	0,00	0,00
Bangunan Dan Perbaikannya	676.379.551,14	676.379.551,14	0,00	0,00
Peralatan Pompa	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00
Bangunan Dan Perbaikannya	238.332.834,74	238.332.834,74	0,00	0,00
Meter Air Yang Terpasang	900.791.501,00	885.116.501,00	15.675.000,00	1,77
Instalasi Transmisi Dan Distribusi Lain	10.073.695.935,88	10.045.523.935,88	28.172.000,00	0,28
Bangunan Kantor	114.317.530,38	114.317.530,38	0,00	0,00
Bangunan Gedung Peralatan	54.632.500,00	54.632.500,00	0,00	0,00
Alat-alat Perhubungan / Telekomunikasi	148.774.000,00	147.575.000,00	1.199.000,00	0,81
Rupa-rupa Alat Dan Perlengkapan Lain	545.785.102,50	545.785.102,50	0,00	0,00
Kendaraan Roda 4 (empat)	2.029.619.575,00	2.029.619.575,00	0,00	0,00
Kendaraan Roda 2 (dua)	76.609.000,00	76.609.000,00	0,00	0,00
Kendaraan Angkut Barang / Material	126.450.000,00	126.450.000,00	0,00	0,00
Meubelair Kantor	18.220.000,00	15.620.000,00	2.600.000,00	16,64
Mesin-mesin Kantor	336.366.800,00	327.841.800,00	8.525.000,00	2,60
Rupa-rupa Inventaris/perabot Kantor Lain	394.877.000,00	374.691.000,00	20.186.000,00	5,38
Inventaris / Perabotan Kantor	847.234.070,00	847.234.070,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Inst. Sumber Air	(13.796.185.530,79)	(13.796.185.530,79)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pompa	(358.066.670,45)	(358.066.670,45)	0,00	0,00
Akum.penysusutan Inst. Trans. & Dist.	(107.978.817,77)	(107.978.817,77)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan/ Gedung	(60.136.492,17)	(60.136.492,17)	0,00	0,00
Akum.penysusutan Peralatan & Perlengkapan	(215.988.811,15)	(215.988.811,15)	0,00	0,00
Akum.penys. Kendaraan/alat Pengangkutan	(314.861.605,38)	(314.861.605,38)	0,00	0,00
Akum peny. Inventaris/perabot Kantor	(458.971.933,93)	(458.971.933,93)	0,00	0,00
Jumlah Aktiva Tetap Produktif	3.447.856.531,78	3.371.499.531,78	76.357.000,00	2,26
Aktiva Tetap Leasing				
Aktiva Leasing	(2.460.000,00)	(2.460.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aktiva Leasing	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Aktiva Tetap Leasing	(2.460.000,00)	(2.460.000,00)	0,00	0,00
JUMLAH AKTIVA TETAP	3.445.396.531,78	3.369.039.531,78	76.357.000,00	2,26

2

NAMA PERKIRAAN	2023	2022	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
AKTIVA LAIN-LAIN				
Aktiva Lain-lain Berwujud				
Aktiva Tetap Lain-lain Dim Penyelesaian	0,00	0,00	0,00	-
Aktiva Yang Belum Ditetapkan Statusnya	97.220.261.000,00	97.220.261.000,00	0,00	0,00
Aktiva Yang Belum Dipergunakan	420.315.480,00	420.315.480,00	0,00	0,00
Jumlah Aktiva Lain-lain Berwujud	97.640.576.480,00	97.640.576.480,00	0,00	0,00
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	97.640.576.480,00	97.640.576.480,00	0,00	0,00
JUMLAH AKTIVA	108.740.630.451,11	107.919.452.693,69	821.177.757,42	0,76
KEWAJIBAN DAN MODAL				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Usaha	689.690.111,00	698.219.236,00	(8.529.125,00)	(1,22)
Utang Non Usaha	2.834.817.671,09	1.878.585.468,09	956.232.203,00	50,90
Utang Ppn	28.361.019,00	10.916.268,00	17.444.751,00	159,80
Utang Pph Ps. 21	10.349.490,00	1.221.013,00	9.128.477,00	747,61
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Lainnya	425.762.607,64	425.762.607,64	0,00	0,00
Utang Pph Pasal 21	52.867.218,85	52.867.218,85	0,00	0,00
Utang Pph Pasal 25	945.471.795,00	945.471.795,00	0,00	0,00
Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4.987.319.912,58	4.013.043.606,58	974.276.306,00	24,27
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.987.319.912,58	4.013.043.606,58	974.276.306,00	24,27
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN LAIN-LAIN				
Kewajiban Jangka Panjang				
Utang Leasing	(820.000,00)	(820.000,00)	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	(820.000,00)	(820.000,00)	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN	(820.000,00)	(820.000,00)	0,00	0,00
MODAL DAN CADANGAN				
Modal Dan Cadangan				
Kekayaan Asal Dana Pembangunan Daerah	16.387.233.646,38	16.387.233.646,38	0,00	0,00
Penyertaan Yang Belum Ditetapkan Statusnya	98.375.028.070,18	98.375.028.070,18	0,00	0,00
Modal Hibah	204.840.250,00	204.840.250,00	0,00	0,00
Laba Ditahan/(akumulasi Kerugian)	(11.059.872.879,46)	(10.912.150.707,04)	(147.722.172,42)	1,35
Laba (rugi) Periode Berjalan	(153.098.548,58)	(147.722.172,42)	(5.376.376,16)	3,63
Jumlah Modal Dan Cadangan	103.754.130.538,52	103.907.229.087,10	(153.098.548,57)	(0,14)
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN	103.754.130.538,52	103.907.229.087,10	(153.098.548,57)	(0,14)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	108.740.630.451,10	107.919.452.693,68	821.177.757,42	0,76

Tahuna, 30 Januari 2024

Mengetahui
Direktur



TEGUH P. SALAINTI, S.IP. M.E
NIPP : .



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SANGIHE

Jalan Penjernihan 1, Tahuna

LAPORAN LABA RUGI

Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

LAPORAN KONSOLIDASI

URAIAN	2023	2022	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
PENDAPATAN USAHA				
Harga Air	10.430.475.600,00	10.552.103.100,00	(121.627.500,00)	(1,15)
Beban Tetap	1.119.916.050,00	1.087.242.050,00	32.674.000,00	3,00
Pendapatan Penjualan Air Lainnya	0,00	70.000,00	(70.000,00)	-
Jumlah Pendapatan Penjualan Air	11.550.391.650,00	11.639.415.150,00	(89.023.500,00)	(0,76)
Pendapatan Non Air				
Pendapatan Sambungan Baru	94.490.000,00	77.900.000,00	16.590.000,00	21,29
Pendapatan Pendaftaran	5.545.000,00	3.175.000,00	2.370.000,00	74,64
Pendapatan Denda	611.167.200,00	556.075.000,00	55.092.200,00	9,90
Pendapatan Balik Nama	3.800.000,00	10.976.500,00	(7.176.500,00)	(65,38)
Pendapatan Air Tangki	228.950.000,00	253.390.000,00	(24.440.000,00)	(9,64)
Pendapatan Non Air Lainnya	37.271.516,00	40.652.945,00	(3.381.429,00)	(8,31)
Jumlah Pendapatan Non Air	981.223.716,00	942.169.445,00	39.054.271,00	4,14
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	12.531.615.366,00	12.581.584.595,00	(49.969.229,00)	(0,39)
BEBAN LISTRIK				
Beban Listrik Sumber Air				
Biaya Listrik PLN	110.000,00	0,00	110.000,00	-
Jumlah Beban Listrik Sumber Air	110.000,00	0,00	110.000,00	-
JUMLAH BEBAN LISTRIK	110.000,00	0,00	110.000,00	-
BEBAN PEMELIHARAAN				
Beban Pemeliharaan Sumber Air				
Pemeliharaan Instalasi Sumber Lainnya	3.417.000,00	7.250.700,00	(3.833.700,00)	(52,87)
Jumlah Beban Pemeliharaan Sumber Air	3.417.000,00	7.250.700,00	(3.833.700,00)	(52,87)
JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN	3.417.000,00	7.250.700,00	(3.833.700,00)	(52,87)
BEBAN PENYUSUTAN				
Beban Penyusutan Sumber Air				
Biaya Penyusutan Inst. Sumber Air	0,00	49.009.703,81	(49.009.703,81)	-
Jumlah Beban Penyusutan Sumber Air	0,00	49.009.703,81	(49.009.703,81)	-
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN	0,00	49.009.703,81	(49.009.703,81)	-
BEBAN PEMAKAIAN BAHAN				
Beban Pemakaian Bahan Kimia Pengolahan				
Pemakaian Bahan Kimia Kaporit	0,00	0,00	0,00	-
JUMLAH BEBAN PEMAKAIAN BAHAN	0,00	0,00	0,00	-
BEBAN LISTRIK				
Biaya Bahan Bakar Pompa	0,00	103.000,00	(103.000,00)	-
Biaya Listrik PLN Pompa	342.984.247,00	267.741.738,00	75.242.509,00	28,10
Jumlah Beban Listrik Pengolahan	342.984.247,00	267.844.738,00	75.139.509,00	28,05
JUMLAH BEBAN LISTRIK	342.984.247,00	267.844.738,00	75.139.509,00	28,05

Handwritten signature or mark.

LAPORAN LABA RUGI

URAIAN	2023	2022	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
BEBAN OPERASI LAINNYA				
Beban Operasi Lainnya Pengolahan				
Rupa-rupa Biaya Operasi Pengolahan Air	186.000,00	180.000,00	6.000,00	3,33
Jumlah Beban Operasi Lainnya Pengolahan	186.000,00	180.000,00	6.000,00	3,33
JUMLAH BEBAN OPERASI LAINNYA	186.000,00	180.000,00	6.000,00	3,33
BEBAN PEMELIHARAAN				
Beban Pemeliharaan Pengolahan				
Pemeliharaan Inst.Pompa	375.000,00	0,00	375.000,00	-
Pemel. Inst. Listrik Pengolahan	0,00	60.157.041,00	(60.157.041,00)	-
Pemel Inst Pengolahan lainnya	27.864.900,00	137.052.716,00	(109.187.816,00)	(79,66)
Jumlah Beban Pemeliharaan Pengolahan	28.239.900,00	197.209.757,00	(168.969.857,00)	(85,68)
JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN	28.239.900,00	197.209.757,00	(168.969.857,00)	(85,68)
BEBAN PENYUSUTAN				
Beban Penyusutan Pengolahan				
Biaya Penyust. Inst. Pengolahan Lainnya	0,00	108.947.837,55	(108.947.837,55)	-
Jumlah Beban Penyusutan Pengolahan	0,00	108.947.837,55	(108.947.837,55)	-
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN	0,00	108.947.837,55	(108.947.837,55)	-
BEBAN PEMAKAIAN BAHAN				
Beban Pemakaian Bahan Pembantu Transmisi				
Rupa-rupa Biaya Operasi Transmisi dan Distribusi	0,00	100.000,00	(100.000,00)	-
Jumlah Beban Pemakaian Bahan Pembantu	0,00	100.000,00	(100.000,00)	-
JUMLAH BEBAN PEMAKAIAN BAHAN	0,00	100.000,00	(100.000,00)	-
BEBAN PEMELIHARAAN				
Beban Pemeliharaan Transmisi Distribusi				
Pemel Transmisi dan Distribusi Lainnya	148.261.840,00	311.431.358,00	(163.169.518,00)	(52,39)
Jumlah Beban Pemeliharaan Transmisi Distribusi	148.261.840,00	311.431.358,00	(163.169.518,00)	(52,39)
JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN	148.261.840,00	311.431.358,00	(163.169.518,00)	(52,39)
BEBAN PENYUSUTAN				
Beban Penyusutan Transmisi Distribusi				
Biaya Penyust. Trans. & Distr. Lainnya	0,00	1.836.575,05	(1.836.575,05)	-
Jumlah Beban Penyusutan Transmisi Distribusi	0,00	1.836.575,05	(1.836.575,05)	-
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN	0,00	1.836.575,05	(1.836.575,05)	-
BEBAN PEGAWAI				
Beban Pegawai Umum Dan Administrasi				
Biaya Pegawai/ Gaji	9.051.883.773,00	8.413.054.937,00	638.828.836,00	7,59
Tunjangan	1.891.372,00	0,00	1.891.372,00	-
Iuran Pensiun	296.200.227,00	340.989.103,00	(44.788.876,00)	(13,13)
Iuran Astek	673.348.671,00	213.564.144,00	459.784.527,00	215,29
L e m b u r	15.984.800,00	23.308.800,00	(7.324.000,00)	(31,42)
Kesejahteraan Karyawan	200.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	(80,00)
Pakaian Dinas	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	-
Bantuan dan Sumbangan	17.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	41,66
Pendidikan dan Latihan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-
THR	435.626.862,00	486.176.054,00	(50.549.192,00)	(10,39)
Biaya Langganan Media Elektronik	150.000,00	390.000,00	(240.000,00)	(61,53)
Biaya Honor Badan Pengawas	142.502.575,00	139.238.991,00	3.263.584,00	2,34
Uang jasa badan pengawas	10.334.400,00	0,00	10.334.400,00	-
Biaya Representatif	134.763.729,00	139.500.000,00	(4.736.271,00)	(3,39)

2

LAPORAN LABA RUGI

URAIAN	2023	2022	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
Jumlah Beban Pegawai Umum Dan Administrasi	10.784.886.409,00	9.781.222.029,00	1.003.664.380,00	10,26
JUMLAH BEBAN PEGAWAI	10.784.886.409,00	9.781.222.029,00	1.003.664.380,00	10,26
BEBAN HUBUNGAN LANGGANAN				
Beban Hubungan Langganan				
Biaya Pengawasan Meter	250.000,00	0,00	250.000,00	-
Biaya Pembacaan Meter	34.577.000,00	24.655.000,00	9.922.000,00	40,24
Biaya Penagihan Rek Air	205.552.101,00	256.872.671,00	(51.320.570,00)	(19,97)
Rupa-rupa Biaya Langganan	13.272.025,00	10.834.000,00	2.438.025,00	22,50
Jumlah Beban Hubungan Langganan	253.651.126,00	292.361.671,00	(38.710.545,00)	(13,24)
JUMLAH BEBAN HUBUNGAN LANGGANAN	253.651.126,00	292.361.671,00	(38.710.545,00)	(13,24)
BEBAN OPERASI LAINNYA				
Beban Operasi Lainnya Umum Dan Administrasi				
Biaya ATK & foto Copy	15.098.200,00	50.658.850,00	(35.558.650,00)	(70,19)
Perlengkapan Komputer	39.703.303,00	36.867.701,00	2.835.602,00	7,69
Biaya Telpon Teleks, & Telegram	5.114.000,00	9.035.000,00	(3.921.000,00)	(43,39)
Biaya Rapat & Tamu	21.415.016,00	1.977.000,00	19.438.016,00	983,20
Biaya Konsumsi	9.761.400,00	28.496.900,00	(18.735.500,00)	(85,74)
Biaya Pos & Meterai	2.676.000,00	4.168.000,00	(1.492.000,00)	(35,79)
Biaya Listrik Kantor	80.188.931,00	79.879.262,00	309.669,00	0,38
Rupa-rupa Biaya Kantor	12.988.300,00	14.880.295,00	(1.891.995,00)	(12,71)
Biaya Survey & Penelitian	0,00	100.000,00	(100.000,00)	-
Biaya Perjalanan Dinas	132.462.521,00	169.923.466,00	(37.460.945,00)	(22,04)
Biaya Bantuan Hukum	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-
Biaya Audit	44.400.000,00	50.000.000,00	(5.600.000,00)	(11,20)
Biaya Asuransi Kesehatan	84.745.020,00	96.896.574,00	(12.151.554,00)	(12,54)
Biaya PBB	3.464.252,00	3.500.652,00	(36.400,00)	(1,03)
Retribusi PAD	1.960.000,00	1.260.000,00	700.000,00	55,55
Biaya Retribusi/ Penjinan	0,00	0,00	0,00	-
Sumbangan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	367.455.017,00	652.741.644,00	(285.286.627,00)	(43,70)
Dana Representasi	0,00	9.815.000,00	(9.815.000,00)	-
Biaya Bahan Bakar Kendaraan	41.516.550,00	49.946.938,00	(8.430.388,00)	(18,87)
BBM Tengki	21.046.000,00	17.563.000,00	3.483.000,00	19,83
Jumlah Beban Operasi Lainnya Umum Dan	884.994.510,00	1.282.708.282,00	(397.713.772,00)	(31,00)
JUMLAH BEBAN OPERASI LAINNYA	884.994.510,00	1.282.708.282,00	(397.713.772,00)	(31,00)
BEBAN PEMELIHARAAN				
Beban Pemeliharaan Umum Dan Administrasi				
Pemeliharaan Kantor	11.255.740,00	7.888.000,00	3.367.740,00	42,69
Pemeliharaan Penumpang	18.299.300,00	10.781.000,00	7.518.300,00	69,73
Pemeliharaan Angkut Barang	7.963.000,00	16.095.800,00	(8.132.800,00)	(50,52)
Pemeliharaan Tangki Air	14.459.500,00	50.628.000,00	(36.168.500,00)	(71,43)
Pemeliharaan Roda Dua	29.222.000,00	23.983.000,00	5.239.000,00	21,84
Pemeliharaan Bangunan	3.008.000,00	6.772.500,00	(3.764.500,00)	(55,58)
Pemeliharaan Taman & Lapangan	382.000,00	1.195.000,00	(813.000,00)	(68,03)
Jumlah Beban Pemeliharaan Umum Dan Administrasi	84.589.540,00	117.341.300,00	(32.751.760,00)	(27,91)
JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN	84.589.540,00	117.341.300,00	(32.751.760,00)	(27,91)

LAPORAN LABA RUGI

URAIAN	2023	2022	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
BEBAN PENYUSUTAN				
Beban Penyusutan Umum Dan Administrasi				
By. Penyst. Bangunan & Perbaikannya	0,00	6.722.625,00	(6.722.625,00)	-
By. Penyst. Rupa-rupa Alat & Perlengkp. Lainnya	0,00	34.515.187,50	(34.515.187,50)	-
By. Penyst. Alat Angkutan	0,00	38.237.500,00	(38.237.500,00)	-
By. Penyst. Meubel Kantor	0,00	1.597.500,00	(1.597.500,00)	-
By. Penyst. Mesin - Mesin Kantor	0,00	40.000.600,00	(40.000.600,00)	-
By. Penyst. Rupa - rupa Inventaris Kantor	0,00	24.992.864,58	(24.992.864,58)	-
Jumlah Beban Penyusutan Umum Dan Administrasi	0,00	146.066.277,08	(146.066.277,08)	-
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN	0,00	146.066.277,08	(146.066.277,08)	-
LABA (RUGI) KOTOR USAHA	294.794,00	18.074.366,51	(17.779.572,51)	(98,36)
PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA				
Pendapatan Non Usaha				
Pendapatan Jasa Giro	944.108,00	1.051.877,59	(107.771,59)	(10,24)
Jumlah Pendapatan Non Usaha	944.106,00	1.051.877,59	(107.771,59)	(10,24)
Beban Non Usaha				
Biaya Admisitrasi Bank	(1.717.311,58)	(1.659.422,52)	(57.889,06)	3,48
PPh Ps. 21	(8.968.837,00)	(1.223.694,00)	(7.745.143,00)	632,93
Pajak Air Permukaan	(118.201.300,00)	(113.965.300,00)	(4.236.000,00)	3,71
PPh PS. 25 (PPh Badan)	(25.450.000,00)	0,00	(25.450.000,00)	-
JUMLAH PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA	(153.393.342,58)	(115.796.538,93)	(37.596.803,65)	32,46
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(153.098.548,58)	(97.722.172,42)	(55.376.376,16)	56,66
PAJAK PENGHASILAN BADAN	25.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	50,00
LABA (RUGI) BERSIH	(178.098.548,58)	(147.722.172,42)	(72.722.172,42)	65,49

Tahuna, 30 Januari 2024

Mengetahui
Direktur



TEGUH P. SALAINTI, S.IP. M.E
NIPP :



LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023

LAPORAN KONSOLIDASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Laba Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa	(153 098 548,58)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	0,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Penyusutan	0,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Amortisasi	0,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Peysihan Piutang	0,00
Penerimaan (Penggunaan) Kas Dari Kegiatan Operasi - Beban Bunga	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Usaha	(537 558 549,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Lain-Lain	(22 310 597,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Persediaan	(119 243 450,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Pembayaran Dimuka	(34 122 479,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi - Piutang Tak Tertagih	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Usaha	(8 529 125,00)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Non Usaha	982 805 431,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Beban YMH Dibayar	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Pajak	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Panjang Jt Tempo	0,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional - Kewajiban Jk Pendek Lainnya	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 107 942 682,42

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Panjang	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap	(76 357 000,00)
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	0,00
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Lain-Lain	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (76 357 000,00)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	0,00
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	0,00
Kenaikan (Penurunan) Selisaih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0,00
Kenaikan (Penurunan) Cadangan	0,00
Pembagian Laba	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0,00

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 31 585 682,42

Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun 219 964 859,31

Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 251 550 541,73

Tahuna, 30 Januari 2024

Mengetahui
Direktur

TEGUH P. SALAINI, S.IP. M.E
NIPP :